UPAYA MENGHADAPI MISINFORMASI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MELALUI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA

(Studi Pada Dinas Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tanah Grogot)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Mempeoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

HADIANTI ADELLIA
NIM. 155030707111003

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN
MALANG
2019

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

MOTTO

Mengapa Kita Sulit Bahagia?

Karna ***Tolak Ukur*** Kita Adalah Nikmat Orang Lain

Selalu Bersyukur.....

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan untuk Bapak, Ibu dan Kakak

Keluarga Besar Djadam Family

dan Untuk Teman-Teman Seperjuangan di Fakultas Ilmu Administrasi Angkatan 2015

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : UPAYA MENGHADAPI MISINFORMASI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MELALUI PROGRAM KELUARGA BERENCANA (Studi Pada Dinas Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tanah Grogot)

Disusun oleh : Hadianti Adellia

NIM : 155030707111003

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Program Studi : Ilmu Perpustakaan

Malang, September 2019

Komisi Pembimbing

Ketua	Anggota
I Gede Eko Putra Sri Sentanu, Ph.D	**Muhammad Rosyihan Hendrawan SIP,M.Hum**
NIP. 201107831204 1 001	**NIP. 201405 871204 1 001**

repository.ub.ac.id

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahanan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya pada :

Hari	: Selasa
Tanggal	: 03 Desember 2019
Waktu	: 08.00 – 09.00 WIB
Skripsi Atas Nama	: Hadianti Adellia
Judul	: Upaya Menghadapi Misinformasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Program Kampung Keluarga Berencana (Studi Pada Dinas Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tanah Grogot)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua	Anggota
I Gede Eko Putra Sri Sentanu, Ph.D	**Muhammad Rosyihan Hendrawan, SIP, M.Hum**
NIP. 201107 831204 1 001	**NIP. 198712 04201903 1 010**
Anggota	Anggota
Dr. Muhammad Shobaruddin, MA	**Fadillah Putra, M.Si, M.App.Aff**
NIP. `19590219 198601 1 001	**19740627 200312 1 001**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPISI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam bentuk naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 15 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, Oktober 2019

METERAI TEMPEL A5EA9AHF027069092 6000 ENAM RIBURUPIAH

Nama: Hadianti Adelllia
NIM: 155030707111003

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

RINGKASAN

Hadianti Adellia. 2019. **Upaya Menghadapi Misinformasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Program Kampung Keluarga Berencana Studi Studi Pada Dinas Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tanah Grogot**
I Gede Eko Putra Sri Sentanu, S.AP, M.AP, Ph.D. Muhammad Rosyihan Hendrawan, SIP, M.Hum. 238 halaman + xv

---

Misinformasi merupakan sebuah informasi yang disebarkan oleh seseorang dan diterima pada seseorang tanpa mengetahui kebenaran dari informasi tersebut. Informasi, misinformasi dan disinformasi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terlepas dalam siklus difusi informasi. Menghadapi misinformasi pada penyelenggaran pemberdayaan masyarakat melalui sebuah program pada saat ini memperlukan sebuah upaya dalam proses keberhasilan sebuah program pemerintah. Dalam penelitian ini kampung keluarga berencana merupakan sebuah program pembangunan nasional oleh yang diusung oleh pemerintah pusat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kampung keluarga berencana dalam pelaksanaannya di Kabupaten Paser masih terdapat masalah-masalah seperti diskontinutitas atau diskoordinasi, disoreintasi, rentang pelaksanaan dan rentang birokrasi yang mempunyai hubungan dengan waktu (*time)* dalam penyelenggaran program kampung keluarga berencana.

Penelitian ini mempunyai fokus pada masalah-masalah yang timbul dalam penyelenggaran program keluarga berencana, peran para aktor yang terlibat serta faktor pendukung dan penghambat dalam berjalannya program ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian fenomenologi deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatiif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penyelenggaran program kampung berencana pada empat desa di Kabupaten Paser yang menjadi objek penelitian terdapat misinformasi dalam pelaksanaan program yang dipengaruhi oleh waktu (*time*) dan mempengaruhi timbulnya masalah-masalah dalam pemberdayaan masyarakat desa dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Indonesia menjadi lebih baik.

Kata Kunci: Misinformasi, Difusi Informasi, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kampung Keluarga Berencana (KB)

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

SUMMARY

Hadianti Adellia. 2019. **Effort Facing Misinformation in Empowerment Village Communities Trough Program Of KB. Study on The Department of Population Control, Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection of Tanah Grogot City.**
I Gede Eko Putra Sri Sentanu, S.AP, M.AP, Ph.D. Muhammad Rosyihan Hendrawan, SIP, M.Hum. 238 page + xv

---

Misinformation is a information that spread by someone and that information received by someone without knowing the truth of that information. Information, misinformation and disinformation is a unity that can not be release in the cycle of information diffusion. Facing misnformation in the implementations of community empowerment trough the programs is a requires on procces by the successful of government programs. In case of this study of the family planning village (KB) is an national development programs by he central government for all Indonesian peoples's. The Implementation of family planning village (KB) in Paser regency there are still have problems such a like discontinuity or discoordination, disore across, the range of bureaucracy and have relations with time in organizing the family planning village (KB) programs.

This research have a focus of the problemns that arise in the implementation of family planning programs, the role of the actors that nvolved as well as supporting and inhibiting factors in the running of this program. This study use a descriptive phenomenological research method that apporach by using a qualitative research.

Based on the research was conducted, the implementation of the village planning program (KB) in four villages in Paser Regency which is the object of the research, there was an misinformation in implementation of the program which is that influenced by time and affect of problems arise in empowering rural communities and improving the quality of life of people in Indonesian to better.

Keywords: Misinformation, Information Diffusion, Empowerment Society, and Village Family Planning (KB)

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan karunianya yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusuanan skripsi ini. Penelitian dengan judul " Strategi Menghadapi Misinformasi dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Program KB Studi Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak" ini diajukan untuk memenuhi persyaratan akademis dalam menyelesaikan pendidikan kesarjanaan strata-1 pada Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihka yang telah memberikan dorongan, bimbimgan, bantuan serta motivasi seala proses pengerjaan penelitian ini, diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.., selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

3. Bapak Dr. Muhammad Shobaruddin, M.A selaku Ketua Program Studi Perpustakaan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
4. Bapak I Gede Eko Putra Sri Sentanu, S.AP, M.AP, Ph.D selaku Ketua Komisi Pembimbing
5. Bapak H. M Rosyihan Hendrawan, SIP, M.Hum selaku Anggota Komisi Pembimbing
6. Ibu, Kakak dan seluruh keluarga saya yang penulis cintai, atas doa, dukungan, motivasi dan support baik moril maupun materil selama penulis melakukan penelitian
7. Audina, Yenita, Elda, Lili, Ka Yudi, Mely, Ocha dan teman-teman seperjuangan kos terima kasih atas dukungan dan support
8. Serta teman-teman seperjuangan Ilmu Perpustakaan angkatan 2015 atas dukungan dan pegalaman selama menempuh proses perkuliahan

Semoga segala bantuan dan dukungan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Peneliti menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penyusuanan skripsi ini, baik dalam penulisan ataupun kedalaman analisis pembahasan. Akhir kata, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membaca dan membutuhkannya.

repository.ub.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
MOTTO ..... **ii**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **iii**
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iv**
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI ..... **v**
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ..... **vi**
RINGKASAN ..... **vii**
SUMMARY ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR TABEL ..... **xiv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penulisan 12
D. Kontribusi Penelitian 12
E. Sistematika Pembahasan 14

BAB II PEMBAHASAN
A. Penelitian Terdahulu
   1. Mardiyono 16
   2. Yenny Wahyuni 17
   3. Ita Ulumiyah & Dkk 17
B. Konsep Informasi 22
   1. Pengertian Informasi 22
   2. Fungsi Informasi 23

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

3. Jenis-jenis Informasi 24
4. Manfaat Informasi 25
5. Kualitas Informasi 26
C. Konsep Misinformasi 28
1. Pengertian Misinformasi 28
2. Faktor-faktor Misinformasi 30

D. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Desa ... .34
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat 34
2. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat 36
3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat 37
4. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Desa 41
5. Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat Desa 43
E. Konsep Kampung KB 45
1. Definisi Kampung KB 45
2. Tujuan Kampung KB 46
3. Sasaran Kampung KB 48
4. Prinsip Kampung KB 50
5. Indikator Keberhasilan 53
F. Analisis Wacana (*Discourse analysis*) 55

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 57
B. Fokus Penelitian 59
C. Lokasi dan Situs Penelitian 60
D. Sumber Data 62
E. Teknik Pengumpulan Data 66
F. Instrumen Penelitian 70
G. Teknik Analisis Data 73
H. Keabsahan Data 76

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 78
1. Sejarah Kabupaten Paser 78

2. Sejarah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Paser 81
3. Visi, Misi dan Tujuan.....83
4. Lokasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Paser 87
5. Struktur Organisasi 88
6. Profil Kampung Keluarga Berencana (KB) 89
B. Hasil Penelitian 98
1. Masalah-masalah yang timbul 98
a) Diskontinutias dan Diskoordinasi 98
b) Disorientasi atau Rentang Pelaksanaan 104
c) Waktu (t*ime*) 108
d) Rentang Birokrasi dan Biaya Operasional 121
2. Peran Aktor 126
a) Kepala Dinas 126
b) Kepala Desa 128
c) Petugas Penyuluh 131
d) Pengurus Kampung KB 134
e) Lintas Sektoral 138
3. Faktor Pendukung dan Penghambat.....142
a) Faktor Pendukung 142
b) Faktor Penghambat 147
C. Analisis Data 155
1. Masalah-masalah yang Timbul 155
2. Peran Aktor 165
3. Faktor Pendukung dan Penghambat.....170
4. Pengembangan (*Misinformation Solution*) 176

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 177
B. Saran.....180

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

repository.ub.ac.id

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
Tabel. 1	Jumlah Penduduk Menjadi Ancaman	7
Tabel. 2	Penelitian Terdahulu	18
Tabel. 3	Daftar Nama Desa	64
Tabel. 4	Daftar Nama Kampung KB di Kabupaten Paser	96
Tabel. 5	Daftar Pelaksanaan Sosialisasi	100
Tabel. 6	Rentang Waktu Pembentukan Kampung KB	105
Tabel. 7	Bentuk-Bentuk Misinformasi	110
Tabel. 8	Kriteria Misinformasi	120
Tabel. 9	Rentang Birokrasi	121
Tabel. 10	Kegiatan Petugas Penyuluh	134
Tabel. 11	Jumlah Pengurus Kampung KB	138
Tabel. 12	Kerjasama Lintas Sektoral	141

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

DAFTAR GAMBAR

No. Judul Halaman

Gambar 1. Difusi Informasi 33
Gambar 2. Kantor Dinas PPKBP3A 81
Gambar 3. Lokasi Dinas PPKBP3A 87
Gambar 4. Struktur Organisasi.....88
Gambar 5. Balai Kampung KB "Kembang Renteng".....89
Gambar 6. Balai Kampung KB "Sipakatuo" 90
Gambar 7. Balai Kampung KB " Harapan Taka".....92
Gambar 8. Balai Kampung KB "Pesisir Indah".....93
Gambar 9. Sosialisasi Rutin Kampung KB Kembang Renteng.....101
Gambar 10. Model Difusi Informasi.....118
Gambar 11 Pengurus Kampung KB Harapan Taka 137
Gambar 12 Sosialisasi Kampung Iklim 140
Gambar 13 Daftar Tanda Terima Uang Transport 146
Gambar 14. Standing Banner.....154
Gambar 15. Model Difusi Informasi Kampung KB Sipakatuo.....159
Gambar 15. Model Difusi Informasi Kampung KB Kembang Renteng.....160
Gambar 16. Model Difusi Informasi Kampung KB Harapan Taka 161
Gambar 17. Model Difusi Informasi Kampung KB Pesisir Indah.....162
Gambar 19. Sosialiasasi Kampung KB Desa Pepara Sipakatuo 242
Gambar 20. Kegiatan Kampung KB "Sipakatuo".....242
Gambar 21. Sosialiasasi Kampung KB "Kembang Renteng" 243
Gambar 22. Sosialiasasi Penggunaan KB 243
Gambar 23. Sosialisasi Kampung KB "Harapan Taka".....244
Gambar 24. Sosialisasi Kampung KB Desa Pondong "Pesisir Indah" 244

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul Halaman

Lampiran 1. Pedoman Observasi 187
Lampiran 2. Pedoman Wawancara 188
Lampiran 3. Pedoman Dokumentasi 189
Lampiran 4. Log Book Penelitian 190
Lampiran 5. Transkrip Hasil Wawancara 206
Lampiran 6. Tanda Kesedian Narasumber.....241
Lampiran 7. Foto-Foto Pendukung Penelitian 242

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Informasi secara umum dipandang sebagai sesuatu yang dapat memberikan sebuah pegetahuan baru dan dapat menjadi pendalaman ilmu pada seorang individu. Informasi dapat dipandang sebagai sebuah ilmu yang dapat mudah ditemukan melalui berbagai sumber tanpa mengetahui kebenaran dari informasi tersebut. Adanya penyebaran informasi tentu tidak lepas dari siapa Aktor-aktor yang berperan dalam penyebaran informasi tersebut dan dapat menentukan kevalidan sebuah informasi yang didapatkan maupun informasi tesebut disebarkan.

Penyebaran suatu informasi aktor yang berperan dalam penyebaran tersebut tidak jika dapat berfungsi dengan benar maka akan muncul suatu permasalahan-permasalahan yang dapat terjadi. Menurut La Midjan dan Susanto (2001:28) mengungkapkan bahwa sebuah informasi diartikan sebagai keluaran (*output*) dari suatu pengolahan data (sistem informasi), yang telah terorganisir dan berguna bagi orang yang menerimanya. Berdasarkan hal tersebut informasi dapat menjadi kebutuhan primer

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

seorang individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan konteks informasi yang berhubungan dengan kebutuhan masing-masing setiap individu yang berbeda-beda.

Era sekarang masalah-masalah sosial yang banyak ditemukan dan mendapat banyak perhatian khususnya ialah mengenai kebutuhan informasi pada seseorang. Informasi dapat dipandang sebagai penyatu pemahaman makna antar individu untuk mencapai suatu tujuan bersama. Masalah-masalah yang adapada masyarakat pada era sekarang lebih cenderung membuat informasi tersebut dapat menimbulkan suatu permasalahan dan mengakibatkan terjadinya kesalapahaman mengenai informasi tersebut. Informasi, misinformasi dan disinformasi merupakan sebuah satu kesatuan dalam siklus penyebaran informasi (*information diffusion).*

Penyebaran informasi pada saat ini sering kali terjadi kesalahan-kesalahan yang disengaja maupaun tidak disengaja. Kesalahan informasi pada saat ini dapat dibagi dua yaitu kesalahan informasi yang tidak disengaja atau dikenal dengan konsep misinformasi (*misinformation*) dan kesalahan informasi yang disengaja atau dikenal dengan konsep disinformasi (*disinformation*). Kesalahan-kesalahan informasi tersebut dapat diminimalisir dengan adanya pemahaman serta pembelajaran sesuai dengan tindakan (*action*) yang tepat dan dapat mengurangi kesalahan pada

saat menerima informasi dibutuhkan peran literasi informasi bagi seorang individu.

Literasi informasi memiliki dimensi dari sebuah pembelajaran menurut *Australian and New Zealand Institute for Information Literacy* (2004:7) yaitu terdiri: (1) kemampuan umum yang dapat berupa termasuk pemecahan masalah, sebuah kolaborasi dan kerja sama antarkelompok dan komunikasi dan cara berpikir kritis. (2) kemampuan informasi yang dapat berupa proses pencarian informasi dan penggunaan informasi untuk kelancaran dalam hal teknologi informasi. (3) nilai dan keyakinan dapat berupa penggunaan informasi secara bijak dan beretika serta dapat bertanggungjawab secara sosial dalam partisipasi dalam masyarakat.

Literasi informasi mempunyai banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh setiap individu. Literasi informasi dapat menghambat terjadinya kesalahpahaman tentang informasi yang didapat dengan cara menguasai literasi informasi tersebut. dengan adanya literasi informasi dan tindakan (*action)* yang tepat, maka diharapkan masyarakat akan dapat lebih di mengerti dan memahami serta mengetahui kebenaran dari suatu informasi yang didapat.

Salah satu masalah yang akan muncul di masyarakat dengan kurangnya pengetahuan literasi informasi ialah adanya fenomena misinformasi yang merupakan suatu masalah yang banyak terjadi pada

lapisan masyarakat pada saat ini. Misinformasi pada umumnya merupakan sebuah pengertian kesalahpahaman pada seorang individu dalam menerima informasi dan individu tersebut tidak mengetahui bahwa informasi itu merupakan informasi yang salah. Misinformasi pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang banyak terjadi pada masyarakat saat ini mulai dari tingkat umum (lapisan masyarakat), tingkat pendidikan, mauaun di dalam suatu keluarga.

Bentuk dari misinformasi yang perlu ditinjau adalah bagaimana misinformasi tersebut berkembang pada berbagai lapisan di masyarakat, terutama pada proses pemberdayaan masyarakat. Sebagai contoh adalah dengan adanya pemberdayaan masyarakat desa melalui program kampung KB yang ada di Indonesia.

Pemberdayaan masyarakat erat kaitannya dengan berjalannya suatu kebijakan atau program yang bertujuan meningkatkan kesehjateraan masyarakat. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga pranata-pranata terkait juga menjadi penguat. Selain itu, pemberdayaan juga menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, keterbukaan maupun tanggung jawab yang merupakan bagian pokok dari pemberdayaan seutuhnya. Tujuan pemberdayaan masyarakat menurut (Payne dalam Adi, 2008), mengatakan bahwa:

> "Untuk membantu masyarakat memperoleh daya dalam pengambilan keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan, terkait dengan diri mereka adalah termasuk mengurangi efek hambaran pribadi dan sosial dalam melakukan sebuah tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri yang ia miliki dengan melalui transfer daya dari lingkungannya"

Salah satu upaya dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sisi keberadaannya sebuah program yang ada dimasyarakat tersebut. Jika dengan adanya pemberdayaan sebagai suatu program, maka adanya tahapan-tahapan didalamnya guna mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan dengan jangka waktu. Oleh karena itu, diperlukan upaya menghadapi misinformasi dalam pemberdayaan masyarakat agar masyarakat mengerti maksud dan tujuan sebenarnya dari program tersebut, tanpa ada keraguan dalam menjalankan program tersebut.

Pada kenyataannya masyarakat indonesia khususnya masyarakat desa masih banyak yang belum mengetahui apa manfaat dan tujuan dengan adanya program Kampung KB sebagai bentuk pemberdayaan yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat desa. Masyarakat desa pada umumnya hanya sekedar mengetahui bahwa dengan adanya program Kampung KB, maka tujuan utamanya hanya untuk membatasi seorang individu untuk mempunyai keturunan. Padangan tersebut bisa menjadi bentuk sebuah kesalahpahaman yang tidak disengaja dan menjadi suatu infromasi yang salah bagi masyarakat desa setempat. Meskipun dinas

terkait pada daerah tersebut telah melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan, secara umum tetapi masih banyak masyarakat yang masih tidak mengetahui dan kurang berpartispiasi dalam program tersebut.

Masyarakat desa dalam kenyataanya hanya mengetahui bahwa dengan adanya kampung KB pada desa tersebut seluruh masyarakat yang ada pada daerah tersebut akan mendapat manfaat dan keuntungan, meskipun masyarakat tersebut tidak berpartisipasi dalam program Kampung KB. Sebagai contoh dengan adanya bantuan lintas sektor seperti bibit tanaman, benih ikan, KTP elektronik, perbaikan kamar mandi, perbaikan jalan, alat kontrasepsi yang diberikan oleh dinas terkait kepada masyarakat yang mengikuti kampung KB. Masyarakat yang berasumsi bahwa bantuan tersebut diberikan kepada seluruh masyarakat yang ada di desa tersebut. Meskipun dinas terkait telah melakukan penyuluhan secara umum untuk masyarakat yang tinggal pada desa tersebut. Salah satu syarat utama agar masyarakat dapat memproleh bantuan-bantuan adalah dengan bergabung dan menjalankan program Kampung KB.

Jika Kampung KB dikaitkan dengan jumlah penduduk indonesia menjadi sebuah ancaman bagi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, maka penduduk indonesia naik dua kali lipat dalam rentang waktu dari tahun 1990-2010. Adanya penyelenggaraan program Kampung KB maka diharapkan akan mengurangi angka ledakan jumlah penduduk khususnya

pada kualitas hidup masyarakat di Indonesia agar masyarakat dapat paham pentingnya program Keluarga Berencana (KB) yang diselenggarakan oleh pemerintah Indoensia untuk membangun kualitas hidup masyarakat Indonesia menjadi lebih baik dan bersifat menyeluruh.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menjadi Ancaman

Tahun	Jumlah Penduduk	Adanya Program KB	Angka Kelahiran Tercegah
1990	178,6 Juta Jiwa	Belum terlaksana	Belum Terlaksana
2000	285 Juta Jiwa	206 Juta Jiwa	80 Juta Jiwa
2010	340 Juta Jiwa	240 Juta Jiwa	100 Juta Jiwa

(Sumber: BKKBN, 2018)

Berdasarkan data diatas bahwa pertumbuhan penduduk Indonesia setiap 10 tahun mengalami kenaikan jumlah penduduk yang sangat tinggi. Dampak dari adanya ledakan penduduk adalah masalah kemiskinan yang terus melanda, daerah kumuh dimana-mana, kekurangan pangan, dan kesenjangan pada sarana dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang rendah. Oleh karena itu, dengan adanya penyelenggaran Kampung KB dapat mencegah ledakan penduduk untuk tidak menjadi suatu masalah yang besar dengan sasaran utamanya adalah keluarga-keluarga yang ada di Indonesia dengan menggunakan prinsip utamanya yaitu 8 fungsi keluarga dalam penyelenggaraanya.

Kampung KB merupakan wujud dari pelaksanaan agenda prioritas pembangunan Nawacita ke 3, 5, dan 8 yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari sisi kewilayahan dan pembinanan karakter bangsa dari keluarga, sehingga pada satuan wilayah setingkat maupun rukun warga, dusun pada suatu masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Kampung KB mempunyai kriteria pemilihan yang meliputi wilayah miskin, terpencil, kumuh dan perbatasan. Lintas sektor meliputi pendidikan yang rendah dan infrastruktur yang kurang memadai.

Adanya program Kampung KB diharapkan angka jumlah penduduk terutama di Indonesia tak menjadi masalah yang besar untuk pemerintah. Dampak yang akan ditimbulkan dengan adanya ledakan penduduk ialah terjadi kemiskinan, kekurangan pangan, daerah menjadi kumuh, kesenjangan sarana dasar seperti pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Kampung KB merupakan sebuah program pencegahan ledakan penduduk akan menjadi sebuah ancaman terbesar bagi pemerintah dalam mensejaherakan masyarakat.

Penyelenggaran Kampung KB dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Januari 2016 dan merupakan salah satu program kegiatan prioritas yang sesuai dengan instruksi Presiden RI, sebagai bentuk investasi program KB yang manfaatnya dapat secara langsung diterima dan dirasakan oleh masyarakat dan telah menghasilkan ratusan

Kampung KB di seluruh Indonesia. Kampung KB merupakan senjata pamungkas baru dari program pemerintah dalam mengatasi masalah kependudukan yang ada di Indonesia.

Kampung KB kedepannya diharapkan akan menjadi sebuah ikon baru dalam program kependudukan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik ditingkat kampung atau setara dengan kelurga kecil yang berkualitas. Penyelenggaraan kampung KB mempunyai tujuan utama yaitu pembangunan keluarga sejahtera yang meliputi peningkatkan kesejahteraan setiap individu, keluarga maupun masyarakat setempat. Kesehjateraan dan peningkatan ketahanan dalam keluarga dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana dan sistem informasi keluarga

Perkembangan kependudukan dan pembangunan juga di atur dalam Undang-Undang nomer 52 Tahun 2009, tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai dasar pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana yang menekankan kewenangan kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Tidak hanya memfokuskan masalah-masalah pengendalian penduduk saja, tetapi (BKKBN) dapat memfokuskan pada

masalah pembangunan keluarga yang sejahtera juga harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah.

Secara umum pengertian keluarga sejahtera apabila keluarga tersebut tidak memiliki beban yang berat, tingkat ekonomi yang kuat dan stabil dan ketahanan dalam keluarga tersebut baik. Dalam pengembangan, Kampung KB deputi Bidang KB dan Kesehatan BKKB Dwi Lisyawardani mengutip dari hasil wawancara Kompas pada bulan Agustus 2018, beliau menyatakan bahwa:

> "Sejauh ini baru ada 7.700 Kampung KB dari 75.000 di desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Jumlah ini masih belum ideal mengingat bahwa desa tertinggal masih banyak membutuhkan fasilitas dan edukasi tentang keluarga. Dan Kampung KB masih 10% dari keseluruhan Desa/Kelurahan yang ada di Indonesia. Kami targetkan jumlahnya meningkat menjadi 25% atau ada sekitar 21.000 Kampung KB pada tahun 2019 nanti"

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa di Indonesia masih perlu adanya pengembangan Kampung KB serta adanya edukasi bagi keluarga khususnya pada pengetahuan tentang memperbaiki kualitas hidup sesuai dengan program pemerintah mengingat bahwa jumlah harapan hidup di Indonesia terus meningkat dan tidak sebanding dengan harapan yang diinginkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Melihat fenomena inilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Upaya Menghadapi Misinformasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui**

Program Kampung KB Studi Pada Dinas Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tanah Grogot

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti uraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa masalah-masalah yang akan terjadi dengan adanya fenomena misinformasi dalam pemberdayaan desa melalui penyelenggaraan Kampung KB oleh Dinas Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBP3A) di Kota Tanah Grogot?
2. Bagaimana peran aktor-aktor yang bepengaruh penting dalam proses pemahaman masyarakat desa dalam mewujudkan program Kampung KB pada Dinas Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBP3A) di Kota Tanah Grogot?
3. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dari penyelenggaran Program Kampung KB di Kabupaten Paser ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah peneliti uraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Mengetahui, mendeskripsikan serta menganalisis upaya dalam menghadapi misinformasi yang terjadi pada masyarakat desa Kampung KB pada Kabupaten Paser Kalimantan Timur.
b. Mengetahui bagaimana peran aktor-aktor yang terlibat dalam mewujudkan proses pemahaman bagi masyarakat melalui program Kampung KB.
c. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat serta upaya pengingkatan pemberdayaan program Kampung KB

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian mengenai strategi dalam menghadapi fenomena misinformasi pada masyarakat Desa Kabupaten Paser Kalimantan Timur ini dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis kepada semua pihak yang terlibat. Kontribusi yang peneliti harapakan adalah sebagai berikut:

a. Kontribusi Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah kontribusi terhadap perkembangan teoritis mengenai Ilmu Perpustakaan dan Ilmu Infromasi terhadap ilmu lainnya yang saling bersangkutan. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi suatu informasi tambahan bagi peneliti yang akan dilakukan selanjutnya mengenai strategi menghadapi fenomena misinformasi dalam masyarakat desa yang masih jarang ditemukan dalam penelitianya.

b. Kontribusi secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat secara umum khususnya bagi tenaga pengajar dan mahasiswa yang dimana secara khusus membahas mengenai misinformasi yang ada di masyarakat dengan adanya studi deskriptif dalam pembentukan kampung KB. Dengan adanya hasil peneliti ini, diharapkan pihak yang bersangkutan dapat menganalisis praktik yang terjadi di lapangan sehingga dapat mencari sebuah solusi dari masalah-masalah yang terjadi mengenai fenomena misinformasi yang terjadi pada masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan adalah suatu pengambaran singkat mengenai keseluruhan isi dari penelitian ini yang terbagi menjadi beberapa bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I dari penelitian ini merupakan bagian pendahuluan dari penelitian yang dilakukan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan dari strategi dalam menghadapi fenomena misinformasi pada masyarakat desa di Kabupaten Paser Kalimantan Timur.

BAB II TINJUAN PUSTAKA

Bab II dari penelitian ini merupakan tinjaun pustaka yaitu yang berkaitan dengan strategi menghadapi fenonema misinformasi pada masyarakat desa di Kabupaten Paser Kalimantan Timur. Teori-teori yang digunakan berkaitan dengan teori strategi, implementasi, masyarakat, dan mengelola informasi.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III dari penelitian ini merupakan metode penelitian dari penelitian yang dilakukan, yang berisi tentang jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik

pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis dara dan keabsahan data

BAB IV HASIL PEMBAHASAN

Bab IV dari penelitian ini merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan, berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, analisis dan interpretasi data mengenai upaya dalam menghadapi misinformasi pada masyarakat desa, serta faktor pendukung dan faktor penghambat dari upaya dalam menghadapi misinformasi pada masyarakat desa.

BAB V PENUTUP

Bab V dari penelitian ini merupakan penutup dari penelitian yang dilakukan, berisi kesimpulan dan saran dari strategi menghadapi fenomena misinformasi dalam masyarakat desa.

Dengan adanya sistematika penulisan tersebut, diharapkan penelitian mengenai strategi dalam menghadapi misinformas pada masyarakat desa dapat berjalan secara terstruktur, ilmiah, dan sistematis sehingga penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti, masyarakat, Universitas Brawijaya dan pihak-pihak yang terlibat pada penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitan terdahulu digunakan untuk menelusur penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan topik penelitian yang diangkat oleh peneliti. Penelitan terdahulu juga berguna untuk mengembangkan persamaan dan perbedaan masalah penelitian yang sudah pernah diteliti, dengan penelitian yang diangkat oleh penulis. Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang memilki keterkaitan dengan apa yang penulis kaji dalam penelitian ini:

1. Mardiyono (2017)

   Penelitian yang dilakukan oleh Mardiyono merupakan perwakilan BKKBN Jawa Timur ini dengan judul Kampung KB Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat/Keluarga di Jawa Tmur, Studi di Kota Malang dan Kabupaten Bondowoso. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kampung KB yang sudah didesain sebagai pemberdayaan masyarakat/keluarga dapat berjalan berdasarkan prinsip, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri dan meningkatkan pencapaian KKBPK dan program terkait guna mewujudkan keluarga yang berkualitas. Tujuan

utamanya adalah untuk membangun masyarakat itu sendiri, peran pemerintah hanya menstimulasi serta melakukan pendampingan.

2. Yenny Wahyuni (2015)

   Penelitian yang dilakukan Yenny Wahyuni dengan judul Padangan Masyarakat Terhadap Program Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera Studi Kasus Terhadap Masyarakat Desa Sidohajo Kecamatan Perwodadi Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tujuan utama dari penelitian ini mengungkapkan bahwa masyarakat sidoarjo yang tidak mengikuti program keluarga berencana karena mereka berasumsi bahwa sifatnya memaksa. Menurut mereka dengan mengikuti program keluarga berencana akan sangat memicu dan berpengaruh dengan keluarga yang sejahtera. Meskipun dinas terkait telah melakukan sosialisasi dan penyuluhan tetapi masih banyak warga desa tersebut mengasumsikan bahwa program tersebut sifatnya memaksa.

3. Ita Ulumiyah, Abdul Juli & Lely Indah Mindarti (2013)

   Penelitian yang dilakukan Ita Ulumiyah, Abdul Juli dan Lely Indah Mindartoo dengan judul Peran Pemerindah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Studi Pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Tujuan utama dari penelitin ini untuk mendeskripsikan peran pemerintah desa dalam masyarakat desa yang

sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani serta tingkat pendidikan masih rendah.

Daftar Tabel. 2 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun) dan Judul	Hasil Penelitian	Metode yang Digunakan
1.	Mardiyono (2017), Kampung KB, Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat/Keluarga di Jawa Timur, Studi di Kota Malang dan Kabupaten Bondowoso	Adanya dukungan dari pusat, seluruh PLB/PKB saling membantu untuk mensukseskan. Adanya kelompok kegiatan baru guna menunjang pelayanan KB. Adanya perubahan baik dari peserta KB karena kurang adanya peran aktif masyarakat	Penelitian ini menggunakan metode evaluatif dengan rancangan deskriptif dan melakukan eksplorasi. Melalui tahapan Penelitian Operasional yang meliputi identifikasi, intervensi, monitoring dan evaluasi

No.	Peneliti (Tahun) dan Judul	Hasil Penelitian	Metode yang Digunakan
2.	Yenny Wahyuni (2015), Pandangan Masyarakat Terhadap Program Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Keluarga Berencana Studi Kasus Terhadap Masyarakat Desa Sidoharjo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah	Menurut pandangan Maysarakat desa sidoarjo hanyalah salah satu upaya dalam mensejahterakan, namun sejatinya semua itu harus kembali lagi kepada masing-masing keluarga. Berbanding terbalik dengan masyarakat yang mengikuti program tersebut.	Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif.

3.	Ita Ulumiyah, & Dkk (2013) Peran Pemerindah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Studi Pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang	Pemerintah Desa Sumberpasir telah menjalankan dengan baik dan pemerintah desa sumberpasir mempinyai kerjasama dengan pihak swasta dalam menjalankan.	Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif.

(Sumber: Hasil Olahan Penulis 2019)

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu:

1. Persamaan : Dalam jurnal tersebut meneliti tentang kampung KB sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan metode penelitian kualitatif

   Perbedaan : Dalam jurnal tersebut hanya fokus pada secara umum gambaran pelaksanaan program kampung KB di Kota Malang dan Kabupaten Bondowoso. Sedangkan, peneliti melalukan penelitian menggunakan beberapa desa sebagai objek penelitian untuk

mengetahui tingkatan pengetahuan masyarakat desa dengan adanya program kampung KB.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2. Persamaan : Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan membahas bagaimana peran kampung KB dalam masyarakat

   Perbedaan : Penelitian ini memfokuskan pada asumsi atau padangan masyarakat desa tersebut dengan adanya program Kampung KB yang sifatnya memaksa. Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan bahwa program kampung KB merupakan salah satu program yang dapat mensehjaterakan masyarakat.

3. Persamaan : Pada penelitian ini menggunkana pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif dan membahas tentang peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

   Perbedaan : Dalam jurnal tersebut fokus hanya pada mendeskripsikan peran pemerintah dalam memberdayaakn masyarakat desa. Sedangkan peneliti melalukan penelitian ini menggunakan pemerintah termasuk dinas-dinas yang ada dikota tersebut untuk membantu melaksanakan penyelenggaran program Kampung KB di Kota Tanah Grogot dan menggunakan beberapa desa sebagai objek penelitian untuk mengetahui tingkatan pengetahuan masyarakat desa dengan adanya program kampung KB.

B. Konsep Informasi

1. Pengertian Informasi

Informasi merupakan sekumpulan data terstruktur dan berupa rangkaian data yang saling berhubungan antara data informasi hasil kerja pikiran manusia sehingga sekumpulan data tersebut dapat dilihat dan terdapat sebuah kesimpulan (Pendit, 1990). Menurut (Pawit, 2012:40), informasi merupakan berbagai sumber yang diterima oleh mahasiswa dengan mahasiswa mencari, menemukan, mengelola serta mengambil keputusan, apakah informasi tersebut dapat digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan informasi yang dibutuhkan.

Informasi merupakan sebuah data yang bisa memberikan makna tentang bagaimana mana ambiguitas, ketidakpastian kesulitan interpertasi atau sebaliknya. Sedangkan menurut Davis dalam Kadir (2003:28) mengungkapkan bahwa informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berati bagi penerimanya dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang.

Informasi merupakan sekumpulan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan berarti bagi yang menerimanya. Jika ditinjau dari sudut padangan dunia kepustakawanan dan perpustakaan informasi merupakan suatu rekaman fenomena yang diamati. Informasi dapat diartikan sebagai fenomena yang dapat dilihat dan berupa putusan-putusan yang dibuat seseorang. Sebuah fenomena akan menjadi sebuah informasi apabila jika ada yang melihatnya,

menyaksikannya dan merekamnya. Hasil dari kegiatan tersebut yang dimaksud dengan informasi yang bermakna sebuah berita Yusup (2009:11).

2. Fungsi Informasi

Secara umum fungsi dari informasi ialah membantu seseorang atau individu dalam mendapatkan pengetahuan dari apa yang di dapat melelaui adanya informasi. Setiap masyarakat atau individu membutuhkan informasi untuk mendukung kegiatan sehari-hari. Di lingkungan masyarakat informasi yang baik adalah informasi yang dapat memberikan manfaat yang dapat mendukung kegiatan yang ada di masyarakat.

Menurut Faisal (2008:27), fungsi dari suatu informasi tidak mengarahkan pada pengambilan keputusan untuk bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan, melainkan informasi tersebut dapat menjadi bahan bagi individu untuk mengambil keputusan untuk bertindak berdasarkan hasil yang telah dicapai. Konsep informasi menurut Buckland (1991) "menegaskan bahwa adanya keterkaitan antara pengetahuan dan teknologi informasi, konsep proses informasi dapat diartikan sebagai pertanyaan, presepsi, menerima, menjadi informasi, proses informasi, perwakilan dan menyediakan informasi".

3. Jenis-Jenis Informasi

Menurut Pawit (2009:15) jenis-jenis informasi dapat digunakan untuk meperrmudahkan arah dan pengelompokan, informasi tersebut sesuai dengan sifat dan karakteristik yang dimiliki. Masyarakat pada kenyataanya dapat bisa memudahkan baik dalam pemanfaatan dan pengolahan informasi yang diperoleh guna mencapai tujuan yang dinginkan dari masing-masing individu.

Pada saat ini informasi dapat diperoleh dari mana saja, kapan saja dan oleh siapa. Tetapi, dengan adanya perkembangan penyebaran informasi pada saat ini tidak telepas dari namanya kevalidan informasi tersebut. Sebuah informasi yang valid dapat memberikan suatu manfaat atau keuntungan bagi seorang individu, baik dalam bentuk pengetahuan maupun terapan di kehidupan. Menurut Pawit (2009:19), mengelompokan informasi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

a. Informasi Lisan

   Informasi lisan ini jika dihitung dalam jumlahnya banyak dan akan sulit untuk di ukur dan dibutuhkan pusat informasi seperti perpustakaan.

b. Informasi Terekam

   Informasi terekam dapat dibedakan antara ilmiah dan tidak ilmiah. Informasi ilmiah merupakan sebuah informasi yang terekam yang dirancang secara khusus dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan ilmiah. Sedangkan, informasi tidak ilmiah

adalah informasi yang dapat berubah menjadi luar biasa, apabila berhubungan dengan sebuah peristiwa besar dan bersejarah. Misalnya, berita informasi meninggalnya seseorang.

4. Manfaat Informasi

Informasi mempunyai peran yang sangat penting baik dalam jenisnya maupun manfaatnya untuk setiap individu, begitu pula dengan manfaat informasi bagi setiap orang beda-beda Menurut Sutanta dalam Setiawan (2015:2), mengungkapkan beberapa manfaat dari informasi yaitu:

a. Menambah pengetahuan

   Adanya sebuah informasi maka akan menambah pula pengetahuan bagi penerima yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan mendukung proses pengambilan keputusan;

b. Mengurangi ketidakpastian pemakai informasi

   Informasi akan mengurangi ketidakpastian karena apa yang akan terjadi dapat diketahui sebelumnya dan kemungkinan menghindari keraguan pada saat pengembilan keputusan;

c. Mengurangi risiko kegagalan

   Dengan adanya informasi akan mengurangi resiko kegagaan karena apa yang akan terjadi dapat di antisipasi dengan baik dan kemungkinan terjadinya kegagalan akan dapat dikurangi dengan pengambilan keputusan yang tepat;

d. Mengurangi keanekaragaman yang tidak diperlukan

   Mengurangi keanekaragaman yang tidak diperlukan, akan menghasilkan sebuah keputusan yang lebih terarah;

e. Memberikan standar, aturan-aturan, ukuran-ukuran, maupun keputusan-keputusan untuk menentukan pencapaian sasaran dan tujuan

5. Kualitas Informasi

Informasi adalah data yang sudah terorganisasi dan dikomunikasikan dan memilki nilai harga bagi pengguna. Informasi yang memiliki nilai harga bagi pengguna mempunyai syarat-syarat dalam kulitas informasi tersebut. Menurut Utomo (2009:16), mengungkapkan kualitas informasi ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Keakuratan dan teruji kebenaranya.

   Keakuratan yang teruji kebenaranya artinya informasi tersebut terbebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan. Kesalahan-kesalahan itu dapat berupa mengubah dam merusak informasi tersebut;

b. Kesempurnaan informasi

   Dalam mendukung faktor diatas maka kesempurnaan informasi dapat menjadi faktor penting, dimana informasi yang disajikan

harus lengkap tanpa adanya pengurangan, penambahan maupun pengubahan;

c. Tepat waktu

Informasi harus disajikan secara tepat waktu, karena mengingat informasi akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Jika terjadi keterlambatan sebuah informasi akan mengakibatkan kekeliruan dalam pengambilan keputusan;

d. Relevansi

Relevansi dalam artian sebuah informasi akan memilki nilai manfaat yang sangat tingi jika informasi tersebut dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Dan informasi tersebut akan menjadi tidak berguna apabila diberikan kepada mereka yang tidak membutuhkan;

e. Mahal

Cara memproleh informasi pada saat ini juga menjadi bahan pertimbangan tersendiri, karena cara dan biaya untuk mempoleh informasi sulit dan mahal. Oleh karena itu, seorang individu tidak berniat untuk memperoleh dan mencari alternatif subtitusinya. Biaya maha yang dimaksud adalah pada saat bobot informasi yang ada tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan.

C. Konsep Misinformasi

1. Pengertian Misinformasi

Secara umum pengertian misinfomasi adalah sebuah informasi yang disebarkan oleh seseorang dan diterima seseorang, namun orang yang menerima informasi tersebut tidak mengetahui kebenanran dari informasi tersebut salah. Dalam menyebarkan informasi tersebut sebenarnya pelaku tidak mengetahui sama sekaliu mengenai kesalahan tersebut. Pelaku yang melakukan penyebaran beranggapan bahwa apa yang ia yang informasikan adalah benar.

Pada dasarnya misinformasi merupakan bagian dari hoax yang terbentuk. Hoax sendiri merupakan pontongan informasi yang terlihat seperti faktual namun, aslinya informasi tersebut tidak benar. Bahaya terbesar yang dapat timbul dimasyarakat dengan adanya hoax adalah terjadinya konflik antar masyarakat.

Konflik antar masyarakat akan menjadi bahaya terbesar karena dengan adanya penyebaran *hoax* dimasyarakat maka akan membuktikan masyarakat tersebut masih rendah dalam dunia literasi. Oleh karena itu, masyarakat dapat membangun semangat literasi yang kuat agar dapat menangkal berita-berita dan bahaya yang dapat ditimbulkan dengana adanya *hoax*.

Misinformasi dan disinformasi merupakan pola komunikasi propaganda *hoax* yang selama ini ada dimasyarakat. Misinformasi maupun disinformasi, Propaganda *hoax* menurut Lasswell (1927: 187)

"merupakan suatu kegiatan yang semata-mata hanya untuk mengendalikan melalui sebuah simbol, dan membicarakan suatu hal yang keakuratanya tidak terjamin melalui cerita, laporan, gambar, rumor maupun dalam betuk tulisan yang tersebar dalam bentuk komunikasi".

Propaganda menurut (Laswell, Harlord D, apapun yang berbentuk mengajak dapat disebut dengan propaganda. Namun, tergantung dengan dan cara-cara yang digunakan dalam mengajak kegiatan tersebut. Umumnya, ada dua sifat propaganda yaitu *white propaganda* yang merupakan propaganda dengan cara yang baik dan *black propaganda* yaitu propaganda dengan cara yang buruk, yang terkadang menggunakan cara-cara yang tidak jujur dan buruk dalam pelaksanaanya.

Propaganda mempunyai berbagai jenis bentuk kegiatan, adapun bentuk kegiatannya yaitu:

a. Propaganda dangang iklan, peragaan, pertunjukan, presentasi, pameran, pawai
b. Propaganda politik yang meliputi penyebaran doktrin dan penyebaran keyakinan politik tertentu
c. Propaganda perang yang dapat merusak nama baik negara atau pemerintahan
d. Propaganda budaya yang dilakukan dengan bentuk kegiatan pameran seni dan budaya
e. Propaganda agama yang meliputi penyebaran keyakinan atau ajaran agama

Misinformasi yang termasuk dalam salah satu bentuk pola komunikasi propaganda *hoax* yang ada di masyarakat, maka bentuk-bentuk propanda diatas dapat kita jumpai disetiap saat seriring berjalannya waktu. Bentuk propaganda yang banyak ditemui dimasyarakat perdesaan adalah propaganda iklan dan propaganda doktrin.

Propaganda iklan sendiri didalam masyarakat desa mempunyai peran presentasi yang dilakukan oleh bebagai macam instansi pemerintahan guna melakukan sebuah program yang akan memberikan dampak positif bagi masyarakat tersebut. Propaganda iklan dengan presentasi yang dilakukan oleh berbagai instasi pemerintah merupakan termasuk sifat *white propaganda* yang artinya memberikan dengan cara yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

2. Faktor-faktor Isu Misinformasi

Menurut Loftus (2010:720), faktor yang mempengaruh terjadinya kesalahan sebuah informasi adalah konten kejadian yang pada awalnya mengalami distorsi. Distorsi sendiri disebabkan oleh imajinasi yang dimilki seseorang. Imajinasi merupakan kegiatan visualisasi pada suatu fakta dengan manipulasi tertentu, sehingga pada saat seseorang diminta untuk memutar kembali informasi sebuah kejadian yang dialaminya, maka seseorang tersebut seolah-

olah akan menjadi orang yang sedang atau melakukan kejadian secara keseluruhan dengan menggabungkan beberapa fakta yang di ingat.

Menurut (Saunders, 2012) mengungkapkan bahwa seseorang yang mengalami misinformasi disebabkan oleh kurang adanya kekuatan dalam melakukan reorganisasi, konfigurasi dan susuanan informasi pada seseorang. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya kurangnya kekuatan tersebut adalah hilangnya bagian-bagian informasi tertentu dalam ingatan (*memory*) seseorang yang dapat menyebabkan terjadinya *false memory* pada seseorang. Hal itulah yang menjadi dasar bahwa informasi yang diterima bukanlah sesuatu informasi yang utuh, melainkan informasi tersebut baru dan berbeda dari informasi yang diperoleh sebelumya yang dialami oleh seseorang. Faktor yang dapat mempengaruhi misinformasi yaitu:

a. Waktu (*Time*)

   Waktu dapat berperan penting dalam mempengaruhi adanya faktor misinformasi. Waktu dalam misinformasi dapat didefinisikan sebagai hal yang tidak akan terlepas dari namanya ingatan seseorang. Waktu berperan didalam ingatan seseorang untuk dapat memikirkan hal-hal yang telah terjadi pada seseorang.

b. Berdiskusi (*Discussing the event with other witnesse)*

   Tujuan dari berdiskusi diatas adalah adanya saksi atau seorang individu yang saling melihat peristiwa atau *event* yang menjadikan sebuah bahan informasi. Dengan adanya pihak-pihak

yang melihat atau mengerti informasi tersebut, maka akan muncul sebuah diskusi yang akan membahas hal tersebut untuk menjadi sebuah informasi yang benar dan tidak mengacu pada pembenaran maupun kesalahan dari informasi tersebut.

c. *New report*

New report dapat diartikan sebagai sebuah laporan baru yang akan memicu terjadi kesalahpahaman pada informasi. *New report* memiliki *effort* untuk memberikan sebuah informasi yang benar, tetapi new report dapat menjadi alasan mengapa terjadi sebuah misinformasi didalam memberikan suatu informasi.

d. *Repeated exposure to misinformation*

Pengulanan mengeskporsur misinformasi mempunyai maksud adalah jika sebuah informasi yang salah mengalami pengulangan terus menerus, maka akan membentuk sebuah siklus pengulangan yang akan terjadi terus menerus tanpa ada yang mengetahui informasi tersebut benar atau tidak.

Kajian pustaa mengenai misinformasi yang diangkat pada judul skripsi ini merupakan tahapan-tahapan analisis (*discourse*) data yang berdasarkan isu misnformasi yang berpengaruh yaitu waktu (*time*) dan berdiskusi (*discussing the event with other witnesse).* Waktu berhubungan dengan bagaimana peranan pemerintah khsusnya tindakan Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tanah Grogot dalam melakukan pemberdayaan yang sama rata sehingga tidak ada terjadi rentang waktu yang akan menyebabkan beberapa kegiatan lintas sektor yang sudah berjalan dapat berkelanjutan (*sustainable)*.

Teori diusung oleh (Fisher & Ardelez, 2005) tentang bagaimana mengetahui difusi informasi yang terjadi dan peneliti kaitakan pada setiap Kampung KB yang peneliti teliti sehingga dapat disimpulkan terjadi sebuah tindak kesalahan informasi (*Misinformation*) yang terjadi pada proses pemberdayaan masyarakat melalui program Kampung KB yang ada di Kabupaten Paser yang berhubungan waktu (*time*) dan berdiskusi (*discussing the event with other)* dalam penelitian ini.

Gambar. 1 Model Difusi Informasi dan Misnformasi

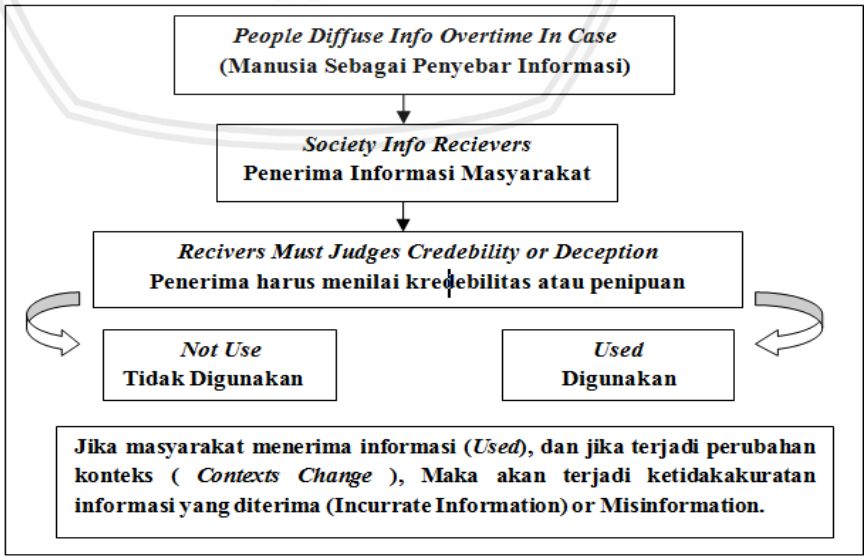

(Sumber: Fisher& Erdelez, 2005)

D. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya disadari dengan adanya sebuah cita-cita, bahwa masyarakat bisa dan harus mengambil tanggung jawab dalam meneruskan berbagai kebutuhan, kesehjateraan, menggunakan sumber daya dan mewujudkan tujuan hidup masing-masing. Peran pemberdayaan masyarakat dalam struktur kehidupan masyarakat didasarkan pada pengembangan dan pembagian sumber daya secara adil serta adanya interaksi sosial maupun upaya saling membantu antara satu dengan yang lain dalam kehidupan.

Priyanka dan Pranarka (1996), mengemukakan bahwa memberdayakan masyarakat memiliki dua makna penting, pertama, yaitu pemberdayaan masyarakat merupakan mengembangkan, memandirikan, serta menswadayakan dan memperkuat sisi dilapisan bawah masyarakat tehadap segala penekan dibidang dan sektor kehidupan. Kedua, melindungi dan membela dengan berpihak pada yang lemah dan untuk mencegah terjadinya pesaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi yang lemah. Oleh sebab itu, perlu adanya peran pemerintah melalui aktor-aktor yang terlibat agar bertanggung jawab serta mampu manaungi masyarakat dengan seimbang.

Ada beberapa tujuan utama pemberdayaan desa menurut Raharjo (2006:112) yaitu pemberdayaan masyarakat desa dapat dilakukan dengan startegi kebijaksanaan mengembangkan keswadayaan,

kemandirian masyarakat, koordinasi antar pemerintah melalui dinas-dinas terkait, pembentukan lembaga keswadayaan, keterlibatan masyarakat dan adanya bantuan tenaga pendamping.

Menurut Suharto dalam Mardikanto dan Soebianto (2013), menungkapkan bahwa terdapat 5 (lima) aspek penting yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu sebagai berikut:

a. Motivasi

   Motivasi dapat membangun usaha dan keinginan masyarakat untuk hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu, setiap individu harus mampu memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan melalui pemahaman akan haknya sebagai anggota didalam masyarakat.

b. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan

   Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai dengan malalui cara pendidikan dan perbaikan kesehatan. Sedangkan, keterampian vokasional dapat dikembangkan melalui pelatihan partisipatif pada masyarakat.

c. Manajemen diri

   Manajemen diri dapat diartikan bahwa setiap anggota harus mampu mengatur dirinya sendiri kehidupannya dalam masyarakat. Termasuk dalam hal, memilih pemimpin, melakukan pencatatan dan pelaporan, mengadakan pertemuan, resulusi konflik, dan manajemen pemilikan masyarakat.

d. Mobilisasi sumber daya

Mobilisasi sumber daya masyarakat diperlukan dalam pengembangan metode-metode dan sumber pendanaan secara sukarela, dan menciptakan modal sosial yang berasal dari tabungan regular yang diciptakan.

e. Pembangunan dan pengembangan jaringan

Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat juga harus selaras dengan adanya peningkatan kemampuan anggotanya daam membangun serta mempertahankan jaringan dnegan berbagai sistem disekitarnya. Dengan adanya jaringan ini maka penting untuk menyediakan dana guna mengembangkan berbagai akases terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan pemberdayaan masyarakat kurang mampu.

2. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Pada penyelenggaraan pemgembangan masyarakat terdapat nilai-nilai kunci dan prinsip yang menjadi kegiatan dasar. Prinsip pengembangan masyarakat pada dasarnya bersandar pada suatu pandangan bahwa masyarakat kurang beruntung mengendalikan hidupnya ketika lembaga sosial maupun struktur sosial berubah. Pengembangan masyarakat berlandaskan kerangka konseptual yang dikembangkan oleh berbagai macam teori yang ada. Secara garis besar, terdapat empat prinsip utama didalam pengembangan masyarakat yaitu:

a. Pengembangan masyarakat berdasarkan pada sebuah kepentingan dan menolak pada pandangan yang tidak memihak pada kepentingan tersebut.
b. Pengembangan masyarakat bertujuan utnuk mengubah struktur diskriminatif agar tehindar ataupun telibat dari konflik. Dalam penerapanya, perlu adanya upaya gerakan yang begerak dalam bidang sosial seperti asasi manusia maupun gerakan perdamaian guna dapat menghadirkan informasi-informasi yang relevan.
c. Membebaskan, membuka serta menciptakan demokrasi patrisipatori adalah dalam prinsip pengembangan masyarakat selanjutnya. Dalam pengembangan masyarakat ini melakukan penentangan dan penuntutan terhadap bentuk segala kekuasaan, pembudakan serta penindasan yang terjadi.

3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat diperlakukan perumusan sebuah strategi guna mengatasi hambatan dalam upaya memberdayakan masyarakat. Menurut Prasodjo (2004:11), terdapat beberapa masalah yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat, yakni:

a. Diskontinuitas dan diskoordinasi

Diskontinuitas dan diskoordinasi merupakan sebuah keadaan yang dimana keseluruhan program pemberdayaan masyarakat tidak terkoordinasi dengan baik dan dilakukan secara sporadis. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seringkali, bersebrangan dengan pendampingan yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM).

b. Disinformasi dalam program

Disinformasi dalam program merupakan sebuah keadaan dimana pemberdayaan masyarakat yang dijalakan pemerintah dengan pihak lainnya sepertu konsultan tidak dipahami oleh masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan. Hal yang menjadi dasar adanya ketidak pahaman adaah dikarenakan bahasa yang digunakan oleh para aktor tidak dapat dipahami oleh masyarakat tersebut.

c. Diorientasi

Pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan sebuah proses yang dimana pada pendekatan ini memerlukan waktu yang cukup lama. Hal tersebut terjadi, karena banyak timbul masalah-masalah baru dan hasil yang belum nyata membuat pemerintah dan LSM yang berperan sebagai fasilitator dapat mengubah kebijakan tersebut kearah yang lebih tepat dan nyata.

d. Generalisasi

Generalisasi merupakan sebuah keadaan yang heterogen yang meliputi sosial, budaya, dan politik di Indonesia. Dengan adanya upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan yang bersifat dinamis dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

e. Rentang birokrasi dan tingginya biaya operasional

Dalam rentang birokrasi yang meliputi peraturan hukum maupun Undang-Undang dasar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat masih terlihat kaku, dan masih didasarkan pada surat keputusan, petunjuk teknis, pentunjuk pelaksanaan maupun sistem penganggaran yang dapat menghambat proses pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, akan terjadi tidak tercapainya tujuan dari pemberdayaan masyarakat yang baik.

f. Indikator yang tidak tepat

Adanya indikator yang tidak tepat disebabkan karena adanya tolak ukur pemberdayaan yang hanya di ukur dalam bentuk fisik. Dan nilai-nilai material yang terdapat didalamnya mengesampingkan nilai nonmateri dan komoditas yang berorientasi pada input dan kualitatif. Seperti: aspek nilai, umum maupun partisipasi masyarakat

Menurut Prasojo dalam Suryono dan Nugro (2008), mengungkapkan bahwa terdapat 4 (empat) strategi dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu:

a. Memberdayakan masyarakat dengan konsep "mensosialisasikan" peran masyarakat sebagai subjek.
b. Mendayagunakan mekanisme dalam penyelenggaraan pembangunan atau pemberdayaan masyarakat secara lebih aspiratif, demokratis, efektif serta efesien
c. Mobilisasi sumber daya manusia yang dapat meliputi tenaga, pikiran dan kemampuan seseorang sesuai dengan profesionalitas yang dimiliki.
d. Memaksimalkan peran pemerintah dalam menfasilitasi dan mengatur agar, penyelenggaran pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan lancar.

Dengan adanya pendekatan-pendekatan dalam strategi pemberdayaan masyarakat maka harus didukung dengan sinergritas antara pemerintah dan masyarakat dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirancang pemerintah. Selain itu, pada setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan sebuah program maka, membutuhkan stategi pemberdayaan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada pada tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, strategi mengenai pemberdayaan masyarakat dibutuhkan dalam penelitian ini sebagai tinjauan pustaka.

4. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat desa menurut Eddy dalam Zubaedi (2013:24) merupakan suatu upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang semula dalam kondisi miskin menjadi masyarakat yang dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami. Sehingga upaya pemberdayaan adalah untuk membangun kemampuan masyarakat dengan cara-cara yang dikehendaki seperti memberi mootivasi masyarakat, mendorong masyarakat untuk maju dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan mengembangkan potensi tersebut menjadi tindakan-tindakan nyata yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat tersebut.

Konsep pemberdayaan sendiri memilki hubungan yang erat antara dua pokok bahasan yaitu konsep kekuatan (power), dan konsep ketimpangan (disadvantaged). Konsep prespektif pemberdayaan masyarakat dapat dijelaskan menggunakan empat prespektif yaitu sebagai berikut:

a. Prespektif Pluralis

Konsep pemberdayaan ini ditinjau dari suatu proses untuk menolong seorang individu atau kelompok-kelompok tertentu, yang dapat dikatakan kurang beruntung untuk bersaing dengan kepentingan yang lain-lain. adapun upaya pemberdayaan yang dilakukan dengan konsep ini adalah dengan membantu seorang individu dengan cara melakukan

pembelajaran atau menggunakan keahlian menggunakan media sebagai wadah berhubungan dengan tindakan-tindakan dalam segala aspek. Konsep pemberdayaan ini menekan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kapasitas masyarakat yang dapat bersaing dengan wajar, sehingga tidak ada yang merasa menang maupun merasa kalah.

b. Prespektif Elitis

Konsep pemberdayaan masyarakat elitis merupakan pemberdayaan masyarakat yang dapat ditinjau dari suatu upaya untuk bergabung dan dapat mempengaruhi kalangan elite (menengah keatas), dengan tujuan membantuk aliansi dengan kalangan tersebut dan melakukan konfrontasi. Bentuk upaya dengan konsep elite ini dilakukan karena adanya power yang dimilkiki kalangan elite sehingga adanya sebuah kontrol yang kuat baik dalam kebijakan publik, pendidikan, media, dan birokrasi yang menjadikan masyarakat tak berdaya.

c. Prespektif Strukturalis

Pada prespektif ini pemberdayaan ditinjau dari suatu agenda perjuangan yang menantang, karena tujuan dari pemberdayaan ini dapat tercapai apabila bentuk ketimpangan pada struktural dapat dieleminasi. Prespektif ini umumnya, menjadi tidak berdaya dimasyarakat karena adanya struktur sosial yang lebih mendominasi seperti kelas sosial, ras, gender maupun etnik yang dimiiki seorang individu. Oleh karena itu, tujuan utama dari prespektif ini dalam

pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang dilakukan untuk menghilangkankan penindasan struktural pada lapisan masyarakat.

d. Prespektif Post-strukturalis

Prespektif post-strukturalis dapat ditinjau sebagai sebuah proses yang menantang dan mengubah diskursus yang terdapat pada masyarakat. Prepektif ini melakuakn pemberdayaan sebagai sebuah upaya yang dapat mengembangkan pemahaman maupun pemikiran masyarakat terhadap pemikiran baru dan analitis.

5. Prinsip – prinsip Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan desa merupakan salah satu fokus yang mandapat perhatian pemerintah sejak kemerdekaan indonesia. Dalam pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dikenal dengan nama Rencana Kesehjateraan (kasimo welfare plan, 1952) di awal kemerdekaan indonesia. Konsep prinsip pemberdayaan masyarakat desa menurut Raharjo (2006:19) yaitu:

a. Keterbukaan *(transparasi*)

Prinsip keterbukaan atau transparasi terhadap pemberdayaan masyarakat desa akan berhasil apabila adanya sikap keterbukaan antar lapisan yang terkait. Sebagai contoh, adanya keterbukaan antara aparatur daerah yang diwakili dinas-dinas terkait dalam membangun sebuah program untuk desa tertentu. Tentu perlu

adanya keterbukaan antara dinas terkait dengan program yang dilaksankan untuk masyarakat.

b. Partisipatif

Pemberdayaan desa partisifatif merupakan sebuah gerakan masyarakat yang didukung oleh pemerintah yang bertujuan untuk memajukan desa tersebut.

c. Dapat dinikmati masyarakat

Dapat dirasakan atau dinikmati oleh masyarakat mempunyai tujuan agar masyarakat tersebut mau untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang akan mengalami suatu perubahan kearah yang positif.

d. Dapat dipertanggung jawab *(akuntabilitas*)

Segala sesuatu yang berupa kegiatan-kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan pada daerah ataupun lapisan masyarakat yang turut serta dalam pembangunan tersebut

e. Berkelanjutan (*sustainable)*

Prinsip pemberdayaan masyarakat desa berkelanjutan mempunyai tujuan agar segala bentuk pemberdayaan yang ada di dalam masyarakat akan terus berkembang dan memberikan manfaat kepada masyarakat setempat.

E. Konsep Kampung KB

1. Defnisi Kampung KB

Pembentukan nama kampung keluarga (KB) pada awalnya bukan terlahir karena sebuha ide namun, merupakan bentukan atau program secara khusus terbentuk karena sebutan masyarakat kepada kampung genereh,Kecamatan Sumedang, Jawa Barat pada tahun 1972. Kampung genereh pada saat itu telah menjadi pusat kegiatan KB guna memenuhi kebutuhan masyarakat tentang alat kontrasepsi pil. Pada saat itu pula banyak masyarakat yang berdatangan untuk mengambil pil yang sudah menjadi satu wadah yang dikelola oleh Akseptor. Karena banyaknya masyarakat yang sering berknjung ke kampung genereh maka sejak itulah kampung genereh dikenal sebagai kampung KB.

Kampung keluarga berencana (KB) merupakan sebuah upaya yang diusung pemerintah baik dalam satuan wilayah tingkat Rw, Dusun atau setara dengan yang memiliki kriteria tertentu mempunyai perencanaan pelaksanaa, perencanaan dalam tata kehidupan untuk membangun kebersamaan. Kampung KB merupakan sebuah program yang secara sistematik di integrasikan dengan sektor-sektor lain khsusunya, dalam melaksanakan fungsi-fungsi keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga yang sejahtera dan terbebas dari kebodohan, kemiskinan maupun keterbelakangan. Tujuan utama dengan pemberdayaan Kampung Keluarga Berencana (KB) adalah meningkatkan kualitas

hidup keluarga dan masyarakat melalui (KKBPK) yang terintegrasi dengan sektor pembangunan lainnya.

Secara umum kampung kelurga berencana (KB) mempunyai tiga hakikat dalam pembentukannya yaitu:

a. Kampung yang akan menjadi Ikon KB sebagai media yang membantu kampanye penyebaran melalui program-program yang telah dirancang pemerintah sebagai salah satu bentuk tindakan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat setempat.
b. Pembinaan secara langsung bagi masyarakat agar dapat membantu masyarakat yang hendak melakukan penurunan kelahiran dengan keikutsertaan pada program Kampung KB pada setiap daerah yang bersangkutan.
c. Pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pendekatan pelayanan masyarakat secara langsung guna meningkatkan pengaruh bagi keikutsertaan masyarakat dalam program tersebut.

2. Tujuan Kampung KB

A. Tujuan Umum

Kampung KB mempunyai tujuan umum yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung/desa yang setara dengan adanya program kependudukan, keluarga berencana dan

pembangunan keluarga serta pembangunn pada sektor terkait dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berkualitas

B. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari Kampung KB sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran pemerintah daerah setempat maupun lembaga non-pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan masyarakat guna melakukan pemberdayaan masyarakat melalui program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga pada sektor terkait.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan masyarakat melalui tentang wawasan kependudukan
3. Meningkatkan jumlah peserta KB aktif yang modern
4. Meningkatkan ketahanan keluarga melalui program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Pusat informasi dan Konseling (PIK) Remaja
5. Menurunkan angka kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga (KDRT)
6. Meningkatkan sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat dengan adanya Kampung KB
7. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setempat
8. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan adanya program-program pemerintah

9. Meningkatkan sanitasi dan lingkungan kampung yang sehat dan bersih
10. Meningkatkan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat guna jaminan yang berkualitas dan dapat memberikan kemudahan bagi berlangsungnya kehidupan.

3. Sasaran Kampung KB

Sasaran Kampung Keluarga Berencana (KB) terdapat dua sasaran utama yaitu sasaran langsung dan sasaran tidak langsung, adapun penjelasan sebagai berikut:

a. Sasaran langsung

1. Keluarga

   Keluarga-keluarga yang ada di lingkup kampung KB tersebut yang meliputi bapak-bapak dan ibu-ibu yang berpartisipasi dalam program Kampung KB yang dibentuk pada desa yang telah di rancang.

2. Pasangan Usia Subur

   Pasangan yang memilki usia subur yang ingin melakukan penurunan angka kelahiran. Pasangan usia subur adalah wanita yang berusia mulai 15 tahun sampai 49 tahun, baik yang berstatus kawin maupun belum kawin.

3. Masyarakat

Mayarakat yang berada pada daerah yang terdapat program kampung KB yang dapat meliputi bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, lansia dan balita

4. Balita, Remaja dan Lansia

b. Sasaran Tidak Langsung

1. Tokoh-tokoh masyarakat

   Tokoh masyarakat yang berpartsipasi adalah seperti pemuka agama yang tinggal pada daerah tersebut. Dan juga orang yang dianggap dapat memberikan pengaruh besar dalam berjalannya sebuah program yang pelaksanaanya pada desa tersebut.

2. Organisasi Masyarakat

   Organiasi masyarakat dapat membantu pelaksanaan dan berjalannya sebuah program yang ada dimasyarakat berupa organisasi gerakan yang dibangun dan beranggotan masyarakat setempat.

3. Petugas Lapangan dan Provider

   Petugas lapangan atau penyuluh dapat berperan dalam mempengaruhi sasaran Kampung KB agar tertarik untuk mengikuti dan membangun masyarakat lainnya untuk terlibat dalam program tersebut.

4. Prinsip Kampung Berencana (KB)

Dalam penyelenggaraan Kampung Berencana (KB) terdapat beberapa prinsip yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakannya yaitu:

a. Kampung Berencana (KB) merupakan sebuah istilah yang baku dan tidak diganti dengan istilah lain-lainnya;
b. Membantu membina dan meningkatkan kesetaraan ber-KB kepada masyarakat yang membutuhkan;
c. Penyelenggaran Kampung KB dibentuk untuk memantapkan 8 fungsi keluarga;
d. Pelayanan yang diberikan terintegrasi dengan program-program lintas sektor terkait;
e. Merupakan sebuah gerakan yang diprakarsai masyarakat bukan proyek pemerintah dan swasta;
f. Tidak ada unsur muatan politis didalam pelaksanaanya;

Dalam penyelenggaran kampung KB menurut Badan Kordinasi Keluarga Nasional (BKBN), terdapat beberapa fungsi yang ada didalam keluarga yang dapat diterapkan dengan adanya penyelenggaraan program Kampung KB yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi agama

Fungsi agama dalam keluarga memiliki arti selain adanya fungsi orang tua sebagai guru didalam keluarga, tidak hanya mendidik dalam

pendidikan dunia saja tetapi dapat mendidik anak dengan kepercayaan masing-masing.

b. Fungsi sosial budaya

Fungsi sosisal budaya dalam keluarga memiliki fungsi sebagai motivasi dalam perkembangan anak dan dapat menanamkan pola tingkah laku yang berhubungan dengan orang lain dalam bersosialisasi. Serta menanamkan rasa sosial budaya kepada seluruh anggota keluarga tentang bagaimana menerapkan didalam kehidupan sehari-hari.

c. Fungsi cinta dan kasih sayang

Fungsi cinta dan kasih sayang yang diberikan didalam keluarga dapat memberikan rasa aman dan tenang kepada seluruh anggota keluarga untuk selalu mencintai dan memberi kasih sayang kepada satu sama lain.

d. Fungsi perlindungan

Dalam sebuah keluraga fungsi perlindungan merupakan hal yang sangat penting dalam perkembangan anak. Keluarga dapat memberikan rasa aman, kasih sayang yang lebih dan perlindungan bagi anak. Oleh karena itu, keluarga merupakan tempat mengadu yang paling tepat ketika anak mengalami kesalahan-kesalahan.

e. Fungsi Reproduksi

Fungsi reproduksi didalam keluarga merupakan sarana manusia untuk menyalurkan hasrat seksual kepada manusia lain secara legal dan sah dimata hukum. Adapun tujuan reproduksi dalam keluarga adalah

individu tersebut dapat melangsungkan hidupnya karena dari sisi biologi akan mempunyai keturuan berupa anak dalam membangun sebuah keluarga.

f. Fungsi sosialisasi dan pendidikan

Fungsi sosialisasi dan pendidikan dalam keluarga berfungsi untuk mendidik anak mulai dari awal, sampai dengan pertumbuhan anak menuju dewasa. Selain itu, keluarga beperan penting terhadap bentuk kepribadian seorang anak, karena keluarga merupakan hal yang pertama anak temui sebelum terjun kedalam masyarakat untuk bersosialisasi.

g. Fungsi ekonomi

Fungsi ekonomi pada keluarga merupakan sarana yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup anggota keluarga. Karena fungsi ekonomi mampu membagi kerangka dalam keluarga, sebagai contoh ayah bertugas sebagai pencari nafkah keluarga sedangkan, ibu mengurus kebutuhan rumah tangga dan anak.

h. Fungsi lingkungan

Fungsi lingkungan pada keluarga merupakan suatu upaya bentuk tingkah laku yang dilakukan seseorang anggota keluarga awal mulanya dilakukan dalam keluarga. Dengan adanya pembentukan tingkah laku didalam keluarga maka merupakan sebuah cerminan apa ia dapat menerapkan pada lingkungan sekitar.

5. Indikator Keberhasilan Kampung KB

Dalam penyelenggaraan kampung KB setidaknya terdapat faktor utama yang menjadi dasar pembentukan kampung KB diantaranya sebagai berikut:

a. Adanya komitmen yang kuat dari pemangku kebijakan

Political will mempunyai arti bahwa adanya komitmen kepala daerah maupun kepala instansi terkait mengenai penyelenggaran kampung KB dengan sungguh-sungguh. Dengan adanya komitmen yang sungguh-sungguh agar dalam penyelenggaraan kampung KB ini dapat berjalan dnegan baik dan tentunya dengan dukungan angaran melalui pemerintah setempat.

b. Intergrasi program KKBPK dan intergrasi lintas sektor

Adanya interagsi program dengan integrasi lintas sektor lainnya mempunyai tujuan utama yaitu membantu masyarakat melawan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan yang dialami dengan adanya program ini. Oleh karena itu, lintas sektor memiliki peran yang penting dalam pembangunan dan melibatkan berbagai pihak seperti pihak swasta, provider dan kepentingan lainnya. Output yang dihasilkan oleh perpaduan antara intergrasi program KKBPK dengan lintas sektor lainnya adalah berupa sebuah layanan antar sektor yang dapat menjembatani kebutuhan masyarakat setempat seperti dengan adanya pelayanan KB gratis, pelayanan pembuatan

akta atau ktp, sampai dengan penyedian bahan bacaan berupa buku-buku pelajaran, buku-buku umum secara gratis dan dapat diakses oleh masyarakat sekitar.

c. Optimalisasi fasilitas dan dukungan mitra/stakeholder

Salah satu indikator keberhasilan dari penyelenggaran kampung KB dimasyarakat ialah meningkatkan peran pemerintah, lembaga non pemerintah, maupun swasta dalam memberikan fasilitas tambahan saat melakukan pembinaan dimasyarakat guna berperan aktif dalam program pembangunan yang ada dimasyarakat.

d. Semangat dan dedikasi pada pengelola

Indikator keberhasilan dari terlaksananya kampung KB ialah adanya dukungan, semangat serta dedikasi dalam mengelola didalam masyarakat. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak maka diharapkan kepedulian dan peran serta masyarakat dapat saling membantu dalam penyelenggaraanya.

e. Partisifatif aktif masyarakat

Peningkatan peran aktif masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang secara aktif berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat desa. Dalam peningkatan partisipasi aktif dimasyarakat dapat melibatkan tokoh masyarakat setempat, tokoh agama maupun tokoh adat yang ada didalam masyarakat.

F. Analisis Wacana (*Discourse analysis*)

Analisis wacana (*discourse analysis*) merupakan sebuah proses pendekatan interaktif dalam ilmu politik tentang bagaimana ide-ide seseorang dapat menjadi sebuah pengambilan keputusan bagi sebuah kebijakan baru. Pengambilan keputusan bagi sebuah kebijakan dalam analisis wacana, pertama adalah dapat mengidentifikasi ide-ide dari segi tingkat kebijakan umum, sebuah program, filsafat, kognitif dan normatif. Kedua, mengeidentifikasi analisis wacana tidak hanya sebagai representasi dari setiap ide-ide yang ada, tetapi juga sebagai proses interaktif antara pertukaran ide-ide kalangan pemangku kebijakan (*coordinative*) dan aktor-aktor politik dan masyarakat (*communicative*).

Metode dalam menggunakan analisis wancana (*discourse analysis*) yaitu pertama, sebagai *The Nature of Ideas* yang artinya adanya keterlibatan ilmuwan politik dalam tingkatan pertama yaitu kebijakan khusus atau solusi kebijakan dan untuk tingkat kedua meliputi program-program umum apa saja yang mendukung ide-ide kebijakan tersebut. Berdasarkan tingkatan tersebut dapat mencerminkan sebuah paradigma yang mendasari atau mengorganisir segala bentuk orientasi bagi sebuah kebijakan baru.

Metode kedua ialah dengan *The Dynamic of Discourse* merupakan sebuah konsep yang lebih fleksibel dan menyeluruh daripada ide-ide yang ada artinya ide-ide yang ada dapat diwakili dalam berbagai bidang. Menurut (Schmidth, Vivien A, 2008) aspek interaktif dari wacana sangat

penting dalam membuat ide-ide yang dinamis, dapat menyakinkan orang lain dan cendrung berkaitan dengan ruang publi dimana pemangku kebijakan dapat terlibat satu sama lain dalam "*coordinative*" atau aktor politik yang melibatkan publik "*communicative*" dalam pengambilan keputusan kebijakan.

Coordinative Discourse merupakan kesepakatan kebijakan yang disepakati berdasarkan pada ide-ide kebijakan mereka sendiri dan mengartikulasikan ide-ide masyarakat dengan diskrusif dan koalisi. Sedangkan *communicative discourse* merupakan komunikasi politik yang melibatkan musyawarah, presentasi dari pemangku ide kepada masyarakat umum. Dalam pengambilan kebijakan *coodinative discourse* dikatakan sebagai debat tertutup dari padangan publik karena pandangan publik dengan kebijakan tersebut tidak akan disetujui oleh masyarakat.

Representasi konteks ebuah ide dapat memberikan sebuah wacana bagi keberhasilan maupun kegagalan dari substantif sebuah kebijakan. Kesuksesan dalam sebuah ide wacana mencakup yaitu banyak hal yang sama dalam membuat ide tersebut, relevansi dengan sebuah masalah yang ada, kecukupan, penerapan yang tepat dan sesuai dan resonasi. Konteks wacana berhasil ketika *speaker* dapat mengatasi segala masukan atau komentar dari masyarakat, memiliki waktu yang tepat *timing* dengan cara yang benar yaitu dengan cara meyakinkan dalam hal kognitif dan presuasif dalam hal normatif, sehingga dalam sebuah wacana muncul pendapat bahwa hal tesebut adalah benar dan berarti dalam pengambilan kebijakan.

repository.ub.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Secara umum metode penelitian ialah merupakan sebuah prosedur yang dilakukan seorang peneliti dalam kegiatan penelitian dengan memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah dalam pencapaian tujuan penelitian tersebut. Pendekatan penelitian dengan kualitatif pada awalnya merupakan landasan pemikiran yang diusung oleh max waber. Landasan berpikir tersebut berupa sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa suatu pokok penelitian bidang sosiologi bukan hanya pada gejala-gejala sosial yang ada tetapi, penelitian tersebut dapat berupa makna-makna yang terdapat dibalik tindakan-tindakan yang terjadi baik peorangan maupun kelompok yang dapat mendorong adanya gejala-gejala sosial yang terjadi.

Metode utama dalam jenis penenlitian yang diusung oleh max waber merupakan sebuah pemahaman (*verstehen),* bukan sebuah penjelasan (*erklaren*) yang artinya, dalam proses penelitian dapat memahami makna yang gejala-gejala sosial yang terjadi serta peran

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

pemahaman yang sempurna pada gejala-gejala sosial yang terjadi pada saat penelitian berlangsung menurut Suparlan dalam Gunawan (2014:34).

Pada penelitian mengenai upaya menghadapi fenomena misinformasi pada masyarakat desa ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut (Cresswell, 2009), penelitian kualitatif adalah sebuah eksplorasi dan pemahaman data secara lebih mendalam dan data tersebut dapat berkaitan dengan makna setiap ungkapan mengenai masalah penelitian, maupun masalah yang secara langsung diungkapkan oleh informan utama (*key information*) ketika penelitian itu berlangsung.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian fenomenologi deskriptif. Penelitian deskriptif ini merupakan termasuk jenis kualitatif yang meneliti dan menjelaskan sebuah gejala fenomena atau sesuatu yang menampakan. Studi fenomenologi pada dasarnya bertujuan untuk menggali kesadaran yang terdalam pada subjek penelitian yang dilakukan.

Fenomena dalam studi fenomenologi merupakan sebuah pengalaman atau peristiwa yang masuk kedalam subjek penelitian.Studi fenomenologi merupakan penelitian kualitatif yang berpakar pada sebuah filosofi dan psikologi dan mempunyai fokus pada manusia (sosiologi). Jenis penelitian fenomenologi deskriptif ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi paritsipan, wawancara mendalam (*in depth- interview*) dan dokumentasi (Pujileksono, 2015).

B. Fokus Penelitian

Sehubungan dengan penelitian upaya menghadapi misinformasi dalam pemberdayaan masyarakat melalui program Kampung KB pada masyarakat desa di Kabupaten Paser Kalimantan Timur, maka peneliti memberikan batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini kualitatif ini berupa fokus, berisi pokok masalah yang masih bersifat umum (Sugiyono, 2011:207). Adapun fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masalah-masalah yang timbul dengan adanya fenomena misinformasi*)* dalam penyelenggaraan pemberdayaan desa melalui program Kampung KB yaitu meliputi Diskontinutitas, Disorientasi, Waktu (*time*), dan Rentang Birokrasi
2. Peran-peran aktor yang berpengaruh dalam proses berlangsungnya penyelenggaraan pemberdayaan desa melalui program Kampung KB yaitu meliputi peran Kepala Dinas, Kepala Desa, Penyuluh Lapangan, Pengurus Kampung KB dan Lintas Sektor
3. Faktor pendukung dan penghambat dalam proses penyenlenggaran Kampung KB pada desa yang diteliti.

Sehingga dalam pelaksanaan program kampung keluarga berencana dapat berjalan dengan benar dan sesuai peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah tanpa terjadi kesalahpemahaman yang terjadi dimasyarakat dan dengan adanya program kampung keluarga berencana dapat membantu masyarakat desa menjadi lebih baik dalam hal

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi dan situs penelitian merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam memperoleh data penelitian. Lokasi dan situs ini berkaitan dengan tempat sumber data penelitian yang akan diperoleh. Pada penelitian ini lokasi penelitian adalah pada masyarakat desa yang dimana terdapat beberapa desa yang melakukan pengembangan kampung KB di Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur.

Situs penelitianya adalah pengurus atau masyarakat desa yang aktif dalam program Kampung KB pada empat desa yang terletak pada Kabupaten Paser Kota Tanah Grogot. Secara umum, lokasi dan situs tersebut peneliti memilih karena pada dasarnya fenomena-fenomena serta perlu adanya upaya dari baik dari masyarakat maupun dinas terkait, terhadap program pemerintah yang sedang berjalan khususnya, pada masyarakat desa akan memilki hubugan dengan judul yang sedang peneliti ambil. Secara jelasnya, alasan peneliti mengambil lokasi dan situs tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada umumnya masyarakat desa pada beberapa desa yang dibina oleh Dinas Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PKKBP3A) di Kota Tanah Grogot memilki beberapa program yang dilaksanakan untuk kesehjateraan masyarakat tersebut. Dinas PPKBP3A sendiri memiliki banyak program yang salah satunya adalah kampung KB (keluarga berencana). Oleh karena itu, dengan adanya progam dilaksanakan oleh Dinas PKKBP3A terdapat fenomena yang dapat dijadikan sebuah lokasi untuk penelitian.
2. Berlatar belakang dengan adanya fenomena-fenomena yang ada dimasyarakat desa dengan adanya pengembangan program (Kampung KB), maka isu fenomena yang ada dengan adanya program tersebut adalah Misinformasi. Adanya fenomena ini maka Dinas Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PKKBP3A), harus memiliki sebuah upaya yang dapat menjadi penyelesaian masalah pada fenomena misinformasi yang masih dada pada masyarakat desa tersebut. Sesuai dengan peraturan presiden mengenai pengembangan (Kampung KB) untuk masyarakat desa, maka dengan menyeluruh Dinas PPKBP3A Kota Tanah Grogot dapat menjadi penghubung masyarakat desa dalam mensehjaterakan taraf kehidupan yang telah diatur sesuai dengan peraturan presiden. Maka dari itu, Dinas PKKBP3A sebagai pelaksana

program Kampung KB dengan adanya fenomena misinformasi dapat menjadi sebuah situs penelitian bagi peneliti.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan salah satu aspek yang dapat mempengaruhi sebuah penelitian. Sumber penelitian ini menunjukan asal dan sumber data-data mengenai penelitian yang akan diperoleh peniliti. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Sumber Primer

   Sumber data primer atau data primer merupakan sumber-sumber yang paling dasar menjadi bukti atau saksi utama dari suatu permasalahan yang terjadi (Nasir, 2005:50). Sumber primer ini memberikan data secara langsung kepada peneliti yang biasanya diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara terhadap objek penelitiannya. Pada penelitian ini, peneliti gunakan adalah hasil wawancara dengan kepala dinas PKKBP3A, kepala sub bidang bagian program Kampung KB, kepada bidang program sebagai pelaksana program dan penanggung jawab, penyuluh program yang ada dilapangan dan masyarakat desa pada wilayah yang terdapat program kampung KB tersebut.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder atau data sekunder merupakan sebuah data yang tidak memberikan data secara langsung kepada peneliti. Sumber sekunder ini biasanya hanya memberikan data dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain dengan mempunyai tujuan masing-masing. Oleh karena itu, sumber sekunder atau data sekunder hanya berfungsi sebagai data tambahan dan masih memerlukan proses seleksi lebih lanjut guna mendukung data-data yang ada (Nasution 2003:143). Sumber sekunder pada umumnya dapat berupa buku, artikel ilmiah, jurnal ilmiah, berita ilmiah, penemuan-penemuan ilmiah atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Pada penelitian ini, sumber sekunder yang peneliti gunakan antaralain adalah sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
b. Pedoman Pembentukan Kampung KB oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2007
c. Pentujuk Teknis Program Kampung KB oleh Dinas Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Tanah Grogot

d. Laporan Perkembangan Program Kampung KB Kota Tanah oleh Dinas Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Tanah Grogot

Sedangkan pada penelitian ini sumber primer yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

a. Ibu Dra. Hadijah Selaku Kepala Dinas Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PKKBP3A) Kota Tanah Grogot
b. Ibu Lisnawati S.E Selaku Kasubag Perencanaan Program Pada Dinas Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PKKBP3A) Kota Tanah Grogot
c. Bapak A. Rusdiansyah, S.Sos Selaku kepala bidang Kampung Berencana (KB) dan Penanggung Jawab Kegiatan
d. Vevi Kristina, SKM dan Linda Shintiana, SKM, MPH selaku penyuluh lapangan dari program Kampung KB.
e. Masyarakat desa yang mendapat pembinanan program Kampung KB yang meliputi pengurus tetap pada Kampung

KB yang terdapat penyelenggaran program kampung KB. Program kampung KB yang dikelola oleh Dinas PPKBP3A dan telah melakukan pengembangan mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2018 dan telah menghasilkan 21 Kampung KB di seluruh wilayah Kabupaten Paser. Terdapat beberapa daftar nama desa yang akan menjadi objek penelitian peneliti mengenai strategi misinformasi dalam pemberdayaan masyarakat melalui program Kampung KB.

Tabel 3. Daftar Nama Desa

NO.	Nama Desa	Kecamatan	Nama Kampung KB
1.	Pepara	Tanah Grogot	Sipakato
2.	Janju	Tanah Grogot	Harapan Taka
3.	Sangkuriman	Pasir Belengkong	Kembang Renteng
4.	X Pondong	Kuaro	Pesisir Indah

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019)

Dengan adanya daftar desa diatas, dapat diharapakan pengurus, masyarakat disekitar pelaksanaan program Kampung KB tersebut dapat menjadi objek penelitian. Dan juga dapat mengetahui dan memahami tentang program Kampung KB sebenarnya dengan adanya 8 pokok utama pelaksanannya bagi masyarakat. Pelaksanaan program Kampung KB dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk masyarakat penduduk asli tetapi bagi penduduk pendatang yang berada pada lokasi tempat program tersebut terlaksana.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu *Accidental Sampling*, dimana jika peneliti bertemu secara berlangsung tanpa sengaja dan memilih siapa saja yang dijumpai untuk menjadi sampe pada penelitian ini. Penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data yang merujuk dari pendapat Croswell (2014:267-270), tentang teknik pengumpulan data pada penelitain kualitatif yaiu sebagai berikut:

1. Observasi Partsipan

   Obeservasi partisipan menurut (Marshall & Rosman, 1999), mengungkapkan bahwa istilah observasi partisipan ialah sebuah penelitian yang dimana peneliti berpartisipasi langsung

dengan *setting* penelitian. Adapun keuntungan yang diperoleh peneliti dengan teknik observasi partisipan adalah dapat membantu peneliti guna memahami, mengalami sendiri tentang realitas / kenyataan yang terjadi dilapangan. Pada teknik penelitian ini, peneliti dituntut dua hal utama ketika melakukannya yaitu pertama, seorang peneliti mesti menyiapkan waktu yang cukup lama untuk melakukan penelitian dan berpartisipasi langsung dalam penelitian tersebut. Kedua, peneliti dituntut untuk merencanakan dengan benar-benar matang akan peran spesifik yang akan dilaksakan pada saat penelitian.

Adapun teknik tersebut dapat dinamakan sebagai *participant obsevation* dalam penelitian. Menurut (Patton, 2012: 262), tujuan penggunaan *participant observation* dalam penelitian akan membantu menjelaskan, mendeskripsikan, penelitian yang diamati dengan kegiatan-kegiatan yang terjadi. Dengan adanya kegiatan deskripsi tersebut peneliti dapat bersifat faktual dan akurat untuk dipahami baik oleh pembaca maupun peneliti sendiri.

2. Wawancara Mendalam (*in- depth interview*)

   Pada prinsipnya teknik wawancara merupakan suatu teknik yang dimana seorang peneliti bertatapan langsung dengan

informan pada saat penelitian berlangsung. Wawancara mendalam merupakan metode pengumpulan data yang sangat signfikan dalam memahami secara mendalam tentang presepsi yang berkembang pada masing-masing individu. Wawancara mendalam (*in-depth interview),* terdiri atas wawancara tidak terstruktur (*unstructured-interviews)* dan wawancara semi terstruktur (*semi-unstructured*). Didalam wawancara tidak terstruktur (*unstructured-interviews),* peneliti tidak menyiapkan pertanyaan-pertanyaan kepada infroman saat wawancara tetapi, peneliti hanya cukup menyediakan tema-tema umum yang sesuai dengan pemahaman informan. Sedangkan, wawancara semi terstruktur (*semi-unstructured*), ialah peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan penuntun guna dijadikan peduan wawancara kepada informan. Dari kedua cara wawancara mendalam tersebut, kedua model wawancara ini menggunakan pertanyaan terbuka pada awal wawancara kemudian, peneliti melanjutkan wawancara secara lebih mendalam dan spesifik terhadap informan. Menurut Mantja dalam Gunawan (2014:167) teknik wawancara mendalam mencakup dua proses dasar yaitu *rapport* yang merupakan proses mengembangkan hubungan baik dan mengejar perolehan informasi dalam wawancara. Rapport pada dasarnya adanya suatu hubungan yang terjalin

harmonis antara peneliti atau pewawancara dengan informan yang dituju. Mantja mengungkapkan bahwa kualitas hubungan akan seringkali akan menjadi lebih baik apabila dengan waktu serta situasi pengamatan yang beperan dalam proses berlangsungnya penelitian.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpuan data dengan teknik dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpuan data yang dapat digunakan dalam penelitian bidang sosial. Menurut Renier dalam Gunawan (2014:175-176) menjelaskan bahwa istilah dokumen dalam tiga pengertiaan yaitu, (1) arti luas, meliputi semua jenis sumber baik sumber tertulis maupun tidak tertulis. (2) arti sempit, meliputi semua sumber tertulis. (3) dalam arti spesifik, hanya meliputi surat-surat resmi dan surat kenegaraan seperti surat perjanjian, undang-undang, dan lain sebagainya.

Menurut Guba & Lincoln (2005) menjelaskan bahwa istilah dokumen yang berbeda dengan pengertian record. Pengertian record sendiri merupakan pertanyaan tertulis dan disusun oleh seseorang atau lembaga guna keperluan pengkajian suatu peristiwa. Sedangkan, pengertian dokumen merupakan pertanyaan atau bahan tertulis peneliti yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan penyedik saat melakukan penelitian.

Pada dasarnya, istilah dokumentasi hanyalah nama lain dari analisis sebuah tulisan atau analisis terhadap isi dari suatu dokumen.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan sebuah alat yang diperlukan dan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian. Secara umum instrumen penelitian terdiri dari instrumen utama dan instrumen pendukung. Dalam penelitin ini, peneliti memilih instrumen utamanya adalah peneliti yang melakukan penelitian. Sedangkan, untuk instrumen pendukung adalah kegiatan wawancara, catatan lapangan, recorder, dan kamera dokumentasi. Uraian imstrumen yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Peneliti

   Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang dimana peneliti beperan langsung dalam penelitian. Peneliti dapat berinteraksi langsung dengan informan pada daerah lokasi untuk mengenalisis permasalahan dalam penelitian ini.

2. Wawancara

   Wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan, dan dirancang untuk suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya

jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik (Setyadin, 2005:23). Wawancara pada penelitian kualitatif memiliki perbedaan dibandingkan dengan wawancara lainnya. Wawancara pada penelitian kualitatif pada umumnya, merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal kepada responden. Menurt Kartono dalam Gunawan (2014:160), wawancara merupakan sebuah percakapan yang diarahkan pada suatu masaah tertentu, dimana terjadi proses tanya jawab lisan dan diantara dua orang lebih berhadap-hadapan secara fisik. Dalam wawancara terdapat dua pihak dengan kedudukan yang berbeda yaitu pihak pertama, merupakan seorang interviewer yang disebut sebagai sebuah pena. Sedangkan, pihak kedua sebagai pemberi informasi (*information supplyer*).

3. Catatan Lapangan

   Catatan lapangan merupakan sebuah catatan tertulis yang dimilki peneliti yang berisi mengenai data-data di lapangan. Menurut Masruriyah (2010:11) Catatan lapangan merupakan sebuah catatan tertulis tentang apa yang dilihat, dibaca maupun didengar dalam rangka pengumpulan data pada saat melakukan penelitian kualitatif.

4. Alat Perekam Suara (*recorder*)

   Alat perekam suara (recorder) merupakan salah satu instrumen penelitian pendukung yang dapat membantu saat proses penelitian

berlangsung. Alat perekam suara biasanya digunakan peneliti pada saat melakukan sesi wawancara dalam kurun waktu yang cukup lama. Menurut Sukardi (2006:127), dalam melakukan penelitian dianjurkan untuk menggunakan recorder, karena mempunyai beberapa keunggulan diantaranya yaitu, (1) data yang didapat pada saat melakukan penelitian di lapangan dengan recorder merupakan data aktual yang benar berasal dari percakapan asli antara peneliti dengan responden atau infroman. (2) data yang didapat berupa percakapan responden/informan dapat direkam tanpa merusak setting alami yang ada saat penelitian. (3) kontribusi seorang peneliti dapat berupa pertanyaan-pertanyaan atau komentar mengenai suatu fenomena yang terjadi dapat direkam melalui recorder. (4) data yang diperoleh peneliti, dapat di analisis ulang pada saat sesudah peristiwa (wawancara berlangsun) maupun sesudah pada tahap refleksi kembali.

5. Kamera

Kamera manjadi salah satu instrumen penelitian pendukung pada saat melakukan penelitian. Kamera didalam biasanya digunakan sebagai alat untuk mengambil gambar atau mengabadikan suatu momen tertentu guna sebagai pendukung data pada saat penelitian. Menurut Sukardi (2006:117), pada penelitian yang terjung langsung kelapangan, sebagian besar peneliti membawa kamera sebagai salah satu perlengkapan pada saat melakukan penelitian. Kamera dalam

penelitian digunakan dengan tujuan utama yaitu agar peneliti dapat mendokumentasikan berbagai peristiwa yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

G. Teknik Analisis Data

Secara umum analisis data merupakan sebuah kegiatan yang wajib dilakukan oleh seorang peneliti sebelum memulai sebuah penelitian dilaksanakan. Menurut (Gunawan, 2014:209) mengungkapkan bahwa dalam analisis data ini terdapat kegiatan yang mengatur, mengumpulkan, mengurutkan, mengelompokan, memberi sebuah kode atau tanda dan dapat mengkategorikan data agar data penelitian yang didapatkan menjadi sebuah temuan berdasarkan fokus dan permasalahan yang ingin diselesaikan.

Analisis data kualitatif yang ditemukan dapat dengan mudah dipahami karena sudah dikelola dengan baik pada kegiatan ini. Menurut Bogdan dan Taylor (1975) mengungkapkan bahwa analisis data merupakan proses yang merinci sebuah usaha secara formal guna menemukan tema dan dapat merumuskan suatu hipotesis kerja, seperti yang disarankan oleh data sebagai salah satu usaha dalam memberikan bantuan pada tema penelitian yang dilakukan.

Dalam jenis penelitian fenomenologi deskriptif menurut Moustakas dalam Pujileksono (2015:68-69) menjelaskan teknik analis data fenomenolgi dari Van Kaam yaitu sebagai berikut:

1. *Listing and preliminary grouping*.

   Pada analisis ini peneliti akan mendaftar semua ekspresi yang relevan mengenai pengalaman yang peneliti dapatkan dilapangan. Kegiatan ini dapat berupa daftar jawaban partisipan subyek yang diteliti (*horizontalization*). Seperti memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai tanggapan belangsungnya program Kampung KB pada desa tersebut serta partispasi masyarakat dengan adanya Kampung KB sebagai salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat di Indonesia.

2. *Reduction and elemination*

   Pada tahap analisis data ini, peneliti dapat menguji setiap berupa sebuah ekspresi apakah ekspresi pada objek yang diteliti mengandung momen pengalaman penting dan juga mengandung usur pokok ruang cukup baik dalam sebuah penelitian.

3. *Clustering and thematizing the invariant constituent*

   Tahap analisis data ini adalah menarik benang merah atau penarikan kesimpulan dari jawaban semua subyek yang diteliti oleh peneliti. Dalam tahap ini peneliti dapat menarik sebuah keseimpulan yang akan

menjadi sebuah presepsi baru untuk memudahkan dalam proses pengolahan data menjadi sebuah tulisan dalam penelitian ini.

4. *Final identifiaction of invafriant constituents and themes by application: Validasi*.

   Pada tahap ini peneliti akan membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman subyek yang diteliti berkaitan dengan partisipan didalam keikutsertaan dalam program Kampung KB.

5. *Individual textural description*

   Pada tahap ini, peneliti melakukan penafsiran maksud dari interview ataupun catatan interview saat melakukan wawancara dilapangan mengenai program Kampung KB.

6. *Individual structural description*

   Tahap analisis ini berkaitan dengan penyusunan dari semua deskripsi yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian yang bersangkutan guna mendapatkan sebuah susunan pengalaman yang dari seorang individu dalam keikutsertaan maupun tidak kesertaan dalam program Kampung KB.

7. *Textural struktural description*

   Pada tahap ini, hasil dari pengambungan dua tahap diatas maka akan terbentuk sebuah *composite description*, yaitu sebuah makna atau esensi pengalaman yang didapatkan sehingga menampilkan sebuah gambaran pengalaman kelompok, ataupun satu kesatuan dalam

penelitian sebagai hasil dari perwujudan adanya program Kampung KB sebagai salah satu program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.

H. Keabsahan Data

Keabsahan data atau validasi data menjadi salah satu aspek penting dalam mempengaruhi hasil penelitian. Jika suatu data yang diperoleh peneliti itu terbukti validnya maka otomatis kesimpulan dari penelitian tersebut akan mendapatkan hasil yang valid. Sebaliknya, jika data yang diperoleh peneliti tersebut tidak valid maka otomatis dari penelitian tersebut tidak akan linear atau valid. Melihat dari dampak yang ditimbulkan maka aspek keabsahan data, dalam kebutuhan data menjadi meteode peneliti yang sangat penting utnuk diperhatikan dalam penelitian yang dilakukan.

Keabsahan dari data dapat diketahui melalui perpanjangan waktu dalam proses pengamatan, peningkatan ketekunan dalam melakukan penelitian dan dapat melakukan diskusi dengan teman sejawat, kasus negatif, serta tringulasi data (Sugiyono, 2014:270). Menurut Denzin dalam Gunawan (2014:219-221) membedakan empat macam triangulasi yaitu sebagai berikut:

1. Trianguasi Sumber

Tringuasi sumber merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk menggali kebenaran suatu informasi tertentu, melalui berbagai sumber perolehan data saat melakukan penelitian. Secara garis besar tringuasi sumber membandingkan serta melakukan pengecekan ulang terhadap informasi yang diperoleh melaui sumber-sumber yang berbeda.

Peneliti menggunakan tringulasi sumber dalam penelitian ini. Menurut peniliti triangulasi data sumber yang diakan digunakan dianggap sesuai dengan penelitian kualitatif di bidang ilmu perpustakaan dan informasi yang sedang peneliti lakukan karena mampu menguji keabsahan data dari berbagai sumber. Sumber data penelitian tesebut dapat diperoleh dari proses wawancara, observasi secara langsung/ partisipan, dan juga analisis dokumen mengenai upaya dalam mengahadapi misinformasi terhadap pemberdayaan kampung berencana (KB) pada masyarakat desa.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kabupaten Paser

Kabupaten Paser awalnya merupakan Kabupaten Pasir sebagai daerah otonomi Kalimantan Timur yang pengesahannya berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 1953 tentang penetapan UU Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan dengan sebutan Daerah Swantantra Tingkat II di Pasir.

Sebelum UU 27 Tahun 1959 ditetapkan daerah Pasir berbentuk kewedanaan yang berada dalam wilayah Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Berdasarkan keputusan Mentri Dalam Negeri yang dikeluarkan di Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1959 Nomor C-17/15/3 yang bersifat sementara dan penetapan Gubernur Kalimantan Timur tanggal 14 Agustus 1950 Nomor 186/OPB/92/14.

Lahirnya UU Nomor 27 Tahun 1959 tanggal 29 Desember 1959 memberikan momentum yang sangat penting yakni terlepasnya kewedanaan Batu Besar dari wilayah daerah swatantra Tingkat II Pasir dan dimasukan ke dalam wilayah Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Pada tanggal 3 Agustus 1963 Daerah Swantantra Tingkat II Pasir di masukan kedalam wilayah Kalimantan Timur. Pada tanggal 29 Desember 1961 dilaksanakanlah serah terima oleh Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I Kalimantan Timur, A.P.T Pranoto di Dapartemen Dalam Negeri, Jakarta.

Kemudian pada tanggal 13 Oktober 1987 terbit Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 1987, Kabupaten Pasir yang semula terdiri dari 9 Kecamatan menjadi 10 Kecamatan yaitu dengan masukny Kecamatan Balikpapan Sebrang dari wilayah Kotamadya Dati II Balikpapan kewilayahan Pasir dengan nama Kecamatan Penajam. Sebelum terjadi pemekaran wilayah, Kabupaten Pasir terdiri 12 Kecamatan. Namun sesuai dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur, dimana terdapat 4 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Babulu, Kecamatan Waru, Kecamatan Penajam dan Kecamatan Sepaku berpisah dari Kabupaten Pasir dan menjadi Kabupaten Paser Penajam Utara.

Pada tahun 2003 Kabupaten Pasir membentuk 2 (dua) wilayah kecamatan lagi sehingga kecamatan di Kabupaten Paser menjadi 10 Kecamatan. Kemudian pada tah un 2007, nama Kabupaten Pasir berubah menjadi Kabupaten Paser dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2007. Sementara Tanah Grogot yang menjadi tempat kedudukan ibu Kota Kabupaten Paser sejak tahun 1959, dalam perkembangannya terdapat aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya perubahan nama dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser. Pada tahun 2013 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013, nama ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser.

Pada saat ini Tana Paser Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur memiliki 10 Kecamatan yaitu Kecamatan Pasir Belengkong, Kecamatan Kuaro, Kecamatan Kerang (Batu Engau), Kecamatan Batu Kajang (Batu Sopang), Kecamatan Muser (Muara Samu), Kecamatan Long Ikis, Kecamatan Tanjung Aru (Tanjung Harapan), Kecamatan Long Kali, Kecamatan Muara Komam. Kabupaten Paser memiliki struktur geoglogi berumur antara metozoik, tartiar, dan kuartiar. Kabupaten Paser memilki 3 (tiga) buah sungai besar yaitu Sungai Pasir (221 km), Sungai Kandilo (191 km) dan Sungai Teluksari (169 km).

2 Sejarah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser

Gambar. 2 Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019)

Kabupaten Paser merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur dengan nama ibu kota Tana Paser. Kabupaten Paser terletak $0^{o}45'18,37"$-$2^{o}27"20,82"$ LS $115^{o}36'14,5"$-$166^{o}57^{o}35,03"$BT dengan luas 7.730,88 km^2 dan kepadatan penduduk mencapai 254.503 jiwa. Kabupaten Paser saat ini memiliki 13 dinas pemerintahan, salah satunya ialah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser atau disingkat (DPPKBP3A).

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser, pada awalnya hanya merupakan Kantor Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Paser Nomor 22 Tahun 2008, tentang organisasi dan tata kerja inspektorat, badan perencanaan daerah dan lembaga teknis daerah.

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Paser nomor 4 Tahun 2014 tentang organisasi, tata kerja badan perencanaan pembangunan daerah dan inspektorat, kantor Pengendalian Penduduk meningkat menjadi Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Badan PPKB. Dinas PPKB mendapat arahan langsung memalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Setelah dua tahun menjadi Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Oleh karena itu, terjadi perubahan nomenklatur pada Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PKKB), menjadi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser.

Pada saat ini Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser tidak hanya melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengendalian penduduk dan keluarga berencana, namun dapat juga memberikan pemberdayaan bagi perempuan dan perlindungan untuk anak. Selain itu juga, melakukan penyuluhan dan penggerakan ketahanan dan kesehjateraan keluarga melalui keluarga berencana sesuai dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 71 Tahun 2016 tentang rincian tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser.

3. Visi, Misi dan Tujuan

Adapun visi dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluraga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tanah Grogot sebagai berikut:

"*Terwujudnya Upaya Kesetaraan dan Keadilan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak serta Keluarga Berencana yang Optimal Menuju Keluarga Sejahtera dan Mandiri di Kabupaten Paser*"

Visi tersebut megandung beberapa makna sebagai berikut:

1. Kesetaraan dan Keadilan Gender

   Dalam hal ini antara laki-laki dan perempuan dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam hal akses sumber daya pembangunan, kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan maupun pengambilan keputusan serta control terhadap proses pembangunan desa setempat

2. Perlindungan Perempuan dan Anak

   Memiliki arti adanya penghapusan segala bentuk tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Serta dalam hal pemenuhan hak-hak anak dan kepentingan bagi masa depan anak dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dapat melindungi korban kekerasan rumah tangga serta memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

3. Keluarga Berencana

   Keluarga Berencana (KB) merupakan suatu program pemerintah yang dirancang untuk menyumbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk.

4. Keluarga Sejahtera dan Mandiri di Kabupaten Paser

   Keluarga sehjatera dan mandiri merupakan satu kehidupan berkeluarga yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik dalam segi sandang, pangan, maupun papan secara mandiri guna mencapai kesehjateraan dengan memperhatikan 3 (tiga) indikator utama yaitu pendidikan, ekonomi dan kesehatan dalam keluarga.

Misi

1. Meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender yang optimal
2. Meningkatkan kualitas dan kemampuan pelayanan serta perlindungan perempuan, anak dan hak-hak anak
3. Meningkatkan upaya penggerakan dan pelayanan keluarga berencana dan sejahtera
4. Meningkatkan tata kelola pelayanan perkantoran yang profesional, transfaran, akuntabel serta berorientasi pada pelayanan publik.

Tujuan

Menyelenggarakan pemberdayaan menyeluruh merata dan adil kepada seluruh lapisan masyarakat di Kota Tanah Grogot Kabupatn Paser dengan menggunakan metode sosialisasi sebagai bentuk kegiatan yang berfungsi meningkatkan peran penting masyarakat untuk membangun daerahnya menjadi lebih baik, Sehingga dapat membantu proses peningkatan potensi daerah masing-masing agar mudah memberikan jalan untuk setiap masyarakat untuk menuju kemakmuran bersama dan meningkatkan integritas bangsa Indonesia.

4. Lokasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser

Lokasi Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser beralamat pada Jalan. Akhmad Dahlan Tana Paser

Gambar 3. Lokasi Dinas

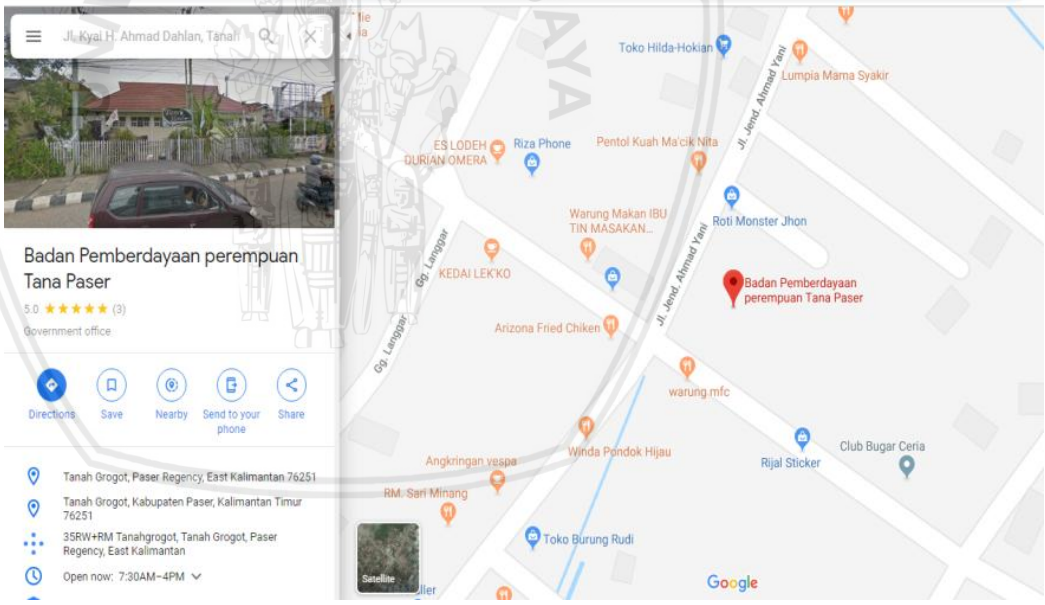

(Sumber: Google Maps, 2019)

5. Struktur Organisasi

Gambar 4 . Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berecana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser

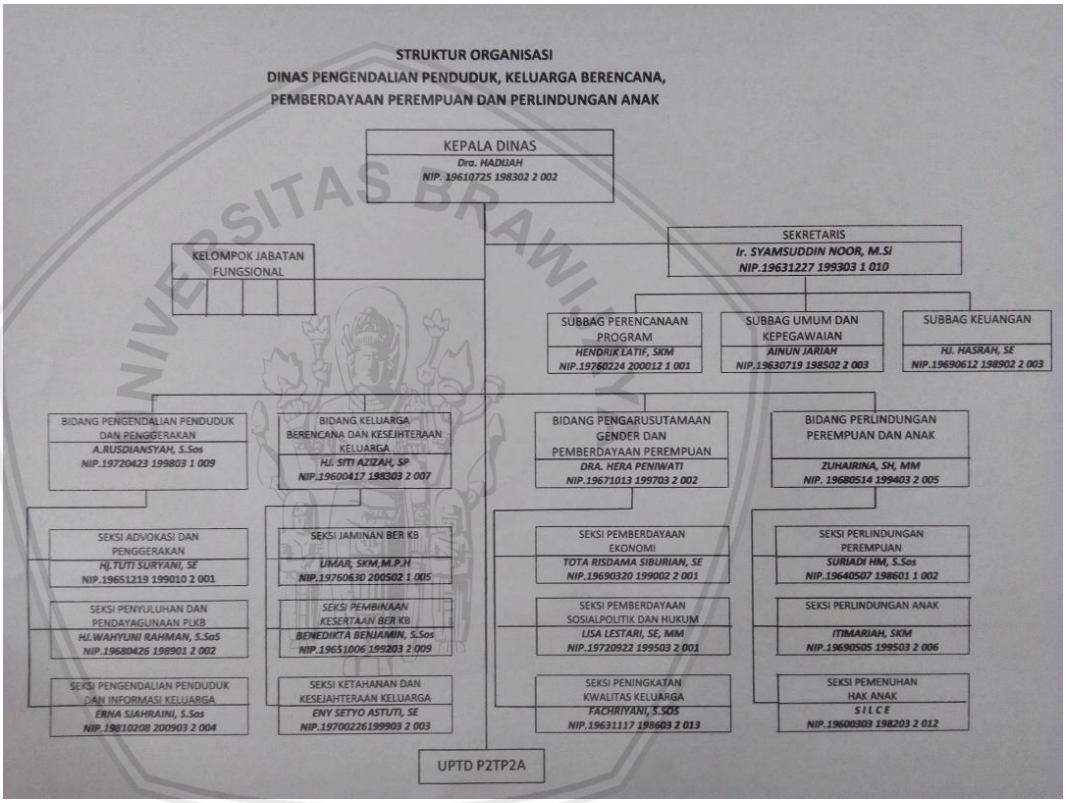

(Sumber: http://dppkbpppa.com/)

6. Profil Kampung Keluarga Berencana yang Diteliti

a. Kampung Keluarga Berencana Kembang Renteng

Gambar 5. Balai Kampung Keluarga Berencana Kembang Renteng

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019)

Kampung KB Kembang Renteng dibentuk pada tanggal 08 Agustus 2017 bertempat di Balai Desa Sangkuriman Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser Kalimantan Timur.

Desa ` : Sangkuriman

Kecamatan : Pasir Belengkong

Kabupaten : Paser

Provinsi : Kalimantan Timur

Luas Wilayah : 3,212,75Ha

Data Penduduk : 524 KK - 1980 Jiwa – Rukun Tetangga

Data Sosial Ekonomi : Mata pencaharian sebagai Karyawan dan Petani

Demografi : Wilayah dataran rendah

b. Kampung Keluarga Berencana Sipakatuo Desa Pepara

Gambar 6. Balai Kampung Keluarga Berencana Sipakatuo

(Sumber Hasil Olahan Peneliti, 2019)

Kampung KB Sipakatuo dibentuk pada tanggal 25 Februari 2016 bertempat di Balai Dusun Alau Desa Pepara Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur

Desa	: Pepara
Kecamatan	: Pasir Belengkong
Kabupaten	: Paser
Provinsi	: Kalimantan Timur
Luas Wilayah	:-
Data Penduduk	: -
Data Sosial Ekonomi	:Mata pencaharian petani dan Karyawan
Demografi	: Wilayah dataran rendah

c. Kampung Keluarga Berencana Harapan Taka Desa Jaju

Gambar 7. Balai Kampung Berencana Harapan Taka Desa Janju

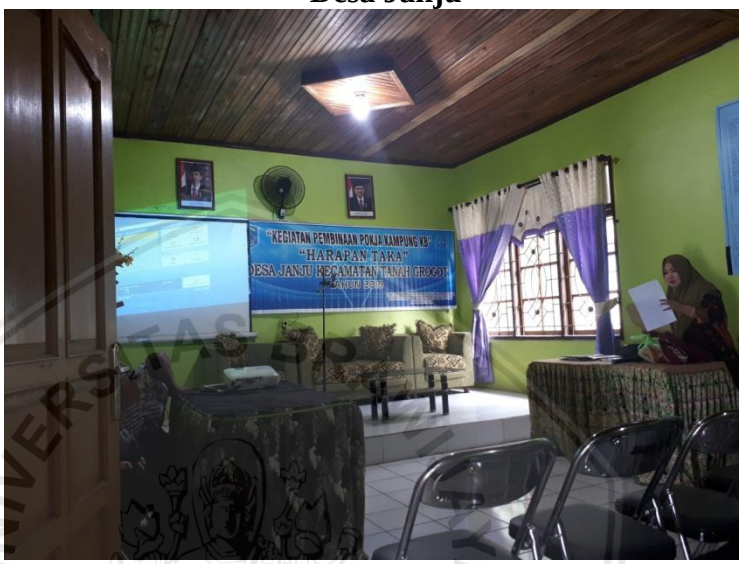

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019)

Kampung KB Harapan Taka dibentuk pada tanggal 08 September 2017 bertempat di Kantor desa Janju, Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

Desa	: Janju
Kecamatan	: Tanah Grogot
Kabupaten	: Paser
Provinsi	: Kalimantan Timur
Luas Wilayah	: 3.574,65 M2
Data Penduduk	: 444 KK – 1660 Jiwa – 2 Rukun

Tetangga

Data Sosial : Petani perkebunan sawit dan wiraswasta

Demografi : Merupakan wilayah dataran tinggi

d. Kampung Keluarga Berencana Pesisir Indah Desa Pondong

Gambar 8. Balai Kampung Keluarga Berencana Pesisir Indah

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019)

Kampung KB Pesisir Indah Desa Pondong dibentuk pada tanggal 18 September 2017 bertempat di Kantor Desa Pondong, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser

Desa	: Pondong
Kecamatan	: Kuaro
Kabupaten	: Paser
Provinsi	: Kalimantan Timur
Luas Wilayah	: -
Data Penduduk	:-
Data Sosial	: Nelayan dan Pedagang
Demografi	: Merupakan daerah pesisir panta

Secara umum pembentukan Kampung Keluarga Berencana (KB), dilandasi oleh perintah Presiden Republik Indonesia. BKKBN dalam menyusun kegiatan atau program yang dapat memperkuat sebuah pencapaian sasaran pembangunan dalam Bidang Pengendalian, Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2015-2019. Berdasarkan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, sesuai surat Edaran Mendagri Nomor 440/TU/SJ/16 tanggal 11 Januari 2016.

Pembentukan Kampung KB khususnya pada Provinsi Kalimantan Timur di 153 kecamatan diseluruh Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara melalui kerja sama natara BKKBN Provinsi Kalimantan Timur dengan Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser sesuai dengan nomor 1139/HK-005/J7/2017.

Pelaksanaan Keluarga Berencana melalui Dinas PPKBPP&PA Kabupaten Paser telah melaksanakan di sepuluh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Paser. Tahun 2016 dengan satu pembentukan satu kampung KB lalu dilanjutkan pada tahun 2017 dengan pembentukan sepuluh Kampung KB sampai dengan akhir tahun 2018. Sampai dengan saat ini Kabupaten Paser telah memilki total 21 Kampung KB. Proses pembentukan Kampung KB dilaksanakan berdasarkan kriteria-kriteria dari hasil pendataan keluarga pada tahun 2015.

Kriteria pembentukan yaitu desa yang masih rendah tingkat pencapaian baik dari segi kemiskinan maupun keikutsertaan ber-KB, wilayah perbatasan, infrastruktur yang masih belum memadai, dan desa yang memilki kondisi geografis berada di pesisir pantai. Proses pembentukan Kampung KB dan Kepengurusan Pokja dilaksankan melalui rapat musyawarah mufakat oleh tokoh masyarakat, aparat desa, masyarakat desa setempat ditandai dengan pentandatanganan komitmen dari semua pihak kepengurusan yang terlibat dalam program Kampung KB.

Table. 4. Daftar Kampung KB Di Kabupaten Paser

NO.	Kecamatan	Desa	Nama Kampung KB	Pembentukan
1.	Tanah Grogot	Pepara	Sipakatuo	25 Februari 2016
2.	Tanah Groogot	Janju	Harapan taka	08 September 2017
3.	Longkali	Sebakung Taka	Sejahtera	27 Juli 2017
4.	Pasir Belengkong	Sangkuriman	Kembang Renteng	08 Agustus 2017
5.	Batu Sopang	Busul	Bungo Teratai	10 Agustus 2017
6.	Batu Engau	Petangis	Penyembolum Selol	14 Agustus 2017
7.	Kuaro	Pondong baru	Pesisir Indah	22 Agustus 2017
8.	Longikis	Olung	Olung Lestari	24 Agustys 2017
9.	Tanjung Harapan	Lori	Negkuan Bolum	04 September 2017
10.	Muara Samu	Luan	Ceria	07 Spetember 2017
11	Longkali	Sebakung	Erai Sambuan	10 Spetember 2018

12.	Longikis	Tajur	Nengkuan Bolum	12 September 2018
13.	Batu Sopang	Rantau Buta	Harapan Taka	13 September 2018
14.	Muara Samu	Libur Dindin	Balau Senanyang	17 September 2018
15.	Batu Engau	Langgai	Langgai Bahagia	24 September 2018
16.	Muara Komam	Muara Kuaro	Sayang Bunda	26 September 2018
17.	Pasir Belengkong	Sunge Batu	Baku Ahad	2 Oktober 2018
18.	Tanjung Harapan	Selengot	Mina Pelangi	6 Oktober 2018
19.	Kuaro	Harapan Baru	Harapan Pantai Losari	8 Oktober 2018
20.	Tanah Grogot	Sungai Tuak	Aswat	11 Oktober 2018
21.	Tanjung Harapan	Lori	Mentari Jaya	04 September 2017

(Sumber: Dinas PPKBP3A)

B. Hasil Penelitian

1. Masalah-malasah yang Timbul

    a) Diskontinutitas dan diskoordinasi

Diskontinutitas dan diskoordinasi merupakan sebuah keadaan yang dimana keseluruhan program pemberdayaan masyarakat tidak terkoordinasi dengan baik selama masa pelaksanaanya. Diskontinutitas dan diskoordinasi dalam pemberdayaan Kampung KB ditemukan pada dua kampung KB dari empat Kampung KB yang diteliti oleh penulis. Dari dua Kampung KB tersebut program yang dijalankan tidak terkoordinasi dengan baik dikarenakan kurang adanya koordinasi baik yang berasal dari pengurus maupun untuk dinas yang menangani.

Dari empat Kampung KB penulis melakukan penelitian, terdapat dua Kampung KB yang dikatakan sebagai Kampung KB "mati suri" dikarenakan tidak adanya program yang berjalan selama pembentukan dilakukan. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser menggunakan konsep sosialisasi dalam pelaksanaannya. Menurut Prasojo dalam Suryono dan Nugro (2008), terdapat empat upaya dalam melaksanakan sebuah

pemberdayaan pada masyarakat yang salah satunya adalah konsep memberdayakan masyarakat dengan mensosialisasikan peran masyarakat sebagai subjek. Berikut hasil wawancara dengan Linda sebagai salah satu penyuluh lapangan Kampung KB yaitu:

"…. Ya sebenarnya kurangnya penyuluh dari dinas yang jadi salah satu faktor kita ngga bisa melakukan sosialisasi secara rutin, secara kami hanya ada dua orang penyuluh... dibanding dengan jumlah Kampung KB yang ada 21 di Kab. Paser" (Hasil Wawancara, 2019).

Hasil wawancara dengan Vevi sebagai salah satu penyuluh lapangan Kampung KB yaitu:

"….. iya mba kita kurang penyuluh masa cuma dua penyuluh dari banyaknya desa di Paser ini.... mungkin nanti kedepannya bisa ditambah jadinya kita enak membagi bagian-bagian mana aja. (Hasil Wawancara, 2019).

Menurut anggota Kampung KB Sipakatuo yang mendapat penyuluhan mengenai sosialisasi di Desa Pepara mengatakan bahwa selama ini Kampung KB Sangkuriman banyak mendapat sosialiasi dan pembinaan berikut hasil wawancara peneliti dengan Ketua Kampung KB Desa Sangkuriman "Kembang Renteng yaitu Bapak Sahurdin.

" Kami disini Kampung KB Sangkuriman sudah mendapat sosialiasi pas awal pembentukanyaa mba, Alhamdulilah selalu ada aja sosialiasi entah dari dinas mana, kadang juga ada pembinaan maupun bantuan ... kemarin kita baru dapat bantuan tanaman dari dinas lingkungan hidup, tapi bibitnya sudah kadaluarsa..... hehe jadinya tidak kita pake" (Hasil Wawancara, 2019)

Pelaksanaan Sosialisasi Kampung KB yang diteliti dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 5 Daftar Pelaksanaan Sosialisasi

NO	Nama Kampung KB	Pelaksanaan Sosialisasi
1.	Desa Pepara "Sipakatuo"	Melakukan sosialisasi dan pembinaan sebanyak 18 kali dan rapat koordinasi antar pengurus sebanyak 6 kali. (Terhitung sejak pembentukan berlangsung)
2.	Desa Sangkuriman "Kembang Renteng"	Melakukan sosialisasi dan pembinaan sebanyak 20 kali dan rapat koordinasi sebanyak 12 kali. (Terhitung sejak pembentukan berlangsung).
3.	Desa Janju "Harapan Taka"	Hanya melakukan sosialisasi sebanyak 2x selama 1 tahun pembentukan yaitu: 1. Pada tanggal pembentukan 08 September 2017 2. Sosialiasi kedua dilakukan pada 20 Juni 2019
4.	Desa Pondong "Pesisir Indah"	Hanya melakukan sosialisasi sebanyak 2x selama 1 tahun pembentukan yaitu 1. Pada tanggal 18 September 2017 2. Sosialisasi kedua dilakukan pada 21 Juni 2019

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019)

Berdasarkan Tabel diatas, bentuk data yang diperoleh penulis dalam 4 (empat) Kampung KB yang menjadi objek penelitian yang mengalami diskontiunitas dan diskoordinasi dapat di lihat dari segi sosialisasi dan pembinaan anggota yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuam dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser terdapat perbedaan yang sangat siginifikan.

Gambar.9 Sosialisasi Rutin Kampung KB Kembang Renteng

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019)

Pastisipasi pengurus Kampung KB pada setiap sosialiasi dilakukan juga mendapat antusiasme yang cukup baik terutama bagi pengurus. Sosialisasi yang dilakukan pada Kampung KB

Harapan Taka mencapai 18 kali dan melakukan rapat koordinasi dengan pengurus sebanyak 6 kali terhitung sejak melakukan pembentukan pada tahun 2016. Pada sosialisasi yang dilakukan pada bulan April 2019, pengurus Kampung KB Harapan Taka mendapat sosialisasi mengenai penggunaan KB dan sosialisasi Kampung Iklim.

Berdasarkan data diatas rentang pembentukan Kampung KB antara Desa Sangkuriman dengan Desa Janju dan Desa Pondong mempunyai rentang pembentukan yang hanya berbeda bulan dan Desa Sangkuriman dapat menjalankan berbagai sosialisasi dan rapat koordinasi pengurus didalam pelaksaananya selama awal pembentukan, dan dibadingkan dengan Desa Janju dan Desa Pondong yang hanya berbeda bulan pembentukan masih belum melaksakan program-program dan melakukan rapat koordinasi pengurus bersama dinas terkait.

Dalam sesi wawancara dengan Ketua Kampung KB Kampung KB Desa Janju "Harapan Taka" yaiu Bapak Muksin mengungkapkan bahwa kondisi tersebut dapat terjadi karena:

> "Desa ini sebenarnya potensinya besar.... tapi kita dari pengurus yang masih banyak sibuk sendiri... di liat sosialisasi hari ini aja... masa yang datang cuma 8 delapan orang dari total 50an orang pengurus.... jadi bingung juga kita hehe... masing-masing ada alasan masing-masing dan sudah punya agenda masing-masing... dan juga dari dinas di kasih tau mendakak

makanya banyak pengurus ndak hadir...” (Hasil Wawancara, 2019)

Selain itu di satu sisi tanggapan lain, yang peneliti dapatkan pada Kampung KB Desa Pondong “Pesisir Indah “ dengan ukuran jumlah pelaksanaan sosialisasi yang hanya melakukan sosialisasi 1 (satu) kali dalam satu tahun pembentukan melalui wawancara bersama salah satu pengurus Kampung KB yakni ibu yanti dengan jabatan di dalam kepengurusan sebagai bendahara.

“ kemarin ada sedikit masalah antara kepala desa dan ketua kampung Kbnya mba ndatau juga masalah pribadi mungkin yaaa... sebenarnya ketua kampung KB nya bagus dan cukup pintar.... tapi yaaa cuma kira ngestak aja disini-sini aja programnya paling pengajian itu aja setiap jum’at” (Hasil Wawancara, 2019).

Berdasarkan dari beberapa wawancara diatas yang berhubungan dengan diskontinutitas dan diskoordinasi yang disebabkan adanya orientasi manusia yang menjadi salah satu hal dalam faktor isu misinformasi yang menjadi bagian dari penyebab misinformasi dapat terjadi. Misinformasi dalam diskontinutitas dan diskoordinasi dalam hal ini manusia yang bertugas dalam menjalkan sosialisasi di dalam kampung KB selama pembentukan yaitu penyuluh lapangan yang dimana pada dinas tersebut ketersediaan penyuluh masih menjadi salah satu penyebab terjadinya diskontinutias dan diskoordinasi sehingga peluang untuk

mengisi potensi-potensi besar harapan pada Kampung KB yang melakukan pembentukan agar dapat mendapat kesamaan, kesetaraan, seimbang dan sama rata melakukan sosialisasi sehingga akan membangun kampung KB tersebut menjadi lebih terkendali dan manfaat yang bisa didapatkan di dalam kampung KB bagi seluruh masyarakat atau pengurus yang berpartisipasi dalam kampumg KB.

b.) Diorientasi atau Rentang Pelaksanaan

Diorientasi dalam pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan proses yang memerlukan waktu lama. Hal ini terjadi dikarenakan banyak menimbulkan masalah-masalah baru dan hasil yang belum nyata dari pemerintah sebagai fasilitator yang dapat merubah kebijakan kearah yang lebih tepat dan nyata dalam pelaksanaannya. Dalam kenyataanya, peneliti menemukan disorientasi pada proses pembentukan baru Kampung KB di beberapa desa salah satu masalah yang penulis dapatkan saat melakukan penelitian adalah adanya penolakan dari Desa Sungai Tuak dengan nama Kampung KB “Aswat”.

Pada awal penelitian penulis akan menggunakan Kampung KB Aswar sebagai objek penelitian tetapi pada saat berkonsultasi

dengan pihak dinas terkait dengan sejuah mana pembinaan yang dilakukan, penulis direkomendasikan untuk mengganti objek penelitian dikarenakan Kampung KB Aswat menolak dengan adanya pembentukan Kampung KB. Bahkan, dinas menyarankan penulis untuk tidak mengambil Kampung KB Aswat karena dari pihak dinas sudah mendapat surat penolakan langsung dari kepala desa setempat yang tidak setuju dengan adanya program tersebut.

> "...dari dinas aja ditolak mbak.. sampai-sampai mereka langsung memgirim surat penolakan yang langsung ditanda tanganin kepala desanya " (Hasil wawancara, 2019)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat masih terdapat desa yang menolak dengan adanya pembentukan Kampung KB dan berdasarkan pernyataan pihak penyelenggara yaitu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak Kab. Paser telah menngupayakan agar melakukan pembentukan tetapi mendapat respon yang kurang baik dari apa aparatur desa yang bertugas. Berikut rentang Diorientasi pembentukan Kampung KB pada desa yang menjadi objek penelitian penulis.

Table. 6 Rentang Waktu Pembentukan Kampung KB

NO.	Nama Desa	Rentang Waktu Pembentukan
1.	Desa Sangkuriman	1 tahun 6 bulan (satu tahun enam bulan)
2.	Desa Pepara	1 bulan (satu bulan)
3.	Desa Janju	1 tahun 8 bulan (satu tahun delapan bulan)
4.	Desa Pondong	1 tahun 6 bulan (satu tahun enam bulan

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019)

Berdasarkan penyajian data table diatas, menunjukan rentang waktu pembentukan yang dapat menjadi tolak ukur terjadinya disorientasi pada suatu program pada pemberdayaan masyarakat desa. Data rentang pembentukan Kampung KB pertama kali pada dibentuk yaitu dimulai dari desa pepara yang menjadi desa percontohan untuk penyelenggaraan Kampung KB di seluruh kecamatan Kabupaten Paser. Kampung KB Pepara mempunyai rentang waktu satu bulan dari peresmian Kampung KB yang diresmikan oleh Presiden Jokowi Widodo pada tanggal 14 Januari 2016, sedangkan pembentukan

Kampung KB di desa Pepara yaitu Kampung KB Sipakatuo didirikan pada tanggal 25 Februari 2016.

Kampung KB Desa Sangkuriman dan Desa Pondong memiliki rentang waktu yang hanya berbeda satu bulan dalam peresmian. Kampung KB Desa Sangkuriman "Kembang Renteng" didirikan pada tanggal 08 Agustus 2017, sedangkan Kampung KB Pondong "Pesisir Indah" didirikan pada 18 September 2017. Kedua Kampung KB tersebut hanya terpaut perbedaan satu bulan pembentukan, tetapi dalam kenyataanya penulis menemukan perbedaan disoreintasi yang berbeda pada kedua Kampung KB tersebut.

Disorientasi yang ditemukan penulis saat melaksanakan penelitian adalah menemukan bahwa kenyataanya kedua Kampung KB tersebut, jika dibandingkan dalam segi program yang berjalan maupun pengurus Kampung KB sangat jauh berbeda. Perbedaan yang nampak pada kedua Kampung KB tesebut adalah pertama, Kampung KB Sangkuriman "Kembang Renteng" menjadi Kampung KB percontohan di tingkat Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan Kampung KB "Pesisir Indah" selama terhitung sejak melakukan pembentukan pada tahun 2017 belum pernah melakukan rapat koordinasi dengan seluruh pengurus. Kedua, Kampung KB Sangkuriman

"Kembang Renteng" memiliki anggota yang aktif yang pada setiap kesempatan seperti menghadari sosialisasi dan rapat koordinasi anggota mempunyai antusiasme yang tinggi untuk berpartisipasi, sedangkan bagi pengurus maupun anggota Kampung KB "Pesisir Indah" masih belum memiliki antusiasme terhadap sosialisasi maupun rapat koordinasi pengurus dalam menjalankan program-program yang ada.

Berdasarkan perbedaan diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi perbedaan disorientasi bagi masyarakat Desa Sangkuriman yang dapat menerima secara cepat pendekatan proses didalam program pemberdayaan masyarakat, sedangkan pada Desa Pondong yang memerlukan waktu pendekatan proses yang cukup lama untuk melakukan suatu perubahan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat melalui program yang dirancang pemerintah.

c.) Waktu (*time)*

Waktu dapat berperan penting dalam mempengaruhi adanya faktor misinformasi. Waktu didalam misinformasi dapat di definisikan sebagai hal yang tidak akan terlepas dari ingatan seseorang manusia. Waktu jugalah yang memegang penting didalam ingatan seseorang untuk dapat memikirkan hal yang

terjadi pada seseorang. Didalam misinformasi waktu dapat memberikan pemikiran, gambaran, alur, serta isi dari informasi yang diterima seseorang.

Apabila seseorang memiliki ingatan yang sangat pendek maka akan rentan menyimpulkan suatu informasi yang ada didalam pikiran untuk dituangkan dalam macam-macam wadah, hal tersebut akan menjadi kesalahan informasi yang disengaja disebarkan atau disebut dengan disinformasi (*disinformation*). Jika seseorang memiliki ingatan yang standar dengan manusia-manusia yang lain, maka apakah waktu juga dapat mempengaruhi ingat seseorang seseorang dalam menerima informasi. Tentunya ingatan seseorang pada dasarnya terus berubah dan berkembang dalam hal untuk menerima informasi.

Informasi tersebut bisa saja tersimpan pada pikiran selama periode yang panjang, atau melainkan hanya tersimpan untuk periode pendek. Dalam hal ini salah satu faktor yang paling mendominasi terjadinya misinformasi ialah waktu. Misinformasi merupakan sebuah kesalahan informasi yang diterima seseorang yang tidak disengaja, dalam kasus Kampung KB waktu berperan penting karena dapat menentukan kondisi ingatan seseorang dalam hal ini ialah pengurus Kampung KB. Pengurus kampung KB merupakan salah satu hal yang berperan penting bagi berjalannya

program tersebut. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Benekdita Selaku Pemateri dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

> "untuk sosialisasi di Kampung KB janju ini baru yang kedua kalinya karena memang dari pengurus tidak aktif.. dan juga proses administrasi mereka juga belum melaksanakan, sebab itu kita kesini buat kasih tau tapi ya kita kembali 1 tahun lebih dan anggota yang datang juga cuma segini... mudah-mudahan mereka mau mengerti dan nanti berjalan lancar....." (Hasil Wawancara, 2019)

Jika didalam implementasi sebuah program terjadi diskoordinasi dan terjadi diskontinutias yang disebabkan kurangnya perhatian dari dinas terkait untuk mengevaluasi program tersebut, maka akan sangat besar resikonya terjadi kesalahan informasi atau misinformasi yang terjadi pada pemahaman penguruss. Penulis dalam melakukan penelitian menemukan hal-hal yang berhubungan dengan waktu yang dapat mempengaruhi adanya kegiatan misinformasi didalamnya yaitu sebagai berikut:

Tabel. 7 Bentuk-bentuk Misinformasi yang ditemukan Penulis

No.	Bentuk Kegiatan Kampung KB	*Output*
1.	- Komposer Pupuk yang digagas oleh Dinas Lingkungan Hidup - Makanan Nutrisi Untuk Bayi/Stunting	Belum terlaksana selama 6 bulan
2.	Penggunaan Pil KB	Kesalahan Pendataan pada target pengguna
3.	Pembinaan Kepengurusan Kampung KB Harapan Taka	Selama kurun waktu 1 tahun belum melaksanaan
4.	Pembinaan Kepengurusan Kampung KB Pesisir Indah dan Program 8 Fungsi keluarga	Selama kurun waktu 1 tahun belum melaksakaan

(Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2019)

Salah satu program yang menarik penulis untuk mencari kasus terkait judul penelitian tentang misinformasi (*misinformation*)

dalam pemberdayaan masyarakat desa yaitu Komposer yang di sosialisasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan pemberian makan nutrisi makanan pada bayi. Topik ini merupakan hal yang akan penulis akan bahas didalam analisis data yaitu pertama, dalam melakukan penelitian penulis menemukan indikasi terjadinya misinformasi yang diterima oleh para pengurus mengenai komposer yang disosialisasikan langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup.

Pada Kampung KB Pepara Komposer Pupuk dan Pemberian Nutrisi untuk bayi atau yang terkena stunting mengalami kesalahpahaman. Berikut hasil wawancara peneliti dengan salah satu bidan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan segala kegiatan bidang kesehatan khusunya pada Desa Pepara yaitu dengan Bidan Fitri.

> "Kadang banyak masih yang belum tau mbak, tentang program ini, jadi ya mereka kira mereka juga dapat makanan tersebut, kami sebagai bidan ya mau ngga mau harus kasih juga, padahal ini Cuma untuk anak yg terkena indikasi kurang nutrisi dari lahir " (Hasil Wawancara, 2019).

Program nutrisi ini merupakan program yang berjalan seiring dengan berdirinya Kampung KB di Desa Pepara. Namun, dalam berjalannya program ini sering kali terjadi kesalahpahaman mengenai program tersebut. Menurut bidan yang bertugas pada desa tersebut, sampai sekarang masih banyak masyarakat yang

kurang mengetahui. Selain indikasi anak tersebut kekurangan nutrisi, salah satu indikasi anak tersebut dalam mendapatkan bantuan adalah keluarga tersebut masuk didalam keluarga kurang mampu yang telah didata oleh desa setempat.

Bentuk misinformasi Kampung KB Kembang Renteng Desa Sangkuriman yang penulis temukan adalah adanya kesalahan pendataan terkait penggunaan KB gratis. Dalam pengumpulan data penulis melakukan wawancara dengan ketua Kampung KB Sangkuriman "Kembang Renteng" yaitu bapak Sahrudin mengenai pelaksanaan program-program yang berjalan seperti penggunaan KB gratis dan pembangian bibit tanaman, penulis menemukan sebuah masalah yang sesuai dengan judul penelitian. Penulis menemukan terjadinya misinformasi didalam penyelenggaraan KB gratis di Desa Sangkuriman. Adapun bentuk misinformasi yang penulis dapatkan adalah terjadinya kesalahan target didalam pendataan anggota yang ingin melakukan program KB.

> "kemarin sempat terjadi kesalahan pendataan... buat anggota yang ingin menggunakan KB, kesalahan ini ya salah mendata, jadi banyak masih yang belum menikah tapi dimasukan kedalam daftar, yaa jadi bingung dan rata-rata di desa ini 95% menggunakan KB dan rata-rata jarak usia nya sampai 4 tahunan" (Hasil Wawancara, 2019)

Selain itu bentuk Misinfomasi pada Kampung KB Harapan Taka Desa Janju yang berkaitan dengan adanya pembentukan

Kampung KB yang berfungsi sebagai pemberdayaan masyarakat desa terjadi beberapa kesalahan-kesalahan informasi yang ditanggap oleh masyarakat atau yang dapat disebut dengan terjadinya misinformasi. Sebelum mengetahui fungsi pembentuk Kampung KB oleh masyarakat sekitar masyarakat hanya mengetahui bahwa Kampung KB hanya merupakn program dua anak cukup. Berikut berdasarkan hasi wawancara dengan beberapa pengurus Kampung KB Harapan Taka yang hadir dalam sosiasliasi:

Hasil Wawancara dengan salah satu pengurus Kampung KB Harapan Taka Muksin Ketua Kampung KB Harapan Taka:

> "....setahu saya hanya dua anak cukup jamannya program presiden suharto secara dalam nya ternyata terdapat banyak program-progam yang baik untuk hidup masyarakat disini lebih baik (Hasil Wawancara, 2019)

Hasil Wawancara dengan salah satu pengurus Kampung KB Harapan Taka Siti Gustaniah, Anggota Seksi Ekonomi:

> "....Sebelumnya tahunya hanya keluarga berncana dan tidak tahu isinya apa setelah dijelaskan, ternyata banyak yang telah kita jalankan seperti yasinan arisan yang termasuk dalam seksi agama" (Hasil Wawancara, 2019)

Hasil Wawancara dengan salah satu pengurus Kampung KB yaitu Bapak Saffarudin sebagai seksi agama :

> "....Saya tidak memahami tentang Kampung KB pada 1 tahun lalu, tetapi setelah ada dinas ini datang dan sosialisasi

baru saya tahu bahwa terdapat banyak kegiatan yang bisa dilakukan contohnya saya seksi agama .... ada kegiatan-kegiatan " (Hasil Wawancara, 2019)

Dari pernyataan beberapa pengurus Kampung KB Harapan Taka yang hadir maka dapat diambil benang merah pada presepsi awal mengenai pembentukan Kampung KB ialah masyarakat Desa Janju Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser hanya mengetahui bahwa Kampung KB hanya untuk program menggunakan KB dan sebagai alasan untuk program dua anak cukup dan tidak mengetahui lebih mendalam tentang Kampung KB sebagai salah satu bentuk pemberdayaan masyarakaat saat ini. Selain itu faktor waktu (*time*) yang berkaitan dengan sosialisasi yang berlangsung ialah dapat mempengaruhi terjadinya kesalahan-kesalahan informasi yang tidak disengaja dan diterima pengurus Kampung KB pada Desa Janju dikarenakan rentang sosialisasi yang sangat lama.

Bentuk misinformasi yang penulis temukan pada penyelenggaraan Kampung KB Desa Pondong "Pesisir Indah" adalah terjadinya kesalahpahaman mengenai program yang seharusnya berjalan. Masyarakat dan pengurus tidak mengetahui bahwa program tersebut termasuk dalam delapan fungsi keluarga yang dimana setiap fungsi mempunyai fungsi dan program masing-masing. Pengurus kampung KB "Pesisir

Indah" sampai pada tahun 2019 mereka hanya menjalankan program dari seksi agama yaitu pengajian. Penulis mendapatkan pernyataan yang berasal dari seorang pengurus yang mengatakan bahwa:

> "Sampai saat ini kami dapat bantuan-bantuan dan kami juga sesama pengurus Kampung KB kurang komunikasi, grup pengruus juga nggak aktif" (Hasil Wawancara, 2019)

Berdasarkan pernyataan salah satu pengurus Kampung KB tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kepengurusan atau sumber daya manusia yang mengelola Kampung KB "Pesisir Indah" masih telihat kurang partsipatif. Fungsi kampung KB pada dasarnya mempunyai delapan fungsi yang wajib diketahui oleh seluruh pengurus untuk menjalankan seluruh program yang ada. Kenyaataan yang penulis dapatkan adalah masih terdapat beberapa pengurus yang masih tidak mengetahui bahwa terdapat program-program yang dapat memberikan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat setempat.

Berdasarkan tabel diatas, penulis menyimpulkan bahwa masih terdapat kesalahan informasi-informasi yang diterima oleh masyarakat yang juga berperan sebagai pungurus dalam menjalankan Kampung KB Pepara, Sangkuriman, Janju, dan Pondong. Selain terdapat faktor rentan waktu yang menjadi

salah satu faktor penting dalam proses ingatan seseorang dalam bertindak, peran pengurus dan kepala desa juga merupakan hal terpenting dalam keberlangsungan sebuah program.

Saat melakukan wawancara dengan salah satu penyuluh lapangan Kampung KB yaitu Ibu Linda mengatakan bahwa terdapat kesenjangan terutama dalam faktor waktu (*time)* antara Kampung KB Janju dan Kampung KB Desa Pondong yang memiliki persoalan yang sama

> "Ya.. Kampung KB janju sama Kampung KB Pondong itu ada masalah-masalah gitu antara pengurus sama kepala desa.. ya jadi gitu deh bisa di bilang gak sejalan antara pengurus dengan kepala desa... itu juga yang mempengaruhi kita jarang kesana karena ya kurang progres, kurang aktif pengurusnya.... " (Hasil Wawancara, 2019)

Gambaran dengan kondisi Kampung KB yang peneliti teliti terkait dengan penyajian data berupa diskontinutitas dan diskoordinasi dan rentang pelaksanaan dengan waktu (*time*) dalam menghadapi misinformasi dalam masyarakat dan pengurus program Kampung KB Desa Sangkuriman, Desa Pepara, Desa Janju dan Desa Pondong adalah merupakan satu kesatuan yang peneliti temukan. Dalam penemuan ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam melakukan suatu pemberdayaan masyarakat melalui sebuah program, jika tidak ada konsep upaya pemberdayaan seperti terjadi adanya koordinasi yang tidak baik

antara dinas penyelenggara dengan pengurus Kampung KB, partisipasi masyarakat atau pengurus, serta adanya rentang waktu.

Dalam menjalankan pemberdayaan masyarakat perlu adanya model difusi informasi dalam misinformasi yang teori diusung oleh (Fisher & Ardelez, 2005), dengan mengetahui difusi informasi yang terjadi pada setiap Kampung KB yang peneliti teliti sehingga dapat disimpulkan terjadi sebuah kesalahan informasi (*Misinformation*) yang terjadi

Gambar. 10 Model Difusi Informasi dan Misnformasi

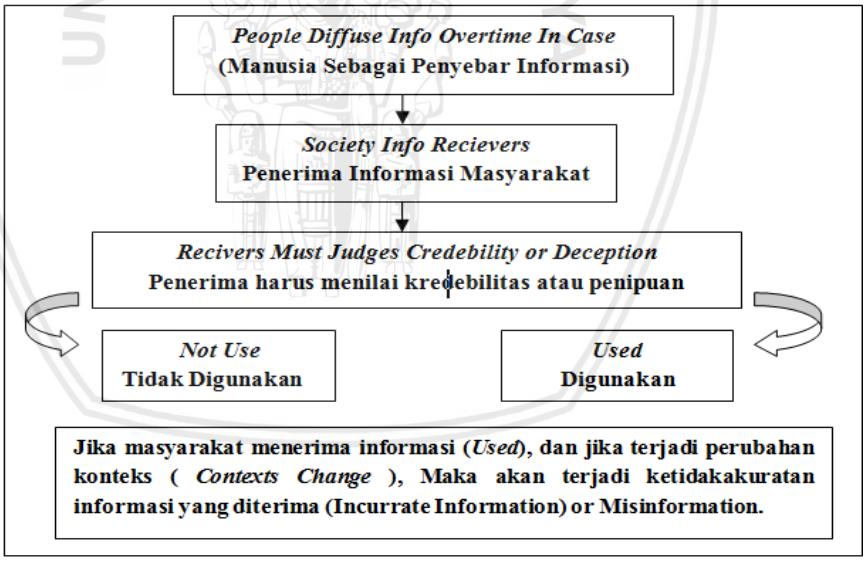

(Sumber: Fisher& Erdelez, 2005)

Model difusi informasi dan misinformasi yang digagas oleh Natascha, A Karlova dan Karen E.Fisher The Information School yang berasal dari University of Washington. Mengungkapkan proses difusi sebuah informasi, misinfomasi dan disinformasi, yang

dimana ketiga hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terlepas dari yang namanya siklus informasi. Orang-orang akan senang dalam memberi informasi, bahkan akan senang menerima informasi tersebut dan belum tentu mengatahui kebenaran dari informasi tersebut.

Kriteria misinformasi dalam hasil penelitian ini berupa waktu (*time*) yang mempengaruhi model difusi infomasi bagi sebuah program-program yang bejalan sehingga mengalami program tersebut mengalami diskontinutits atau tidak berjalan. Adapun kriteria kegiatan-kegiatan dalam Tabel. 7 yang mempunyai hubungan dengan waktu (*time*) dalam misinformasi yang ditemukan peneliti dalam penelitian ini

Tabel. 8 Kriteria Misinformasi

No.	Kriteria	Bentuk Tindakan
1.	Rentang waktu (*time)* yang terlalu lama dan adanya diskusi (*disscusing*)	Tidak adanya sosialiasi kembali dari Dinas Lingkungan Hidup
2.	Rentang waktu (*time)*	Tidak adanya pendataan kembali dari pihak penyelenggara sehingga terjadi kesalahan
3.	Rentang waktu (*time)* terlalu lama	Tidakan dari dinas yang tidak memberi kesempatan yang sama dalam melakukan pengembangan
4.	Rentang waktu (*time)* terlalu lama	Tidakan dari dinas yang tidak memberi kesempatan yang sama dalam melakukan pengembangan

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019)

d.) Rentang Birokrasi dan Biaya Operasional

Rentang birokrasi meliputi peraturan hukum maupun Undang-Undang Dasar Pembangunan, surat keputusan, pentunjuk teknis pelaksanaan maupun sistem penganggaran yang dianggap masih terlihat kaku sehingga dapat menghambat proses pemberdayaan dimasyarakat. Penyelenggaraan Kampung KB. Birokrasi pada hakikatnya mempunyai fungsi yaitu sebuah penyelesaian masalah (*problem solution*), bukan yang akan menghambat proses berjalannya pembangunan khususnya bagi pemberdayaan masyarakat desa.

Membangun masyarakat desa Kampung KB merupakan sebuah program yang dapat dikatakan baru dan masih gencar berjalan di seluruh nusantara Indonesia. Target dari Kampung KB sendiri dicanangkan akan melahirkan sebanyak 75.000 Kampung KB di desa atau kelurahan di Indonesia. Oleh karena itu, didalam pembentukan Kampung KB terdapat badan hukum yang melindungi dan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya sebagai berikut:

Tabel. 9 Rentang Birokrasi

NO.	Rentang Birokrasi
1.	Undang-Undang Dasar Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
2.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa
3.	Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa
4.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
5.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional, Penyuluh Keluarga Berencana
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Pendapatan dan Belanja Negara
6.	Peraturan Presiden Nomer 12 Tahun 2015 tentang Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
7.	Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan kualitas sistem pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawas Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesehjateraan Rakyat
8.	Peraturan Pemerintah dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
9.	Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa
10.	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015
11.	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015

12.	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasnmigrasi Republik Indonesia Nomer 21 Tahun 2015
13.	Peraturan Menteri Keungan Nomor 247/PMK.07/ 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
14.	Peratuan Menteri Keungan Nomor 257/ PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah yang tidak memenuhi Alokasi Dana Desa
15.	Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomer 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
16.	Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2016.
17.	Peraturan Bupati Paser Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengadaab Barang dan Jasa di Desa
18.	Peraturan Bupati Paser Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

19. S	Peraturan Bupati Paser Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan Keungan Desa
20.	Peraturan Bupati Paser Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengalokasiaan dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun 2016
21.	Keputusan Bupati Paser Nomor 114/KEP-482/2015 tentang Pengesahan Perpanjangan Pejabat Kepala Desa
22. (S	Keputusan Bupati Paser Nomor 212.2/KEP-54/2016 tentang Bantuan Keungan Kepada Desa Tahun Anggaran 2016

(Sumber: Surat Ketetapan Kampung KB Kab. Paser, 2019)

Rentang birokrasi khususnya biaya operasional dana pelaksanaan Kampung KB. Seluruh dana berasal dari dana dari dana desa yang dikelola oleh desa sesuai dengan ketetapan desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam kesempatan wawancara bersama Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser terkait

rentang birokarsi yang berjalan khusunya pada penyelenggaraan Kampung KB mengungkapkan bahwa:

> "Kalau dari birokraisnya tentu ada perturan-peraturan yang jelas sesuai dengan itu misal Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 itu kan tentang perkembangan penduduk, semestinya gimana dan ada pembangunan juga, lalu ada peraturan desa ... UU 60 Tahun 2014 tentang ya dana-dana desa yang bisa digunakan untuk keperluan pembangunan seperti salah satunya ya... Kampung KB ini.... dan juga dana Kampung KB ini berasal dari dana desa juga..jadi ya program ini kembali kedesa juga dan dikelola desa juga.. dengan catatan kami sebagai dinas yang bertanggung jawab atas program ini..... (Hasil Wawancara, 2019)

Selain berasal dari dana desa pengurus Kampung KB juga pelaksanaan kampung KB juga mendapat perhatian karena didalam pelaksanaanya melibatkan pengurus sebagai penyumbang biaya operasional mandiri. Seperti yang diungkapkan salah satu anggota Kampung KB Kembang Remteng Desa sangkuriman yaitu Santika yang mengatakan bahwa:

> " Kami sendiri urunan swadaya masyarakat yang ada disini mbak.... biasanya kami urunan dan masak bersama-sama kalau ada acara yang ada program Kampung KB nya....."

Kepengurusan pokja yang terlibat meliputi pelindung yaitu dari seorang kepala desa yang bertanggung jawab dengan mempunyai penasehat dari Badan Pendapatan Daerah (BPD) dan ketua PKK desa setempat. Pengurus Pokja yang meliputi ketua, sekretaris,

bendahara, pelaksanaan operasional (bidan, kader, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh agama), dan seksi-seksi. Seksi-seksi yang bertugas yaitu seksi keagamaan, seksi sosialisasi/pendidikan, seksi reproduksi, seksi ekonomi, seksi perlindungan, seksi kasih sayang, seksi sosial budaya, dan seksi pembinaan lingkungan.

Pembinaan Kampung Berencana (KB) dapat melibatkan lintas sektor dinas yang ada di Kabupaten Paser. Pembinaan berkaitan dengan lintar sektor seperti dinas pendidikan, dinas komunikasi, dinas kesehatan, dinas lingkungan hidup, dinas permukimman dan perumahan, dinas perhubungan, dinas pertanian, dinas ketahanan pangan, dan lain-lain. Keterlibatan dinas-dinas diatas dapat memberi berupa sosialisasi yang menghadirkan narasumber ahli pada bidangnya masing-masing dan bantuan- bantuan khusus yang dimana keterlibatan dinas-dinas tersebut merupakan salah satu bentuk kegiatan yang ada didalam pembinaan Kampung Berencana (KB) untuk memberikan arahan, bimbingan, penyuluhan, serta bantuan kepada masyarakat yang turut berpartisipasi didalam penyelenggaraan Kampung KB.

2. Peran Aktor

a) Kepala Dinas

Kepala dinas melaksanakan sebagaian tugas pemerintah daerah membawa perubahan yang siginifikan terhadap masalah

yang dimasyarakat sesuai dengan ketentuan bidang masing-masing. Kepala dinas dengan dibantu sekretaris, kepala bidang, kepala bagian, kepala sub bagian, dan staff dapat membantu terwujudnya keberhasilan dalam sebuah program yang diusung. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok yaitu menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan umum dan kebijakan teknis berdasarkan peraturanp Perundang-undangan yang berlaku dalam pedoman kerja.

Kepala dinas melakukan koordinasi pelaksanaan dengan SKPD pemerintahan Kabupaten untuk mendapatkan kesamaan pendapat dan kebenaran dalam melaksanakan sebuah tugas. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas bawahan agar terjalin kerja sama yang kompak dalam pelaksanaan disetiap tugas guna memberikan layanan konsultasi, mengarahkan, memberi petunjuk kepada bawahan, memberi paraf serta mentandatangani segala bentuk naskah baik pencarian dana perjalanan, dan bentuk naskah pendukung lainnya. Tugas pokok dari seorang kepala dinas adalah dapat mengajukan saran dan pertimbangan dalam suatu program dan melakukan evaluasi hasil kegiatan serta melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan kepada daerah sebagai bentuk dari pertanggungjawaban dinas dengan pembangunan dalam daerah.

Sesuai dengan tugas pokok diatas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser yaitu Ibu Dra. Hadijah dalam kesempatan wawancara menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan dan keberlanjutan Kampung KB yang ada di Kabupaten Paser.

> " ...penyelenggaran Kampung KB di Paser ini sihh . masih banyak kekurangan yang kita alami... disini kita punya 10 kecamatan dan banyak desa juga yang lumayan jauh seperti kec. Tanjung Harapan harus pake kapal kita kesana. Yaaa..... jadinya melihat juga tenaga penyuluh kami yang hanya berjumlah 2 orang dan dibantu beberapa staf dan masing-masing bidang di dinas itu pun juga tidak sebanding dengan banyaknya Kampung KB di Paser ini....terus juga sama sarana & prasarana disini masih kurang.... (Hasil Wawancara, 2019)

Jika dilihat dari sisi staff bidang dan penyuluh yang melakukan sosialisasi mengatakan bahwa segala bentuk kegiatan Kampung KB di Kabupaten Selama ini Kepala Dinas sebagai penangung jawab utama melaksanakan Penyelenggaran Kampung KB dengan cukup baik. Beberapa Kampung KB yang dinyatakan mati suri dikarenakan dorongan utama dari masyarakat itu sendiri kurang peduli dan tidak adanya koordinasi lebih lanjut mengenai keberlanjutan program tersebut.

b) Kepala Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kepala desa memilki tugas yaitu menyelenggarakan

pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, melaksanakan tugas memimpin, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, memegang kekuasan pengelolaan keuangan desa, menetapkan peraturan desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja, membina masyarakat, membina kententraman dan ketertiban masyarakat, meningkatkan perekonomian desa, mengembangkan sumber pendapatan desa, mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif dan melaksanakan wewenang lainnya.

Dalam presisi kedudukan kepada desa pada susunan pengurus dalam penyelenggaran program Kampung KB ialah sebagai pelindung. Pelindung mempunyai makna sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desaa Pasal 26 Ayat (1), Kepada Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pada Pasal 26 ayat (2) (m) memfokuskan kepala desa berwewang melakukan dan mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif .

Kepala desa yang peneliti temukan pada saat melakukan penelitian pada Desa Janju dan Desa Pondong mengalami sedikit hambatan dikarenakan pada saat itu kepada desa dari dua desa

tersebut tidak ada ditempat. Desa pertama yang ingin peneliti teliti pada dasarnya adalah Desa Pepara, setelah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak dinas ternayata dari desa Pepara menolak mentah-mentah sampai dengan mengirim surat penolakan untuk diselenggarakannya program Kampung KB pada desa tersebut Akhirnya peneliti mengganti dengan Desa Pondong yang juga mempunyai permasalahan sendiri dalam penyelenggaraanya.

Desa Janju pada awalnya menolak dengan adanya program Kampung KB dengan mengirim surat kepada dinas terkait. Menurut perangkat Desa Janju, alasannya Desa Janju tidak perlu melaksanakan karena masyarakat mereka pasti tidak akan banyak yang mengikuti program tersebut. Orientasi awal perangkat desa tersebut yang memicu terjadinya kesalahpahaman awal mengenai Program KB. Setelah melakukan diskusi panjang dengan pihak desa, akhirnya mereka mengizinkan berdirinya Kampung KB di desa Janju.

> "awalnya... mereka ga mau tapi setelah kita diskusi terus dan kasih tau macam-macam tentang Kampung KB fungsi, program yang nanti ada sampe manfaat yang bisa didapat.... kita kasih tau semua pokoknya dan alhamdulilah mereka mau... dan kita resmi membentuk Kampung KB janju 08 September 2017.... (Hasil Wawancara, 2019)

Selain itu, pada Desa Pondong yang memiliki persoalan yang berbeda yaitu terjadi gesekan pribadi antara Kepala Desa

Pondong dengan Ketua Kampung KB Harapan Indah. Menurut Tuti Selaku Kasi Keluarga Berencana mengakatakan bahwa:

"Mereka punya masalah pribadi waktu dulu nyaleg-nyaleg gitu.. jadinya ada masalah pribadi kurang enak gitu.. nah lama sudah kita ga ke pondong.. coba kita lihat masihkah mereka begitu.. semoga aja engga ya.. biar Kampung KB Podong jalan kesian disitu-situ aja dari dulu... " (Hasil Wawancara, 2019)

Menurut salah satu anggota dari pengurus Kampung KB Pesisir Indah Darsiah sebagai sekertaris mengungkapkan bahwa:

"Selama ini.. bapak Edy bagus dan aktif juga cuma ya itu punya masalah sama pak kepala desa yang jadinya buat dia mau ingin keluar Kampung KB padahal menurut kami pa edy sudah bagus.. tadi aja pas musyawarah kan dia kepilih lagi... artinya dia bagus kita suka.. daripada yang lain-lain mending pak edy aja..! (Hasil Wawancara, 2019)

Tanggapan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser menangapi sebagai berikut:

"Ya... kami dari dinas juga tidak bisa sepenuhnya ikut campur yakan urusan pribadi orang.. yang bisa kita lakukan adalah kita harus lakukan sosialiasi terus dan melakukan pengembangan untuk pengurus-pengurus Kampung KB khusunya pada desa janju dan desa pondong yang masih banyak kurang... dan juga kita mau kedepanya tidak ada lagi lah masalah-masalah seperti itu.. nanti yang rugi juga kita semua.... kemarin yang terpilih pak edy lagi kan... pertahanakan aja..(Hasil Wawancara, 2019)

c) Petugas Penyuluh

Petugas penyuluh pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Paser hanya memiliki petugas penyuluh lapangan

sebanyak 2 (dua) orang yaitu Linda Shintiana, SKM, MPH dan Vevi Kristina. Penyuluh Kampung Keluarga Berencana yang tedapat di Kabupaten Paser hanya menempati jenjang penata muda, golongan ruang III/a.

Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosialisasi dalam Kampung KB penyuluh mendapatkan kesempatan 3 kali dalam kurun waktu 1 bulan. Pendayagunaan tenaga penyuluh merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam memanfaatkan tenaga penyuluh KKBPK sebagai tenaga penyuluh dan pengerak pembangunan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di lini lapangan. Lini lapangan merupakan serangkaian aktifitas penyelenggaraan operasional program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di wilayah yang paling dekat dengan keluarga atau masyarakat yitu rukun tetangga, dusun, dan desa/ kelurahan.

Penempatan tenaga penyuluh KKBPK dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek sebagai berikut:

a. keluarga dan jumlah penduduk

b. Jumlah desa atau jumlah kelurahan dan,

c. Daerah perkotaan dan pedesaan dengan geografis yang berat atau daerah terpencil tertinggal dan perbatasan

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh KKBPK dilaksanakan sesuai dengan dengan kebutuhan daerah. Dengan memperhatikan perihal-perihal kegaitan yang dapat memberikan peningkatan kapasitas dalam melakukan penyuluh. Kegiatan tersebut dapat berupa kegiatan pelatihan, orientasi, pemberian beasiswa studi jangka panjang atau pendek, serta bimbingan secara teknis kepada tenaga Penyuluh KKBPK. Dalam wawancara dengan salah satu penyuluh menungkapkan bahwa:

> "Kami biasa melakukan sosialisasi dalam sebulan bisa 3kali dan itu desanya ganti-gantian, misalnya desa janju sudah baru kita ke desa olung atau desa muara komam, dan juga kita ngga ada jadwal rutin... ya dimana ada kosong dan ada yang belum kami datangi.. ya kita lakuin sosialisasi" (Hasil Wawancara, 2019)

Dalam sisi pengurus Kampung KB yang terlibat dalam sosialisasi yang diadakan pada Desa Sangkuriman pada bulan April, kesedian penyuluh dan pemateri pada saat itu telalu mendadak sehingga terjadi pembatalan penyelenggaran sesi kedua sosialisasi. Menurut Lisnawati selaku kasubag perencanan program mengatakan bahwa:

> "kadang kita sosialisasi mendadak sehingga pematerinya dari dinas lain lagi sedang ada di desa lain ngisi acara juga....terus mau kesini jauh makanya kita batalkan sesi keduanya, soalnya pematerinya jauh... ya ginilah kalau mendadak" (Hasil Wawancara, 2019)

Table.10 Kegiatan Petugas Penyuluh

Bentuk Kegiatan	**Linda Shintiana, SKM, MPH**	**Vevi Kristina, SKM**
Kegiatan Pelatihan	Pelatihan pada tahun Bulan Juni 2019 dilaksanakan di Samarinda.	Pelatihan pada tahun Bulan Juni 2019 dilaksanakan di Samarinda.
Orientasi	Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi sebanyak 3 kali dalam sebulan	Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi sebanyak 3 kali dalam sebulan
Beasiswa Studi	Tidak ada	Tidak ada
Bimbingan Teknis	Bimbingan dari BKKN Pusat	Bimbingan dari BKKN Pusat

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019)

d) Pengurus Kampung KB

Pengurus Kampung KB berfungsi sebagai pengelola Kampung KB yang dibentuk dari Pokja dan dapat disepakati

bersama dan dapat dikembangkan dengan kondisi, kebutuhan, muatan masing-masing wilayah Kampung KB dan mengacu pada pelaksanaan 8 (delapan) fungsi keluarga nasional. Kepengurusan Kampung KB mempunyai poin terpenting ialah membangun kesepakatan bersama pada saat dibentuk dengan musyawarah bersama warga kampung untuk menyepakati pembentukan Kampung KB Adapun struktur Kepengurusan dan peran Kampung KB meliputi:

1. Pelindung atau penanggung jawab, yaitu kepala desa atau lurah
   Bertanggung jawab atas keseluruhan pengembangan dan operasional Kampung KB, Mengkoordinasikan kegiatan Kampung KB dan mengusahakan anggaran dari dana desa.
2. Penasehat, yaitu ketua BPD dan Ketua PKK
   Memberikan masukan baik kepada penanggung jawab maupun pelaksanaa dalam membina Kampung KB. Dan mengadovokasi pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan didalam Kampung KB
3. Ketua, yaitu Kepala Dusun / Ketua RW / Tokoh Masyarakat
   Menentukan kebijakan serta strategi dalam seluruh kegiatan didalam Kampung KB , membimbing serta membina pengurus pokja dan melakukan koordinasi dengan pengurus
4. Sekertaris, yaitu Sub-PPKBD/ Sub-POS KB

Melakukan admistrasi kepengurusan, menerima dan mengolah laporan kegiatan, serta melakukan evaluasi pada setiap laporan kegiatan pelaksanaan didalam Kampung KB

5. Bendahara, yaitu Pengurus PKK RW

   Menerima, membayarkan, mencatat, melaporkan dan mempertanggungjawabkan semua aktifitas keuangan dalam pelaksanaan kegiatan Kampung KB

6. Seksi-seksi,meliputi seksi keamanan, seksi pendidikan, seksi reproduksi, seksi ekonomi, seksi perlindungan, seksi kasih sayang, seksi sosial budaya, seksi pembinaan lingkungan

Dalam kepengurusan Kampung KB dapat terbagi menjadi dua bagian yaitu pada Desa Pepara dan Desa Sangkuriman, dimana kepengurusan berjalan lancar dan aktif, sedangkan kepengursan Kampung KB Desa Janju dan Desa Sangkuriman tidak berjalan dengan lancar dan tidak aktif. Menurut Ketua Kampung KB Desa Janju yaitu Bapak Muksin mengungkapkan bahwa:

> "Kampung KB ini masih belum baik... masih banyak kurang dari pengurus saja lihat yang datang cuma 8 orang... terus juga saya lihat Kampung KB kita ini potensinya besar sayang kalau enda dilanjutkan..... tapi tadi kita sudah koordinasi sama ibu bene buat administrasi kepengurusan kita biar lebih aktif lagi.. dan kita juga mau sering-sering konsultasi kekantor di grogot biar tidak ada kesalahpahaman lagi...." (Hasil Wawancara, 2019).

Gambar. 11 Pengurus Kampung KB Harapan Taka

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019)

Berdasarkan salah satu pengurus Kampung KB Desa Pondong yaitu Ibu Isna dari Seksi Reproduksi mengungkapkan bahwa Kampung KB Desa Pondong antar pengurus tidak punya ruang untuk bersatu yang berdampak pada kehadiran para anggota.

"Kemaren sempat punya grup isinya pengurus-pengurus Kampung KB ini, tapi kok enda ada lagi gitu yaa... wkkw kita bingung juga mau komunikasi antar pengurus.... nanti kita mau aktifkan lagi grup WA atau facebook biartau info-infokan " (Hasil Wawancara, 2019)

Menurut Ketua Kampug KB yaitu Sahruddin dari Kampung KB Sangkuriman mengenai Kepengurusan Kampung

KB Sangkuriman sudah cukup baik dan aktif mengungkapan bahwa:

> "kalau untuk pengurus Kampung KB sangkuriman ini sudah cukup baik.... aktif-aktif aja kami ini kami latihan buat dikirim ke kubar (kutai barat) buat lomba hari Kampung KB dan kita terpelih mewakili Paser buat lomba... "(Hasil Wawancara, 2019)

Menurut Ketua Kampung KB sekaligus menjadi Kepala Desa KB Desa Pepara menyampaikan bahwa:

> "Yaa gitu... pengurus kita banyak cukup aktif.. tapi ada juga yang malas-malasan pasti ada sih itu tidak mungkin tidak ada, tidak menutup kemungkinan meskipun kita dijadikan Kampung KB percontohan..... (Hasil Wawancara, 2019)

Table. 11 Jumlah Pengurus Kampung KB

NO.	Nama Desa	Nama Kampung KB	Jumlah Pengurus
1.	Sangkuriman	Kembang Renteng	53
2.	Pepara	Sipakatuo	53
3.	Janju	Harapan Taka	50
4.	Kuaro	Pesisir Indah	52

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019)

e) Lintas Sektoral

Lintas sektoral dalam penyelenggaraan Kampung KB di berbagai desa yang di Kabupaten Paser telah banyak dilakukan. Bentuk kerjasama yang terjalain antar lintas sektor berupa bantuan-bantuan, penyuluhan dalam sosialisasi, dan pembinaan secara

khusus. Pada Kampung KB yang menjadi objek penelitian ini, dalam kurun pembentukan dari tahun 2016 sampai dengan awal 2019 telah mendapat berbagai bantuan baik dalam bentuk penyuluhan dan pembinaan. Menurut kepada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Ibu Dra. Hadijah mengungkapkan bahwa:

> " Selama ini sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan lintas sektor, memang kita kan harus ada kerjasama.. kemarin ada bantuan dari dinas pertanian, dinas ketahanan pangan, dinas kesehatan, terus ya pengurus Kampung KB yang juga dapat merasakannya... pokokny ada untungnya ikut Kampung KB.... (Hasil Wawancara, 2019)

Salah satu kerjasama yang berjalan dalam Program Kampung KB diseluruh Kab. Paser ialah "Kampung Iklim". Kampung Iklim merupakan sebuah terobosan baru yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk menjaga ekosistem disuatu desa. Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Paser dalam tahun diwakili dengan Bapak Safarudin yang betugas mensosialisasikan kepada seluruh Kampung KB yang ada di Kabupaten Paser mengungkapkan bahwa:

> "Kampung iklim merupakan program baru yang diusung kementrian lingkungan hidup untuk kawasan yang masih alami dan belum banyak melakukan perubahan guna menjaga ekosistem serta iklim setempat " (Hasil Wawancara, 2019).

Gambar 12. Sosialisasi Kampung Iklim

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019)

Sejak pertama kali melakukan pembentukan Kampung KB pada Tahun 2016 kerjasama lintas sektoral antara Kampung KB dengan Dinas yang ada di Kabupaten Paser sudah melakukan berbagai kerjasama. Kerjasama yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait untuk Kampung sampai pada tahun 2019 telah terdapat kerjasama yang terjalin. Kerjasama yang dilakukan umumnya merupakan program yang bersifat membantu para pengurus yang merupakan warga juga dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Adanya kerjasama di dalam progam Kampung KB dalam penelitian ini memberikan sebuah pengalaman yang peneliti temukan khususnya pada tema dasar penelitian ini yaitu

misinformasi di dalam berjalannya sebuah program pemberdayaan masyarakat.

Table.12 Kerjasama Lintas Sektoral

NO.	Nama Dinas Lintas Sektoral	Jenis Kerjasama
1.	Dinas Ketahanan Pangan	Berupa bantuan beras raskin untuk masyarakat msikin di desa pepara
2.	Dinas Lingkungan Hidup	Berupa penyuluhan dan pembinaan komposer sampah yang mempunyai manfaat dan penyuluhan tentang kampung iklim di seluruh Kampung KB di Kab.Paser
3.	Dinas Kesehatan	Berupa pemberian makanan bernutrisi gratis kepada bayi/balita yang terindikasi terkena gejala stunting, pembinaan BKB kepada seluruh anggota Kampung KB di Kab.Paser
4.	Dinas PPKB3PPA Bidang KB	Berupa penyuluhan dan pendataan pengurus Kampung KB dan masyarakat yang ingin memasang KB secara gratis
5.	Dinas Pertanian	Berupa Pemberian bibit tanaman kepada pengurus Kampung KB

(Hasil Olahan Peneliti, 2019)

3. Faktor Pendukung dan Penghambat

a) Faktor Pendukung

1. Kerjasama Lintas Sektoral

Lintas sektoral merupakan sebuah bentuk kerjasama dengan pemerintah, pemerintah desa, organisasi lembaga swadaya masyakat, (LSM) maupun perusahaan-perusahaan terkait. Kerjasama lintas sektoral mempunyai fokus untuk memberikan pembinaan, pelatihan dan memberikan bantuan-bantuan khusus terhadap pelaksanaa kegiatan. Kerjasama lintas sektoral pada Kampung KB dapat memberikan sebuah inovasi strategis bagi pemberdayaan masyarakat dengan memiliki dasar pemikiran berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Kerjasama atau MOU, Prolap, kebijakan-kebijakan yang tersirat maupun tersurat, memberikan manfaat dan keuntungan diantara kedua belah pihak dan dapat meberikan sebuah kontribusi.

Kerjasama lintas sektoral dalam penyelenggaran, penyuluhan dan pembinaan Kampung KB. Kerjsama dimulai dari tahun 2016 sampai saat ini kerjamasama berasal dari Dinas Kesehatan berupa pemberian nutrisi gratis kepada anak kekurangan gizi. Dinas Lingkungan Hidup berupa program pengelolaan sampah menjadi komposer dan kampung iklim, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

anak berupa penyuluhan penggunaan KB secara gratis, Dinas Pertanian berupa pembagian bibit tanaman secara gratis kepada pengurus Kampung KB.

2. Peraturan Tentang Biaya Operasional

Peraturan biaya operasional Kampung KB diatur dalam penyelenggaran Udang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga telah mengamatkan bahwa penduduk merupakan titik sentral dalam pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan bekelanjutan merupakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi yang akan datang.

Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas maka upaya yang dilakukan berupa mengendalikan angka kelahiran, menurunkan angka kematian, mengarahkan mobilitas penduduk, serta meningkatkan kualitas penduduk menjadi lebih baik, sehingga sumber daya manusia yang tangguh dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata untuk masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,

pengendalian penduduk dan keluarga berencana (KB) merupakan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan kewenangan secara konkuren dan menjadi kewenangan pusat, provinsi, kabupaten dan kota.

Pada era desantralisasi pemerintah daerah Kabupaten dan Kota terhadap program Kampung KB mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat dari rendahnya alokasi APBD dan minimnya dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan didalam Kampung KB. Kondisi yang dialami pada era desentralisasi menyebabkan sulitnya mencapai target yang sudah ditetapkan didalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJMN) dan rencana kerja pemerintah (RKP). Pada tahun 2008 dimulai mengalokasikan dana transfer DAK KB yang akan digunakan untuk memenuhi sarana, prasarana fisik dalam program Kampung KB. Sarana dan prasarana fisik dalam pemanfaatan dinilai kurang efektif apabila tidak didukung oleh anggaran operasional.

Mulai tahun 2016 pemerintah pusat melakukan alokasi dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) bagi Kota dan Kabupaten. Landasan yang menjadi acuan bagi pemerintah pusat adalah dengan adanya Pasal 298 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah

Daerah bahwa belanja Dana Alokasi Daerah (DAK) diprioritaskan untuk dapat mendanai kegiatan fisik maupun kegiatan non fisik.

Pemberian dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) adalah untuk mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan khususnya dalam Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga untuk mendukung tercapainya TFR (*total fertility rate*) 2,31 pada akhir tahun 2018 dan TFR 2,28 pada akhir tahun 2019 dan 2,1 pada tahun 2025. Salah satu tujuan dengan adanya peraturan biaya operasional Kampung KB adalah menyediakan dukungan dana operasional kegiatan bagi balai penyuluh KB dalam upaya pencapaian tujuan program Kependudukan, Keluarga Berencana (KB) dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) secara nasioanl, menyediakan dukungan operasional pembinaan program KKBPK bagi masyarakat oleh kader pembantu pembina keluarga berencana desa, Menyediakan dukungan dana operasional media dan manajemen BOKB dalam Kampung KB.

Jumlah bantuan operasional bagi setiap penyuluhan KB diberikan dengan melihat luas wilayah, jangkauan dan jumlah petugas pada setiap penyuluhan. Jumlah bantuan operasional integrasi program KKBPK dan program pembangunan lainnya setiap Kampung KB, diberi kepada 1 (satu) kecamatan, jika dalam

satu kecamatan telebih dari satu maka bisa dilakukan secara bergantian dan tetap pada setiap kegiatan penganggaran tetap menjadi satu Kampung KB di setiap kecamatan. Dukungan operasional dana BOKB mencakup pembiayaan honorarium fasilitator BOKB, koordinasi serta monitoring dan evluasi, sedangkan mekanisme penyaluran dana BOKB sesuai dengan Perundang-undang dana peraturan yang berlaku dalam penyelenggaran bantuan dana pada program nasional.

Gambar. 13 Daftar Tanda Terima Uang Transport

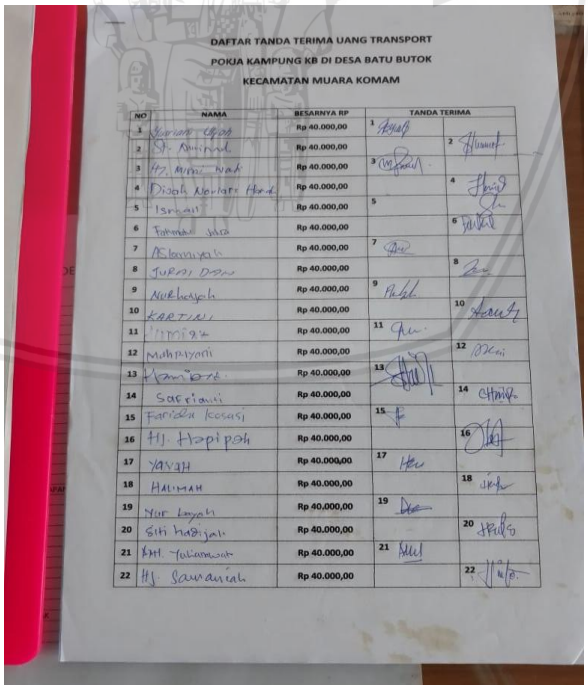

DAFTAR TANDA TERIMA UANG TRANSPORT
POKJA KAMPUNG KB DI DESA BATU BUTOK
KECAMATAN MUARA KOMAM

NO	NAMA	BESARNYA RP	TANDA TERIMA	
1		Rp 40.000,00	1	
2		Rp 40.000,00		2
3		Rp 40.000,00	3	
4		Rp 40.000,00		4
5		Rp 40.000,00	5	
6		Rp 40.000,00		6
7		Rp 40.000,00	7	
8		Rp 40.000,00		8
9		Rp 40.000,00	9	
10		Rp 40.000,00		10
11		Rp 40.000,00	11	
12		Rp 40.000,00		12
13		Rp 40.000,00	13	
14		Rp 40.000,00		14
15		Rp 40.000,00	15	
16	Hj. Hapipah	Rp 40.000,00		16
17		Rp 40.000,00	17	
18		Rp 40.000,00		18
19		Rp 40,000,00	19	
20		Rp 40.000,00		20
21		Rp 40.000,00	21	
22		Rp 40.000,00		22

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019)

Gambar diata merupakan salah satu contoh tanda terima uang transport yang terima oleh pengurus Kampung KB yang hadir dalam sosialisasi maupun penyuluh rutin yang dilakukan oleh dinas PPKB3PPA. Jumlah uang yang diterima masing-masing pengurus adalah sebesar Rp. 40.000,00 (*empat puluh ribu rupiah*).

b) Faktor Penghambat

1. Kurangnya Tenaga Penyuluh

Tenaga penyuluh Kampung KB atau dapat disebut sebagai pejabat fungsional penyuluh keluarga berencana adalah seorang pegawai negeri sipil (PNS) yangmemenuhi kualifikasi dan standar kompentensi serta diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengemabangan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluraga. Jabaran fungsional penyuluh keluarga mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan pelaksanaan setiap kegiatan yang terkait penyelenggaran Kampung KB seperti program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

Tugas jabatan penyuluh KB adalah melakukan pengelolaan program KKBPK yang meliputi penyuluhan, pelayanan,

penggerakan dan pengembangan dibidang pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga. Jenjang pangkat dan golongan untuk penyuluh Kampung KB yang tedapat pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tanah Grogot dan khususnya pada Kabupaten Paser, hanya mempunyai 2 (dua) tenaga penyuluh dengan jenjang penyuluh KB ahli pertama yaitu penata muda, golongan ruang III/a.

Sebagaimana peraturan yang diatur dalam Peraturan Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Peyuluh Keluarga Berencana, tenaga penyuluh dengan golongan III/a atau Penyuluh KB Terampil/Pelaksana yang memiliki tugas-tugas seperti, menyusun rencana kerja pendataan di tingkat desa/kelurahan, menyusun jadwal pendataan di tingkat desa/ kelurahan yang melipiti waktu, kegiatan, tempat lokasi, penanggung jawab. Selain itu, tugas dari penyuluh dengan golongan III/a Penyuluh Terampil/Pelaksana yaitu membuat peta wilayah kerja di tingkat desa/kelurahan, melakukan pendataan institusi masyarakat pedesaan (IMP), melakukan pendataan kelompok kegiatan (Poktan), melakukan rekapitulasi hasil pendataan,

melakukan KIE, melakukan pembentukan poktan bina keluarga balita (BKB), melakukan pembentukan poktan bina keluarga remaja (BKR), melakukan pembetukan poktan bina keluarga lansi (BKL), melakukan pembentukan poktan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS), melakukan pembentukan pusat informasi, menyusun rencana kerja mingguan Program KKBPK di wilayah binaan, menyusun rencana kerja bulanan program KKBPK di wilayah binaan, menyusun rencana kerja tahunan program KKBPK di wilayah binaan, melaksanakan pencatatan dan pelaporan program KKBPK di tingkat desa/kelurahan, membuat peta pendataan IMP di tingkat rukun warga, melakukan pengolahan data hasil.

Berdasarkan pernyataan diatas menengai fungsi, tugas dari penyuluh Kampung KB, terdapat banyak tugas-tugas yang harus dipenuhi dalam menjalakan sebagai penyuluh di Kampung KB. Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tanah Grogot hanya memiliki sebanyak 2 (dua) orang penyuluh yaitu Linda Shintiana, SKM, MPH dan Vevi Kristina. Jika dibandingkan dengan tugas yang harus dijalankan dengan jumlah Kampung KB yang sudah terbentuk di Kabupaten Paser sebanyak 21 dimulai dari tahun pembentukan 2016 sampai

dengan tahun 2019. Tentunya melihat adanya penyuluh hanya berjumlah 2 (dua) orang, menurut penulis bahwa tenaga penyuluh yang bertugas dalam melakukan penyuluhan, pembinaan terhadap Kampung KB binaan masih sangat kurang. Karena mengingat terdapat beberapa lokasi Kampung KB yang cukup jauh untuk dijangkau, sedangkan dinas hanya memilki 2 (dua) penyuluh dan otomatis mereka harus melakukan penyuluhan secara bergantian dengan waktu yang berdekatan antara Kampung KB satu dengan yang lainnya.

2. Jadwal Rutin

Salah satu faktor penghambat yang mendorong masyarakat mendapatkan misinformasi adalah jadwal rutin penyuluhan. Penyuluhan Kampung KB yang dilakukan Dinas PPKB3PPA menurut peneliti masih bersifat acak (*random*). Penyuluhan yang dilakukan pada saat ini yaitu khususnya sampai pada bulan Juni 2019 hanya melakukan total keseluruhan penyuluhan sosialisasi sebanyak 5 (lima).

Total sosialisasi yang dilakukan dinas dalam Kampung KB menemukan masih terjadi ketidaksiapan baik dari Dinas maupun pengurus Kampung KB. Ketidaksiapan dari dinas yang penulis temukan adalah penyajian oleh narasumber, persiapan

seperti alat pendukung kegiatan seperti alat proyektor yang rusak, dan bannner pelaksanaan. Ketidaksiapan lainnya yang dirasakan oleh pengurus juga menjadi perhatian oleh penulis adalah terdapat jadwal kunjungan sosialisasi Kampung KB secara mendadak pengurus Kampung KB tidak dapat mempersiapkan berbagai sarana dan prasarana selama berlangsungnya kegiatan didalam Kampung KB.

Sebagai contoh adalah pada Kampung KB di Desa Pepara yaitu "Sipakatuo" menyarankan agar diberitahu jauh-jauh hari dan tidak mendadak sehingga pada saat melakukan kegiatan Kampung KB Kepada Desa tidak berhalangan hadir karena disebabkan sudah terdapat jadwal lain. Pengurus Kampung KB di Desa Janju "Harapan Taka" mengungkapkan hal serupa dikarenkan kegiatan sosialisasi yang mendadak mengakibatkan jumlah pengurus yang hadir sangat sedikit. Pengurus yang hadir hanya berjumlah 8 (delapan) orang dari jumlah selurruh pengurus Kampung KB Harapan Taka yang berjumlah 46 orang. Tentunya ini dapat menjadi perhatian bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Tanah Grogot agar tidak melakukan kegiatan sosialisasi secara mendadak.

3. Sarana dan Prasarana

Salah satu faktor yang dapat menghambat penyelenggaran program Kampung KB adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana di dalam program Kampung KB termasuk didalam petunjuk teknis penggunaan dana bantuan operasional keluarga berencana (BOKB) yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 01 Tahun 2018. BOKB adalah belanja langsung berupa barang dan jasa untuk kegiatan operasional yang hasilnya dapat diserahkan kepada masyarakat.

BOKB dapat terdiri dari biaya operasional bagi balai penyuluhan KB seperti, biaya operasional penyuluhan KB, Biaya operasional pengolaham data, staff meeting dan rapat teknis yang termasuk menyediakan kosumsi rapat, transport atau narasumber, alat tulis kantor, biaya langganan daya dan ajsa, biaya pemeliharaan pengamanan balai penyuluh KB, dan biaya pengamanan balai penyuluh.

Bantuan operasional keluarga berencana (BOKB) terdapat biaya untuk dukungan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dan manajemen yang meliputi dukungan media KIE seperti penyediaan biaya untuk pengadaan media cetak (poster, umbul-umbul, pamflet, spanduk, standing banner, dan lain-lain).

Sedangkan, untuk dukungan manajeman dalam pengenolaan dana BOKB berupa biaya pembiyaan yang meliputi honorarium fasilitator kegiatan, dukungan administrasi antara lain penyedian alat ATK, rapat koordinasi, sosialisasi dan pengeloaan program KKBPK di Kabupaten maupun kota serta biaya pembinaan administrasi pengelolaan program dan anggaran oleh OPD bidang Dalduk dan KB Kabupaten dan Kota di balai penyuluh KB dan Kampung KB serta kader yang bergabung pada Kampung KB.

Penyelenggaran Kampung KB di Kabupaten Paser yang berkaitan dengan dana operasional keluarga berencana (BOKB) untuk Desa Pepara, Desa Sangkurima, Desa Janju,dan Desa Pondong hanya terdapat biaya dukungan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) hanya berupa standing banner yang terdapat disetiap balai Kampung KB.

Gambar 14. Standing Banner di Setiap Kampung KB

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019)

Dukungan administrasi yang berupa ATK dan biaya konsumsi makanan masih belum terlaksana pada Kampung KB tersebut. Salah satu dari pihak perwakilan Kampung KB menyarankan agar mereka mendapatkan dana bantuan berupa ATK dan lain-lain, yang nantinya akan digunakan untuk proses administrasi atau pencatatan segala kegiatan yang ada di Kampung KB. Selain itu biaya bantuan konsumsi makanan untuk penyuluhan, rapat dan kegiatan yang dijalankan rata-rata Kampung KB yang dibina menggunkan dana swadaya masyarakat. Swadaya memiliki arti sebagai partisipasi atau gotong royong membangun dengan

kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta peran masyarakat berupa tenaga dan barang yang dapat dinilai dengan uang atau iuran masyarakat. Dana swadaya masyarakat yang dikumpulkan oleh masyarakat setempat yang juga termasuk pengurus digunakan untuk keperluan untuk menyediakan makanan dan minuman baik untuk peserta maupun narasumber yang hadir pada saat melakukan penyuluhan dan kegiatan.

C. Analisis Data

1. Masalah-Masalah yang timbul

   Diskontinutitas dan diskoordinasi dalam penyelenggaraan pemberdayaan program kampung KB pada Kampung KB Desa Pepara, Desa Sangkuriman, Desa Janju dan Desa Pondong mengalami perbedaan sosialisasi yang sangat signifikan. Diskontinutitas dan diskoordinasi dengan rentang pelaksanaan atau disoreintasi dengan rentang birokrasi dan biaya operasional merupakan sebuah strategi dalam pemberdayaan masyarakat melalui sebuah program dengan relevansi teori terdahulu oleh (Prasojo, Eko. 2004) dengan judul People and Society Empowerment Prespektif Membangun Partisipasi Publik.

Analisis *Listing and prelimanary grouping* mengenai diskontinutitas dan diskoordinasi, rentang pelaksanaan dan birokrasi dan waktu (*time*) dalam masalah-masalah yang timbul karena disebabaan adanya faktor misinformasi yang mempengaruhi. Pertanyaan yang mengambarkan kondisi masalah-masalah yang timbul adalah bagaimana keberlangsungan program kampung KB yang berlangsung, bagaimana posisi dinas terait sebagai penyelanggara sekaligus penanggung jawab, serta pertanyaan mengenai tanggapan awal masyarakat atau pengurus Kampung KB yang berpartisipasi. Ekspresi yang relevan berupa daftar jawaban partsipan adalah sebagai berikut:

Bentuk diskontintutitas dan diskoordinasi dalam penyelenggaran Kampung KB sampai dengan tahun 2019 masih terdapat perbedaan yang terjadi dalam pelaksanaanya yang di konfirmasi oleh penyuluh lapangan yang mengungkapkan bahwa:

> "Sampai saat ini desa Kembang Renteng melakukan 20 kali dan rapat koordinasi sebanyak 12 kali, sipakatuo pembinaan sebanyak 18 kali dan rapat koordinasi sebanyak 6 kali, kampung kb harapan taka dan pesisir indah pembinaan baru sekali sampai dengan tahun 2019 sebelum kita kesana....."

Bentuk misinformasi pada Kampung KB Sipakatuo Desa Pepara yaitu Komposer Pupuk dan Makanan Nutrisi untuk Bayi yang diperkuat dengan adanya pernyataan langsung dari bidan yang menangani kasus tersebut yaitu Bidan Fitri.

> "....Kadang banyak masih yang belum tau mbak, tentang program ini, jadi ya mereka kira mereka juga dapat makanan tersebut, kami sebagai bidan ya mau ngga mau harus kasih juga, padahal ini Cuma untuk anak yg terkena indikasi kurang nutrisi dari lahir " (Hasil Wawancara, 2019).

Sedangkan untuk komposer pupuk pada Kampung KB Sipakatuo oleh karena faktor waktu (*time*) belum terlaksana selama 6 bulan dari sosialisasi pertama tentang komposer pupuk untuk Pengurus Kampung KB dan warga Desa Pepara. Selain itu, misinformasi yang peneliti dapatkan pada Kampung KB Kembang Renteng Desa Sangkuriman adalah penggunaan Pil KB yamg diperkuat dengan adanya pernyataan langsung dari Ketua Kampung KB Kembang Renteng yaitu Sahrudin yaitu:

> "....Nah, kamarin waktu pendataan tentang penggunaan KB banyak salah. Warga di kampung sini masih banyak yang belum menikah otomatis dia tidak berKB karena tidak mempunyai pasangan, Sebenaarnya ada kriterianya waktu pendataan kemarin, jadi warga sini dibilang banyak yang tidak berKB itu permasalahannya hampir 90% warga asli maupun pendatang memakai KB minimal jaraknya antara 3 sampai 4 tahun paling kecil jarak 1 ke 2. Ini sebnarnya ada konsultasi dahulu dari pihak kedesaan baru melakukan pendataan. Karena pergantian perangkat desa baru yang menyebabkan terjadinya kesalahan pahaman tersebut." (Hasil Wawancara, 2019)

Analisis *Reduction and elemination* merupakan sebuah ekspresi objek yang mengandung sebuah momen pengalaman penting dalam penelitian ini adalah adanya ungkapan langsung dari pengurus yang menganai kesalahan informasi dimasyarakat dengan ungakapan melalui

sebuah wawancara. Wawancara pada penlitian ini menggunakan sumber primer yaitu kepala dinas selaku penanggung jawab, ketua kampung KB terkait, penyuluh lapangan kampung KB, pengurus Kampung KB, staff, bidan dan kepala desa setempat.

Analisis *Clustering and thematizing the invariant constituent* merupakan menarik benang merah dari subyek yang diteliti bahwa dalam pelaksanaan program Kampung KB di Kabupaten Paser masih terdapat masalah-masalah yamg menimbulkan munculnya permasalahan-permasalahan yang lainnya. Sebagai contohnya adalah terjadi perbedaan dalam melakukan pembinaan yang dapat menculkan masalah baru bagi Kampung KB yang tidak mendapatkan pembinaan terlalu lama sehingga akan mucul permasalahan-permasalahan baik dalam berjalannya kampung KB tersebut sampai dengan masalah-masalah internal kepengurusan yang tidak terkoordinasi dengan baik.

Analisis *Validation* pengalaman subyek yang diteliti yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan partisipan dalam keikutsertaan dalam Kampung KB yaitu sesuai dengan pedoman wawancara pada lampiran.2 yaitu meliputi apa tanggapan bapak/ibu pertama kali mendengar kata Kampung KB, bagaimana tanggapan bapak ibu mengenai penyelenggaran Kampung KB pada desa ini, program apa saja yang berjalan selama ini pada desa ini, apa langkah dari dinas PPKBP3A dalam hal petugas lapangan, apa saja bentuk

kerjasama yang telah terjalain dengan lintas sektor, bagaimana tanggapan mengenai rentang birokrasi yang terdapat pada program Kampung KB.

Analisis *Individual textural description* yaitu penafsiran sebuah maksud dari interview atau catatan lapangan mengenai proses pemberdayaan program Kampung KB yang masih mengalami ketidakselaran dengan apa yang di inginkan pemerintah pusat maupun daerah setempat sebagai penyelenggara, tentu memiliki maksud tersendiri dalam pelaksanaanya. Contohnya adalah dalam interview dengan salah satu penyuluh Kampung KB yang mengeluhkan tentang ketersedian sumber daya manusia sebagai penyuluh lapangan untuk Kampung KB pun masih terbilang kurang sehingga tidak sebanding dengan banyaknya kampung KB yang terbentuk. Tentu saja hal tersebut menurut peneliti merupakan sebuah penuruan kualitas bagi keberlangsungan bagi sebuah program pemberdayaan bagi masyarakat sehingga dalam penuruanan kualitas layanan tersebut dapat berdampak bagi timbul nya masalah-masalah seperti diskontinutitas dan diskoordinasi, rentang pelaksanaa, waktu (*time*) dan rentang birokrasi yang megatur jalanya program tersebut.

Analisis *individual structural description* merupakan pengalaman dari deskripsi seorang individu dalam keikutserataan dalam kampung

KB pada penelitian ini merupakan sebuah alokasi pemikiran tindakan yang dilakukan oleh dinas penyelenggara yang membutuhkan dorongan penuh dari pusat, khsusunya pada penambahan alokasi sumber daya manusia yaitu penyuluh lapangan yang masih mengalami kekurangan. Pelaksanaan sosialisasi yang masih terdapat tidak merata dengan kampung kampung KB yang lain sehingga dapat menjadi sebuah masalah-masalah yang berujung pada ketidaksepahaman dengan berjalanya sebuah program. Program yang seharusnya dapat berjalan selama satu tahun tetapi karena terjadi diskoordinasi dengan pihak lintas sektor maka semakin besar peluang untuk masyarakat mengambil tindakan untuk menjalankan tanpa instruksi lebih lanjut dari penyelenggara.

Analisis *textural structural description* Pengalaman dalam penelitian ini terbentuk sebuah makna atau esensi bagi isu misinformasi yang akan menampilkan sebuah gambaran pengalaman kelompok dalam hal perwujudan program kampung KB yang ternayat di dalam pelaksanaanya masih terdapat isu-isu misnformasi yang dapat menjadi perhatian untuk program Kampung KB. Isu-isu misinformasi pada penelitian ini berkaitan dengan difusi informasi (*information diffusion*) yang digambarkan dalam pengalaman alur difusi informasi pada setiap misnformasi yang peneliti temukan di setiap Kampung KB yang menjadi objek penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kampung KB Sipakatuo Desa Pepara

Gambar.15 Model Difusi Misinformasi Kampung KB Sipakatuo

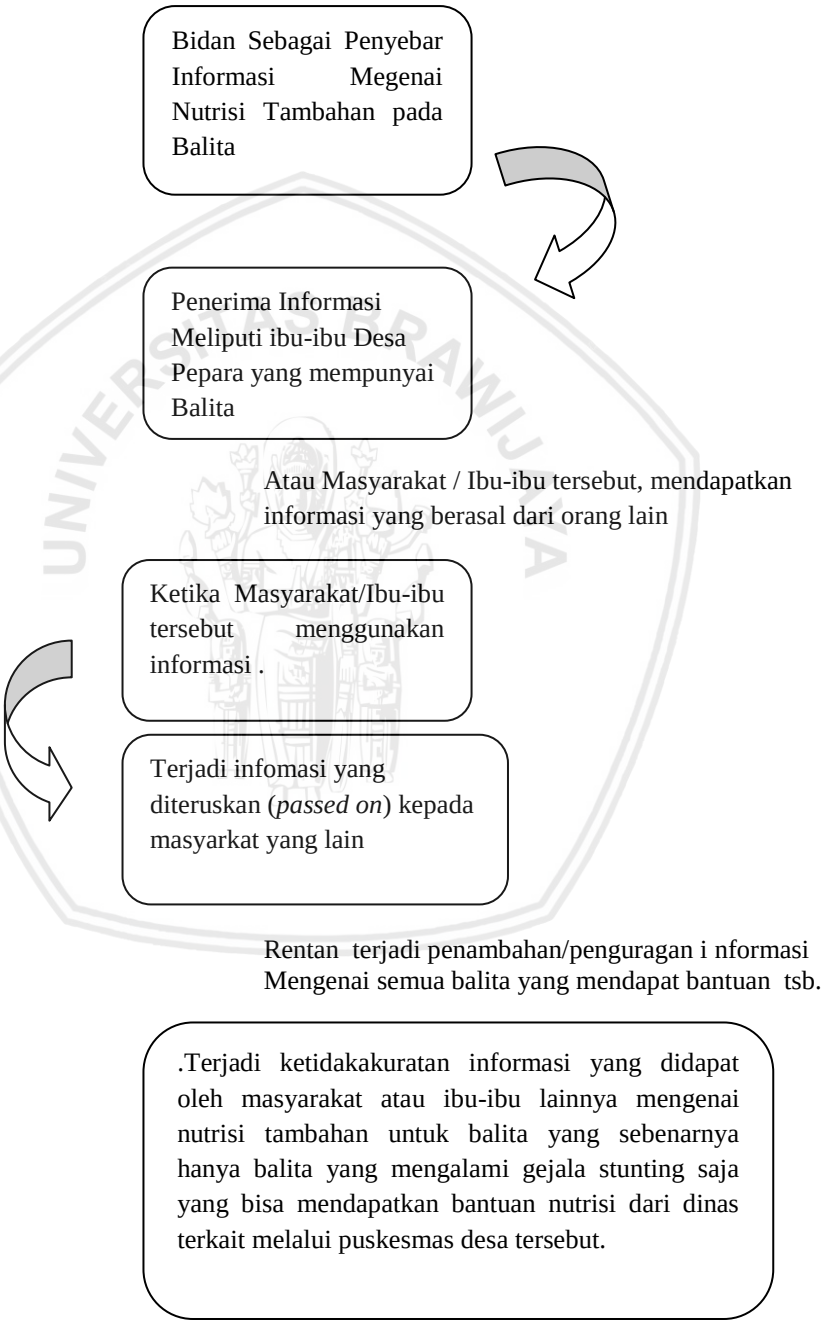

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019)

2. Kampung KB Kembang Renteng Desa Sangkuriman

Gambar.15 Model Difusi Misinformasi Kampung KB Kembang Renteng

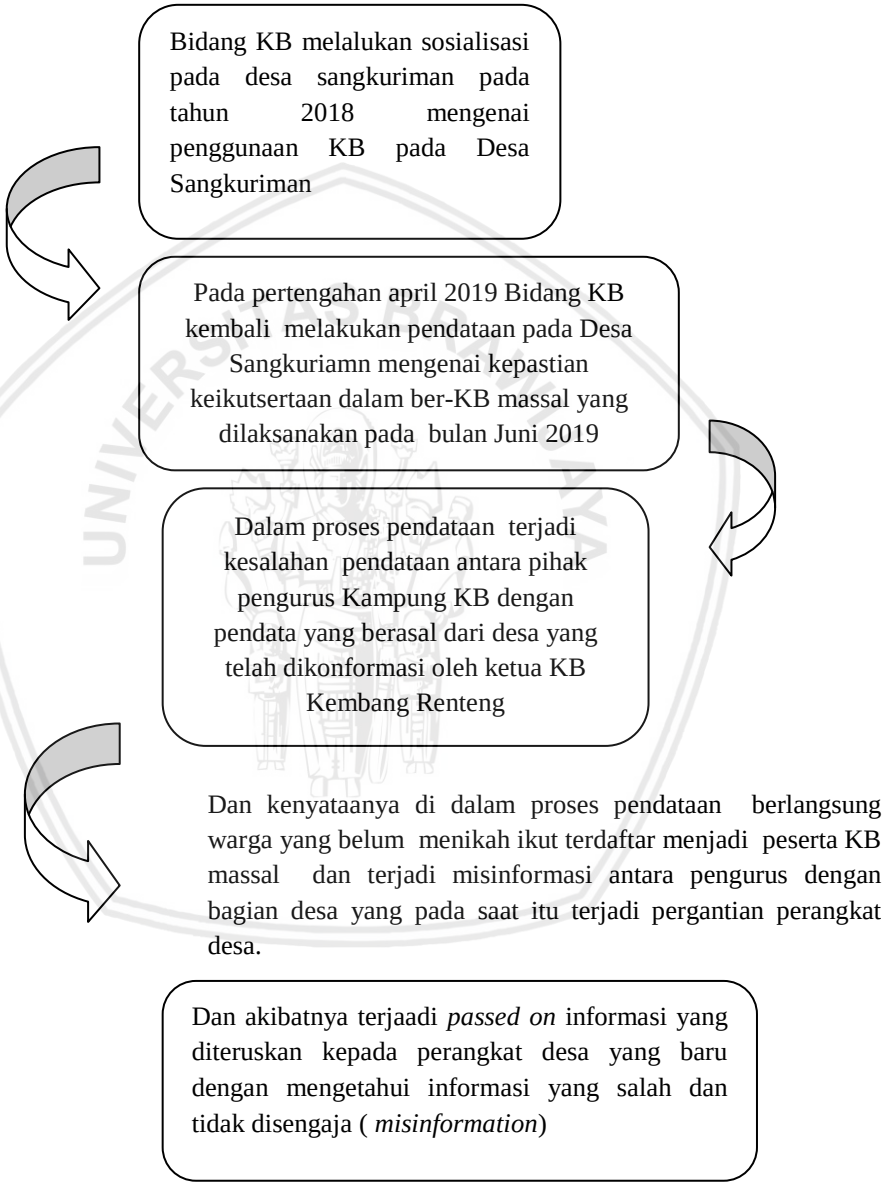

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019)

3. Kampung KB Harapan Taka Desa Janju

Gambar 16. Model Difusi Misnformasi Kampung KB Harapan Taka

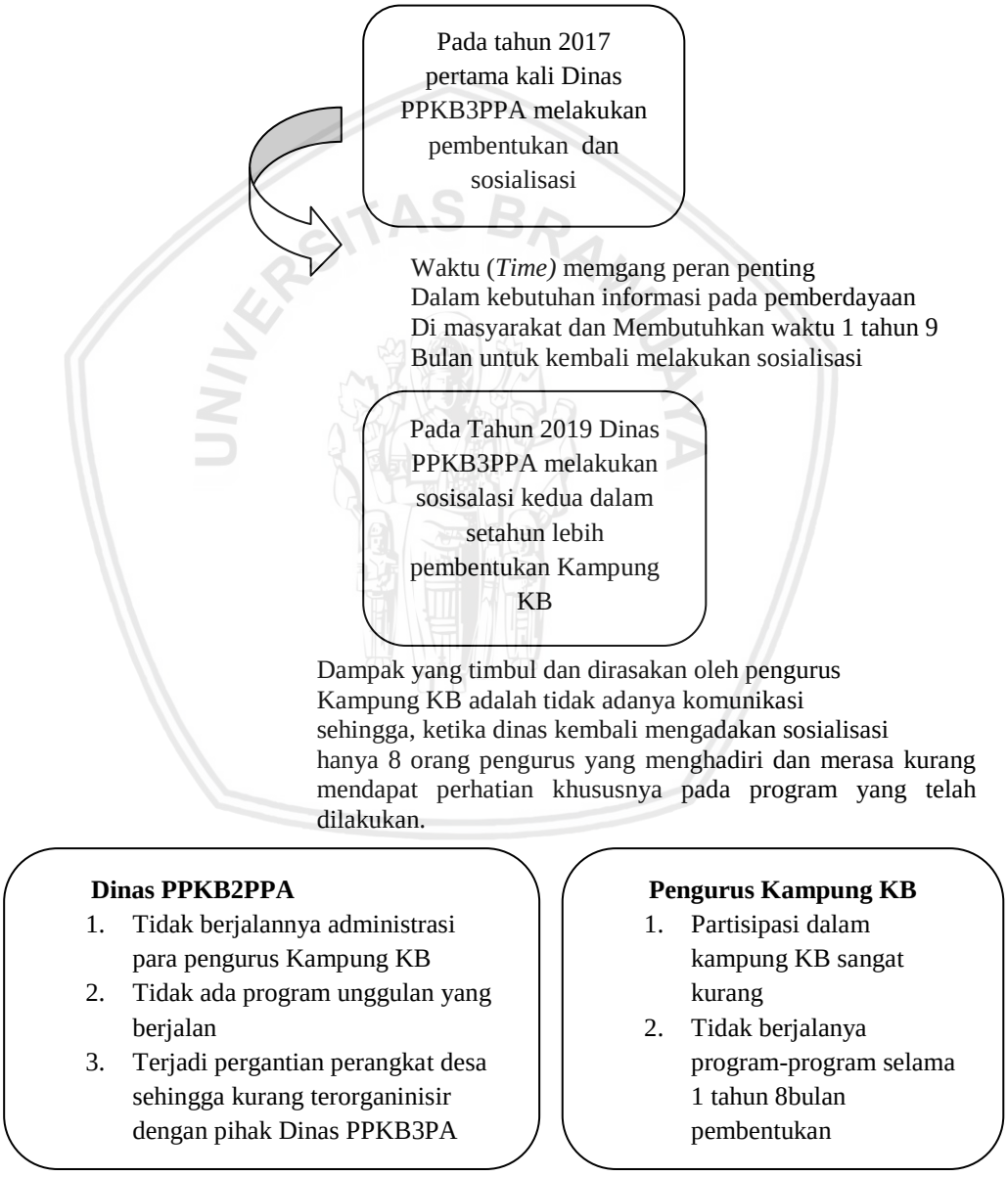

(Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2019)

4. Kampung KB Pesisir Indah Desa Pondong

Gambar 17. Model Difusi Informasi Kampung KB Pesirir Indah

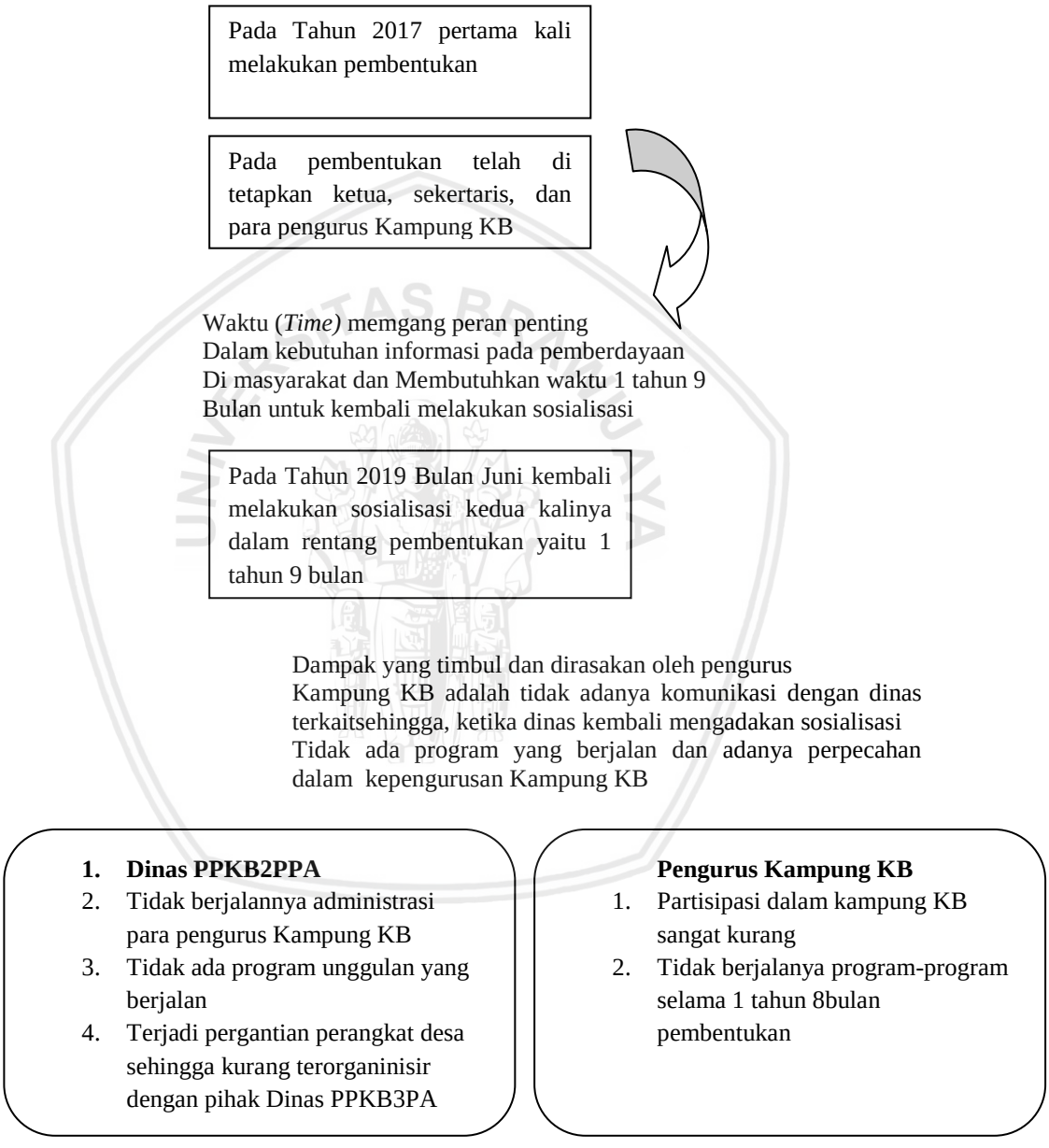

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019)

2. Peran Aktor

Analisis *Listing and prelimanary grouping* data mengenai peran aktor dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui program Kampung KB ialah meliputi kepala dinas, kepala desa petugas penyuluh, pengurus Kampung KB. Kepala Dinas dan Kepala Desa mempunyai peran yang penting sebagai pemangku kebijakan ditingkatan dinas dan perangkat desa dalam melaksanakan segala kegiatan dalam Kampung KB. Kegiatan program Kampung B tidak terlepas dari aktor sebagai penanggung jawab atas berlangsungnya program ini. Ekspresi pengalaman dengan pertanayaan-pertanyaan dengan aktor yang terlibat meliputi bagaimana peran aktor beraksi, peran aktor melakukan sosialisasi, peran aktor mendapatkan antusiasme dari pengurus atau anggota kampung KB dalam penyuluhan maupun pembinaan sebuah program khusus. Berikut ekspresi dalam wawancara dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tanah Grogot mengenai penyelenggaraan Kampung KB di Kabupaten mengungkapkan bahwa:

> "... penyelenggaran Kampung KB di Paser ini sih.. masih banyak kekurangan yang kita alami... disini kita punya 10 kecamatan dan banyak desa juga yang lumayan jauh seperti kec. Tanjung Harapan harus pake kapal kita kesana. Yaaa..... jadinya melihat juga tenaga penyuluh kami yang hanya berjumlah 2 orang dan dibantu beberapa staf dan masing-masing bidang di dinas itu

> pun juga tidak sebanding dengan banyaknya Kampung KB di Paser ini....terus juga sama sarana & prasarana disini masih kurang....”

. Keadaan lapangan melalui pengakuan dari salah satu penyuluh yiatu Ibu Linda yang menyakikan bahwa kepala desa menolak pembentukan dalam program tersebut mengungkapkan bahwa :

> “...dari dinas aja ditolak mbak.. sampai-sampai mereka langsung memgirim surat penolakan yang langsung ditanda tanganin kepala desanya ” (Hasil wawancara, 2019)

Menurut Tuti Selaku Kasi Keluarga Berencana meungkapkan bahwa mendapat informasi berupa adanya gesekan pribadi yang terjadi antara Kepala Desa Desa Pondong dengan Ketua Kampung KB Desa Podnong “Pesisir Indah” mengungkapkan bahwa:

> “Mereka punya masalah pribadi waktu dulu nyaleg-nyaleg gitu.. jadinya ada masalah pribadi kurang enak gitu.. nah lama sudah kita ga ke pondong.. coba kita lihat masihkah mereka begitu.. semoga aja engga ya.. biar Kampung KB Podong jalan kesian disitu-situ aja dari dulu...” (Hasil Wawancara, 2019)

Dalam perihal petugas penyuluh lapangan Kampung KB dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tanah Grogot selama ini menurut Kepala Dinas masih sangat kurang dan tidak sebanding dengan jumlah Kampung KB yang ada di Kabupaten Paser. Menurut salah satu penyuluh Kampung KB yaitu Vevi mengungkapkan bahwa:

> ".....iya mba kita kurang penyuluh masa cuma dua penyuluh dari banyaknya desa di Paser ini.... mungkin nanti kedepannya bisa ditambah jadinya kita enak membagi bagian-bagian mana aja. (Hasil Wawancara, 2019).

Dalam penelitian yang dilakukan terdapat pengurus yang berjalan dengan lancar dan aktif dan pengurus yang tidak berjalan dan tidak aktif. Seperti yang penulis temukan dilapangan pada pengurus Kampung KB Desa Janju yaiu Kampung KB Harapan Taka yang diungkapkan langsung oleh Ketua Kampung KB tersebut bahwa:

> "Kampung KB ini masih belum baik... masih banyak kurang dari pengurus saja lihat yang datang cuma 8 orang... terus juga saya lihat Kampung KB kita ini potensinya besar sayang kalau enda dilanjutkan..... tapi tadi kita sudah koordinasi sama ibu bene buat administrasi kepengurusan kita biar lebih aktif lagi.. dan kita juga mau sering-sering konsultasi kekantor di grogot biar tidak ada kesalahpahaman lagi...." (Hasil Wawancara, 2019)

Analisis *reduction and elemination* merupaan ekspresi objek yang diteliti pada peran aktor dalam proses pemberdayaan masyarakat desa melalui program Kampung KB masih terdapat kekurangan sumber daya manusia dalam segi peyuluh lapangan, kekurangan sumber daya manusia dalam hal partisipasi dalam mengikuti pembinaan, kekurangan dukungan yang diberikan dari pihak desa kepada program ini, serta lintas sektoral yang tidak melanjutkan program yang telah dijalankan sehingga program tersebut tidak terkoordinasi dengan baik sehingga mengandung momen pengalaman penting bagi penelitian ini.

Analisis *clustering and thematizing the invariant constituent* kesimpulan dalam hal peran aktor yang terlibat pada penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan dalam tindakan yang dilakukan sehingga terjadi sebuah alur pemberdayaan yang tidak selaras antara dinas terkait dengan pengurus kampung KB yang terlibat. Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan subyek penelitian yang diteliti meliputi bagaimana peran aktif dari masing-masing aktor seperti kepala dinas, kepala desa, ketua Kampung KB, pengurus Kampung, penyuluh Kampung KB dan lintas sektoral yang terlibat guna dalam membangun kampung KB selama pembentukan dari 2016 di Kabupaten Paser Kalimantan Timur.

Analisis *validation* merupakan membuat pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian mengenai peran aktor yang telibat seperti apa langkah dari dinas (PKKBP3A) dalam petugas lapangan, bagaimana dinas memberikan sosialisasi dan pembinaan bagi kampung KB, apa tanggapan dinas mengenai masyarakat desa yang tidak mau berpartisipasi dalam program ini, dan harapan kedepanya bagi program Kampung KB di Kabupaten Paser. b

Analisis *individual textural description merupakan* sebuah penafsiran dari semua interview dan catatan lapangan dari jawaban untuk rumusan masalah mengenai peran aktor dalam penelitian ini adalah peranan aktor khsuusnya dari pihak desa yang meliputi kepada

desa dan pengurus masih kurang bisa menerima program ini seperti pada Kampung KB Harapan Taka dan Pesisir Indah yang kepala desa dan pengurus masih adanya partisipan yang harus didorong dengan kekuatan dari dinas untuk bertindak selama peneliti melakukan penelitian. Tentunya hal tersebut dapat menjadi sebuah alasan terpenting bagi proses pemberdayaan masyarakat pada saat ini agar dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan-hambatan yang terjadi sehingga dapat memberikan kerugian bagi pelaksannaan program Kampung KB yang berjalan pada desa tersebut.

Analisis *individual stuctural description* pengalaman sebagai peneliti dalam penelitian ini dalam mendeskripsikan segala susuanan pengalaman yang peneliti dapatkan dari program Kampung KB adalah bagaimana harus adanya satu kesatuan antara dinas penyelenggara dengan pihak desa, lintas sektoral maupun masyarakat sekitar desa tersebut agar dalam proses awal pembentukan program ini dapat benar-benar disetujui dan mendapat antusiasme dalam pelaksanaanya, sehingga dalam proses pembinaan maupun sosialisasi terdapat integritas yang kuat antara dinas penyelenggara dengan masyarakat untuk membangun, mengembangkan program ini agar manfaat dari program ini dapat dirasakan oleh seluruh pengurus atau masyarakat.

Analisis *textural structural description* merupakan sebuah gambaran peran aktor yang meliputi kepala dinas, kepala desa, petugas

penyuluh, pengurus kampung KB dan kerjasama lintas sektoral pada pada penyelenggaraan Kampung KB yang ada di Kabupaten Paser meliputi 4 (empat) desa yaitu Desa Pepara dengan nama Kampung KB "Sipakatuo", Desa Sangkuriman dengan nama Kampung KB "Kembang Renteng", Desa Janju dengan nama Kampung KB "Sipakatuo" dan Desa Podong dengan nama Kampung KB " Pesisir Indah" masih terdapat kekurangan baik dalam kebijakan tegas dari kepala dinas mengenai pelaksanaan kampung KB dan petugas penyuluh , keputusan kepala desa, partsipiasi Kampung KB dan kerjasama lintas sektoral yang masih kurang maksimal dalam memberikan kerjasama kepada pengurus Kampung KB. Oleh karena itu, peran aktor sangat mempengaruhi indikator keberhasilan sebuah Kampung KB yang mempunyai titik berat terhadap peran aktor dalam keberhasilan penyelenggaran Kampung KB dengan mengacu pada penelitian terdahulu yaitu Mardiyono Tahun 2017 dengan Judul Kampung KB sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat/Keluarga di Jawa Timur Studi di Kota Malang dan Kabupaten Bondowoso.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat

Analisis data mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat dalam upaya menghadapi misinformasi dalam pemberdayaan masyarakat melalui program Kampung KB. Dalam penelitian ini faktor pendukung

yang meliputi kerjasama lintas sektoral dan peraturan tentang biaya operasional dalam Kampung KB berlandasakan pada konsep pemberdayaan masyarakat menurut Suharto dalam Mardikanto dan Soebianto (2013), yang mengungkapkan bahwa salah satu aspek penting didalam pemberdayaan masyarakat ialah adanya pembangunan dan pengembangan jaringan pada kelompok swadaya masyarakat guna meningkatkan kemampuan masyarakat dengan menyediakan akses terhadap sumber dan kesempatan yang sama bagi peningkatan pemberdayaan masyarakat kurang mampu.

Analisis *Listing and prelimanary grouping* yang relevan dengan pengalaman penelitian mengenai fakor pendukung dan penghambat dalam penelitian ini mendapat gambaran berjalannya program Kampung KB di Kabupaten Paser karena faktor pendukung dan penghambat ini muncul tentunya dikarenakan adanya tekanan yang mendesak agar kedepanya program kampung KB di Kabupaten Paser dapat dievaluasi lebih kembali. Pengalaman peneliti dalam melakukan penelitian di beberapa Kampung KB di beberapa desa di Kabupaten Paser mendapat jawab yang berasal dari beberapa partisipan dilapangan seperti sarana dan prasarana yang masih sangat kurang dalam mendukung proses administrasi Kampung KB itu sendiri, penyuluh yang masih kurang, dan jadwal melaksanakan sosialisasi maupun penyuluhan masih acak (*random*).

Faktor terpenting dalam pendukung kegiatan program Kampung KB di Kabupaten adalah adanya kerjsama lintas sektoral antar dinas yang dikonfirmasi langsung dengan kepala dinas dan adanya biaya untuk transportasi setiap pengurus untuk mengikuti pelaksanaan program tersebut.

> " Selama ini sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan lintas sektor, memang kita kan harus ada kerjasama.. kemarin ada bantuan dari dinas pertanian, dinas ketahanan pangan, dinas kesehatan, terus ya pengurus Kampung KB yang juga dapat merasakannya... pokokny ada untungnya ikut Kampung KB.... (Hasil Wawancara, 2019)

Berikut hasil wawancara dengan Linda sebagai salah satu penyuluh lapangan Kampung KB yaitu:

> ".... Ya sebenarnya kurangnya penyuluh dari dinas yang jadi salah satu faktor kita ngga bisa melakukan sosialisasi secara rutin, secara kami hanya ada dua orang penyuluh... dibanding dengan jumlah Kampung KB yang ada 21 di Kab. Paser" (Hasil Wawancara, 2019).

Hasil wawancara dengan Vevi sebagai salah satu penyuluh lapangan Kampung KB yaitu:

> "..... iya mba kita kurang penyuluh masa cuma dua penyuluh dari banyaknya desa di Paser ini.... mungkin nanti kedepannya bisa ditambah jadinya kita enak membagi bagian-bagian mana aja. (Hasil Wawancara, 2019).

Analisis *reduction and elemination* merupakan sebuah ekspresi pengalaman dari objek peneliti mengandung momen pengalaman yang

baik dalam penelitian ini karena sifatnya membantu peneliti untuk menemukan masalah-masalah yang terjadi khususnya pada faktor pendukung dan penghambat dalam penelitian ini. Ekspresi yang dihadirkan pengurus dalam faktor penghambat yang menjadi sorotan peneliti adalah saat mereka mengekspresikan tentang jadwal rutin yang berhubungan dengan diskontinutitas dan diskoordinasi yang masih acak dan seringkali mendadak sehingga dalam proses pelaksanaanya kurang maksimal. Hal lain juga yang menjadi ekspresi dalam pengalaman ini adalah adanya tindakan dari sisi sumber daya manusia pengurus yang dimana masih terdapat masalah-masalah pribadi dan berdampak bagi keberlangsungan proses pemberdayaan masyarakat tersebut.

Analisis *clurstering and thematzing the invariant constituent* merupakan kesimpulan dari beberapa ekspresi yang peneliti dapatkan dalam penelitian yang berhubungan dengan tindakan manusia sebagai pengalaman yang peneliti dapatkan berupa masyarakat masih belum dapat membedakan antara kepentingan bersama untuk mencapai tujuan dan kepentingan pribadi. Menurut peneliti hal tersebut berhubungan dengan partisipasi masyarakat dan tindakan masyarakat tersebut untuk membangun dirinya sendiri menjadi lebih baik. Sehingga akan muncul sebuah kesadaran dini bagi masyarakat tersebut kedepanya agar lebih kritis dan lebih paham dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah sepenuhnya akan memberikan sebuah manfaat yang berguna.

Analisis *validation* merupakan ertanyaan-pertanyaan dalam hal ini yang berhubungan dengan faktor pendukung dan penghambat adalah apa hal-hal yang kecil yang dapat membangun dan mendorong serta apa hal-hal yang menjadi sorotan dalam proses pemberdayaan masyarakat di Kampung KB ini. Dalam validasi ini peneliti memberikan pertanyaan kepada penyuluh tentang bagaimana mengatasi 21 Kampung KB di seluruh wilayah Kabupaten Paser dan pertanyaan kepada para pengurus masing-masing Kampung KB yang menjadi objek penelitian tentang bagaimana sosialisasi biasanya berlangsung dna hal apa saja yang masih kurang dari pelaksanaanya.

Analisis *individual textural description* penafsiran dari wawancara dan catatan lapangan yang dimiliki peneliti mempunyai maksud baik dalam penelitian ini, seperti masukan-masukan terhadap kerja dari dinas terkait untuk menjadi sebuah evaluasi bagi dinas untuk menjadi lebih baik agar didalam penyelenggaranya tidak ada terdapat masalah-masalah yang dapat memberikan dampak bagi keberlangsungan program tersebut berjalan. Penafsiran wawancara ekspresi diatas merupakan gambaran pengurus Kampung KB yang sudah mendapat bantuan tetapi bantuan tersebut tidak dapat digunakan karena bantuan tersebut melewati dari batas pemakaianya. Sedangkan hasil wawancara dengan dua penyuluh Kampung KB peneliti dapat tafsirkan bahwa menjadi seorang penyuluh Kampung KB itu tidak mudah dan mereka masih sangat membutuhkan bantuan

khsusunya sumber daya manusia tambahan bagi alokasi penyuluh lapangan untuk Kampung KB di Kabupaten Paser.

Analisis *indvidual structural description* merupakan penyusunan dari semua deskripsi pengalaman yang peneliti dapatkan pada penelitian ini guna mendapatkan sebuah pengalaman manusia dalam menjalankan program Kampung KB adalah adanya pengalaman dari masyarakat agar kedepanya Kampung KB agar mempunyai jadwal rutin sendiri, sarana dan prasarana lebih ditingkatkan, dan penyediaan uang transportasi sebagai faktor pendukung dapat dipertahakan agar masyarakat atau pengurus yang termasuk dalam kepengurusan Kampung KB lebih semangat dalam membangun Kampung KB kedepanya menjadi lebih baik. Hal lain yang menjadi sebuah pengalaman adalah masyarakat dari beberapa desa mengeluhkan hal ketidaksiapan dari dinas untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan sehingga sosialisasi pada saat itu harus dibatalkan karena ketidak siapan narasumber.

Analisis *textural structural description* berdasarkan gambaran pada faktor pendukung dan penghambat dalam upaya menghadapi misinformasi dalam pemberdayaan masyarakat melalui program Kampung KB dengan relevansi penelitian terdahulu oleh Ulumiyah, Ita & Dkk Tahun 2013 tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.

4. Pengembangan (*Misinformation Solution)*

Pengembangan dalam konteks *misinformation solution* dalam hal ini mengacu pada posisi dinas penyelenggara sebagai penanggung jawab atas semua aktivitas, segala kegiatan maka solusi misinformasi yang peneliti berikan adalah adanya kesiapan yang benar-benar dan berani bertanggung jawab atas segala aktivitas dalam program tersebut baik program tersebut berhasil maupun dikatakan mati suri. Artinya apabila beberapa desa yang semestinya belum siap melakukan program Kampung KB yang dapat dilihat dari partisipan warga sekitar desa tersebut, maka sebaiknya dari pihak dinas tidak harus memaksakan untuk membentuk program tersebut sehingga tidak ada paksaan bagi warga sekitar yang akibatnya dapat di lihat pada Kampung KB Desa Janju dan Kampung KB Desa pondong yang dikatakan mati suri dengan berbagai macam masalah didalamnya.

Solusi misinformasi yang dapat dilakukan khususnya pada dinas lintas sektoral yang menjalin kerjsama dapat konsisten kepada program yang telah diberikan kepada masyarakat, sehingga tidak ada terjadi kesalahan-kesalahan yang dikarenakan tidak adanya diskontinutitas atau keberlanjutan dari program tersebut yang mengakibatkan pengurus atau masyarakat setempat tidak meneruskan program tersebut. Konsisten dan berkelanjutan merupakan kunci utama menurut penulis untuk solusi misinformasi dalam konteks ini masyarakat dan dinas penyelenggara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Upaya Menghadapi Misinformasi Pada Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Program Kampung KB studi pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kota Tanah Grogot adalah sebagai berikut:

1. Masalah-masalah yang terjadi yang menimbulkan faktor terjadinya misinformasi yang terjadi dalam penyelenggaraan program Kampung KB pada Desa Pepara, Sangkuriman, Janju dan Pondong ialah adanya diskontinutitas dan diskoordinasi kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan Kampumg KB, diorientasi dan rentang pelaksanaan sosialisasi yang berbeda-beda atau tidak mendapat pemerataan antara Kampung KB satu dengan yang lainnya, peran waktu (*time*) dalam jangka waktu ingatan pada seseorang yang dapat mempengaruhi daya ingatan seseorang terhadap apa yang disampaikan dalam jangka waktu yang cukup lama serta rentang birokrasi dan

biaya operasional yang berjalan dalam pelaksanaan program Kampung KB pada Kabupaten Paser.

2. Dalam upaya menghadapi misinformasi dalam pemberdayaan program Kampung KB, peran aktor mempunyai peran yang sangat vital dalam berlangsungnya suatu program dimasyarakat. Peran kepala dinas sebagai penangung jawab, monitoring, dan mengevaluasi atas segala kegiatan pelaksanaan prorgam yang berjalan pada desa diseluruh Kab.Paser, Peranan penyuluh lapangan sebagai aktor yang berperan dalam proses pelaksnaaan secara teknis lapangan dan mengerti segala bentuk partisipatif masyarakat dalam membangun program tersebut. Lalu, kepala desa yang berperan sebagai pelindung utama dalam berlangsungnya program Kampung KB pada desa-desa tersebut. selain itu, pengurus Kampung KB memiliki peranan yang sangat aktif dalam berlangsungnya perkembangan, kemajuan serta kesinambungan antara pihak pengurus dengan warga sekitar serta dapat menjalin kerjasama dengan berbagai lintas sektor pemerintahan yang dapat memberikan perubahan bagi warga masyarakat desa tersebut.
3. Sebagai upaya dalam menghadapi misinformasi dalam pemberdayaan masyarakat melalui Kampung KB faktor pendukung dan penghambat merupakan hal yang sangat

menentukan arah selanjutnya dari program tersebut. kerjasama lintas sektoral, biaya operasional merupakan faktor pendukung dari berjalannya program Kampung KB pada Kabupaten Paser sampai saat ini. Sedangkan, petugas penyuluh lapangan, jadwal rutin, dan sarana & prasarana merupakan faktor penghambat yang dapat mempengaruhi proses pemberdayaan masyarakat melalui program Kampung KB. Kedua faktor tersebut dengan masing-masing sub faktor yang terlibat didalamnya dapat memberikan sebuah evaluasi kedepannya untuk Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser agar lebih memperhatikan faktor pendorong dan faktor penghambat, yang sebagaimana mestinya peneliti tuangkan dalam BAB Pembahasan mengenai jawabaan atas pokok permasalahan yang peneliti ambil untuk penelitian ini mengenai Upaya Menghadapi Misinformasi dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung KB Studi Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas mengenai jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan saran mengenai jawaban rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Adapun saran yang diberikan peneliti sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan Program kampung KB di Kabupaten Paser dalam kenyataanya masih terdapat diskontinutias dan diskoordinasi yang seharusnya dari pihak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser, dapat melakukan sosialsiasi secara merata dan adil kepada seluruh Kampung KB yang ada di Kabupaten Paser. Perlu adanya tindakan tegas dari kepala dinas selaku penanggung jawab atas segala perintah sosialisasi yang berjalan, dan juga adanya kesiapan dari dinas sendiri dalam melaksanakan sosialisasi maupun pembinaan kepada seluruh pengurus Kampung KB. Disoreintasi atau rentang pelaksanaan dalam pemberdayaan pada Kampung KB, dapat lebih ditegaskan dalam perihal undang-undang atau landasan yang dimiliki program Kampung KB sendiri guna menghindari penolakan-penolakan dari desa yang ingin diselenggarakan program Kampung KB.

Waktu (*time*) memiliki peran penting dalam proses ingatan seseorang oleh karena itu, pihak dinas harus lebih memperhatikan bentuk-bentuk kegiatan yang sudah disosialisasikan atau sudah melakukan pembinaan untuk mengevaluasi kembali kegiatan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai bagiamana dan seharusnya program tersebut ditargetkan maupun di harapakan untuk jangka waktu yang lama. Dalam proses ini waktu adalah yang memegang penting karena jika dinas terlalu lama tidak melakukan monitoring ataupun mengevaluasi segala bentuk kegaiatan maka akan rentang terjadi kesalahpahaman informasi yang diterima baik oleh pengurus ataupun masyarakat yang melaksanakan pemberdayaan program tersebut.

2. Peran aktor yang terlibat dalam Kampung KB merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terlepas antara kepala dinas dengan penyuluh, penyuluh dengan kepala desa, lalu kepada desa dengan para pengurus atau kader. Perlu adanya kerjasama yang baik, komunikasi yang baik dan menjadi satu kesatuan antara dinas dengan berbagai desa yang diwakili oleh kepala desa yang juga harus memberikan dukungan penuh yaitu dengan adanya penyelenggaran program Kampung KB sebagai salah satu program pembangun secara nasional untuk seluruh

masyarakat di Indonesia. Sebagai peran aktor yang megang kendali dalam program ini khususnya pada dinas terkait agar lebih dapat mempersiapkan lebih baik dan matang lagi dalam penyelanggaranya agar tidak terjadi kondisi mendadak melaksanakan sosialisasi sehingga mengakibatkan narasumber yang tidak dapat menghadiri sosialisasi dan berujunng pembatalan sosialisasi.

3. Perlu adanya penambahan penyuluh lapangan yang sangat dibutuhkan dan juga perlu adanya lebih banyak kader-kader yang membantu dalam proses penyelenggaran Kampung KB, sehinga penyuluh akan lebih terbantu dengan adanya kader-kader yang berpatisipasi sebagai masyarakat sukarela dan membantu berjalannya program Kampung KB. Selain itu, perlu adanya jadwal rutin yang dapat dirancang dari dinas untuk melakukan sosoalisasi atau pembinaan dalam sebulan yaitu 3 kali melakukan sosialiasi atau pembinaan. Selain itu, prasarana dan sarana bagi kebutuhan Kampung KB seperti banner, alat tulis untuk proes adaministrasi lebih di perhatikan dan dilengkapi serta dari pihak dinas dapat membuat sebuah video dokumenter pendek pada setiap kegiatan agar dapat melihat dari waktu kewaktu progress Kampung KB selain melalui foto.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Raharjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Bachri, Bachtiar. 2010. *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif*. Universitas Negri Surabaya. Surabaya

Bakrie, Maskuri. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat*: *Pendekatan RRA dan PRA*. Surabaya: Visipress Media

Buckland, Michael. 1991. Information and Information Systems. *ProQuest*. pp. 225. Diakses pada 17 Desember 2018 melalui https://search.proquest.com/docview/1290727123/A79BC4E738B343FFPQ/1?accountid=46437

Bundy, Alan. 2004. Australian and New Zealand Institute for Information. Literacy. Diakses pada 2 November 2018 melalui ***http://www.utas.edu.au/__data/assets/pdf_file/003/79068/anz-info-lit-policy.pdf*)**

Cheerli, & Susanti, I. C. (2017). Kampung KB Upaya Nyata Membangun Bangsa, 63. Retrieved from http://fp2020indonesia.org/document#

Diurna, A., & No, V. I. I. I. (2014). SOSIALISASI PEMERINTAH DESA TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN KEPADA MASYARAKAT DESA MARIRI LAMA KECAMATAN POIGAR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Oleh : Felda Juwita Robot (Email : juwita.felda@yahoo.com) Norma Mewengkang (email : norma_me, *III*(2).

Eggen, Paul. 2012. *Strategi dan Model Pembelajaran: Mengajarkan Konten dan Keterampilan Berpikir*. Jakarta: PT Indeks

Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitattif*: Teori dan Praktik Jakarta:

Bumi Aksara

Goswami, P. R. (2005). World Library and Information Congress : 71th IFLA General Conference and Council " Libraries - A voyage of discovery " Government Publications and Information Dissemination : Indian Scenario, (January), 1–17.

Goyena, R. (2019). 済無 No Title No Title. *Journal of Chemical Information and Modeling*, *53*(9), 1689–1699. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Karlova, N. A., & Fisher, K. E. (2013). A social diffusion model of misinformation and disinformation for understanding human information behaviour. *Information Research*, *18*(1), 1–17.

Kementerian Kesehatan RI. (2018). Kampung KB : Inovasi Strategis Memberdayakan Masyarakat. *19 Maret*, (4), 1. https://doi.org/351.077

Ulumiyah, I., Gani, A. J. G., & Mindarti, L. I. (2013). Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, *1*(5), 890–899.

Lasswell, Harold D. The Person: Subject and Object of Propaganda. Sage Journals. pp. 187. Diakses pada 14 November 2018 melalui *https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/000271623517900124*

Long, Norman. 1987. *Pengantar Sosiologi Pembangunan Pedesaan*. Jakarta: Bina Aksara

Mardikanto, Totok. 2013. Pemberdayaan Masyarakat dalam Prespektif Kebijakan Publik. Bandung Alfabeta

Mardiyono. 2017. Kampung KB Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat/Keluarga Di Jawa Timur. *Jurnal Cakrawala*, 11(02), pp. 129-136. Di akses pada 16 November 2018 melalui *http://cakrawalajournal.org/index.php/cakrawala/article/viewFile/13/13*

Mikhael Wurangian. (2005). Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat, *1*, 1–12.

Moleong, Lexy. J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Mulyana, Deddy. 2013.*Metodelogi Penelitian Kualitatif*:Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Moh. Nasir, 2005. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Nasution, 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito

Nurul Hidayah, Seventina. 2018. Implementasi Program Kampung KB Sebagai Strategis Pencegahan 4T (4 Terlalu) Dalam Kehamilan di RW 10 Margadana Tegal. Jurnal Kebidanan, 08(02), pp. 130-138.Di akses pada 17 November 2018 melalui *http://ejournal.poltekkes-smg.ac.id/ojs/index.php/jurkeb/article/view/3742*

Pujileksono, Sugeng. 2015. *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Malang: Kelompok Intrans Publishing

Pranaka dan Vidhyandika, 1996. Pemberdayaan dalam Onny S.P dan AMW. Pranarka (ed). *Pemberdayaan Konsep, dan Implementasi*. Jakarta: Center For Strategic and International Studies (CSIS).

Prasodjo, Eko. 2004. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik. Diakses pada 2 Desember Melalui *http:/administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/340/194*

Ruben, Brent. D, 1998. *Communication and Human Behavior*. America: A Viacome Company

Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Sadler, E., & Given, L. M. (2007). Affordance theory: A framework for graduate students' information behavior. *Journal of Documentation*, *63*(1), 115–141. https://doi.org/10.1108/00220410710723911

Sukardi, 2006. *Penelitian Kualitatif-Naturalistik Dalam Pendidikan*. Jakarta: Usaha Keluarga

Sunders, J (2012*). The role of self-stem in the misinformation effect*. Memory, 20, 20-99

Nomor, U., Nomor, R. I., Kedua, P., & Negara, L. (2018). untuk.

Utomo, S.B 2009. *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Akademik Mahasiswa Berbasis Sms Gateway*, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Darwan Alim Kalimantan Tengah

Schmidt, Vivien A. (2008). Discursive Instituionalism: The Explanatory Power of Ideas and Discourse. *Annual Review of Political Scienc*. pp. 303-306. Di akses pada 21 Desember 2019 melalui nnualreviews.org/doi/10.1146/annurev.polisci.11.060606.135342

Widjajanti, K. (2011). Jurnal Ekonomi Pembangunan Model pemberdayaan masyarakat, *12*.

Yusup, Pawit M. 2012. *Perspektif Manajemen Pengetahuan Informasi. Komunikasi, Pendidikan, dan Perpustakaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Yusup, Pawit M. 2009. *Ilmu Informasi Komunikasi dan Kepustakaan*. Jakarta: Bumi Aksara

Zacharias, Danny. 1984. *Metodelogi Penelitian Pedesaan*. Jakarta: CV Rajawali

Zubaedi. 2013.*Pengembangan Masyarakat*: Wacana dan Praktik. Jakarta: Prenadamedia Group.

_____. Diakses pada 23 November 2018 melalui http://www.depkes.go.id/article/view/17060600002/kampung-kb-inovasi-strategis-memberdayakan-masyarakat.html

_____. Diakses pada 23 November 2018 melalui http://kampungkb.bkkbn.go.id/about

_____. Diakses pada 23 November 2018 melalui https://regional.kompas.com/read/2018/07/18/08464431/indonesia-kekurangan-kampung-kb (Nasir, 2005)

Lampiran. 1 Pedoman Observasi

PEDOMAN OBSERVASI

UPAYA MENGHADAPI MISINFORMASI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MELALUI PROGRAM KAMPUNG KB

Pengamatan	Variabel	Indikator
Masyarakat desa	Masyarakat yang berpartsipasi yang meliputi bapak/ibu yang berada pada wilayah program tersebut.	1. Pengurus pada program pada desa teserbut 2. Seksi dan anggota pada progam tersebut
Dinas Pengendalian, Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tanah Grogot	Pelaksanaan dan persiapan kegiatan program	1. Peran penyuluh kegiatan dalam sosialisasi 2. Kesiapan dari dinas terkait mengenai sumber pengetahuan untuk masyarakat 3. Sarana dan prasarana yang mendukung untuk berjalannya program Kampung KB

Lampiran. 2 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

UPAYA MENGHADAPI MISINFORMASI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MELALUI PROGRAM KAMPUNG KB

1. Apa tanggapan Bapak/Ibu pertama kali mendengar kata Kampung KB?
2. Bagaimana menurut tanggapan Bapak/Ibu mengenai penyelenggaran Kampung KB di desa ini ?
3. Apa saja program Kampung KB yang telah berjalan di desa ini Bapak/Ibu ?
4. Apakah dalam menjalankan sebuah program yang berkolaborasi dengan lintas sektor ada terjadi masalah-masalah dalam masyarakat?
5. Apa harapan Bapak/Ibu kedepanya dnegan adanya Kampung KB di Desa ini?
6. Apa langkah yang dilakukan oleh dinas (PPKBP3A) dalam hal petugas penyuluh lapangan program Kampung KB?
7. Bagaimana dinas (PPKBP3A)dalam memberikan sosialiasi atau pembinaan bagi kampung KB di Kabupaten Paser?
8. Apa tanggapan dinas (PPKBP3A) terkait masyarakat desa yang tidak mau berpartisipasi dalam program ini?
9. Apa saja bentuk kerjasama yang sudah berjalan pada program Kampung KB di Kab. Paser ini??
10. Apa harapan khususnya dari dinas (PPKBP3A) dalam menjalankan program Kampung KB ini?

Lampiran. 3 Pedoman Dokumentasi

PEDOMAN DOKUMENTASI

UPAYA MENGHADAPI MISINFORMASI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MELALUI PROGRAM KAMPUNG KB

Dokumen Arsip

1. Data kelembagaan
    a. Sejarah
    b. Pengelolaan Kampung KB
    c. Sarana dan Prasarana

2. Data Tentang Masyarakat
    a. Indentitas subyek
    b. Log Out Penelitian
    c. Surat Keterangan (SK)

repository.ub.ac.id

Lampiran 4. *Log Book* Penelitian

Linda Shintiana

No.	Fokus	Teknik Pengumpulan Data	Temuan	Hasil Interpretasi
1.	Pelaksanaan Pembentukan Program Kampung KB a. Kampung KB "Sipakatuo" Desa Pepara b. Kampung KB "Kembang Renteng" Desa Sangkuriman c. Kampung KB"Harapan Taka" Desa Janju d. Kampung KB " Pesisir Indah" Desa Pondong	Wawancara	Pelaksanaan pembentukan Program Kampung KB terdapat mengalami masalah. Masalah yang ada meliputi ditolaknya pembentukan Program Kampung KB oleh Desa Janju dan Desa Sungai. Bentuk penolakan berasal dari Desa Sungai Tuak dan Desa Janju yang berupa pengiriman surat balasan yang menyatakan ketidaksanggupan desa mereka dalam menyelenggarakan Program Kampung KB. Pelaksanaan pembentukan Program Kampung KB merupakan bentuk pembangunan nasional yang diusung Presiden Jokowi Widodo pada Tahun 2016. Dengan landasan hukum Peraturan Pemerintah Nomer 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam PP disebutkan delapan fungsi keluarga yang dimana fungsi tersebut termasuk kedalam inti dari pelaksanaan Program Kampung KB di seluruh desa.	Pengumpulan Informasi Kampung KB yang diteliti

repository.ub.ac.id

			Salah satu syarat yang dapat menajadikan desa tersebut layak untuk mendapat program Kampung KB ialah berada dekat aliran sungai. Pada kenyataanya, desa sungai tuak merupakan desa yang berada dekat dengan aliran sungai, dan juga merupakan daerah dengan rata-rata mata pencarian sebagai petani dan berkebun.	
2.	Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Penyelenggaran Kampung KB	Wawancara	Program Kampung KB pada Kabupaten Paser Kota Tana Paser pada saat ini telah didukung dengan adanya biaya operasional untuk para anggota Kampung KB yang hadir pada saat sosialisasi. Bentuk dukungan yang diberikan dari dinas berupa uang transport yang berjumlah Rp. 40.000,00/orang. Upaya lainya dalam mendukung berjalannya Kampung KB ialah dengan adanya kerjasama antarlintas sektor seluruh dinas yang ada di Kabupaten Paser. Faktor penghambat yang mempengaruhi berjalannya proses pelaksanaan Kampung KB ialah kurangnya tenaga penyuluh. Tenaga penyuluh hanya berjumlah 2 orang dari seluruh total 21 Kampung KB yang ada. Selain itu, masih kurangnya alat-alat administrasi yang	Mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Proses Pelaksanaan Kampung KB di Kabupaten Paser

repository.ub.ac.id

			dibutuhkan anggota, spanduk, dan media pendukung lainnya.	

Tuti

No.	Fokus	Teknik Pengumpulan Data	Temuan	Hasil Interpretasi
1.	Pelaksanaan Pembentukan Program Kampung KB a. Kampung KB "Sipakatuo" Desa Pepara b. Kampung KB "Kembang Renteng" Desa Sangkuriman c. Kampung	Wawancara	Dalam kepengurusan terjadi gesekan pribadi yang membawa dampak pada pelaksanaan Kampung KB. Gesekan pribadi yang peneliti temukan pada Kampung KB Harapan Taka dan Pesisir Indah. Hal ini terjadi dikarenakan terdapat masalah-masalah pribadi yang membuat penyelenggaraan didalam Kampung KB tidak dapat teroganisir dengan baik. Pada desa pondong dengan Nama Kampung KB Pesisir Indah terdaoat gesekan pribadi antara Ketua Kampung KB dengan Kepala Desa setempat.	Pengumpulan Informasi Kampung KB yang diteliti

repository.ub.ac.id

	KB"Harapan Taka" Desa Janju d. Kampung KB " Pesisir Indah" Desa Pondong		Adanya gesekan tersebut menyebabkan ketua Kampung KB Pesisir Indah ingin mengundurkan diri dengan diimbangi alasan-alasan yang lain.	
2.	Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Penyelenggaran Kampung KB	Wawancara	Kurangnya tenaga penyuluh Kampung KB yang hanya berjumlah 2 orang tidak sebanding dengan jumlah Kampung KB di Kabupaten Paser yaitu 21 Kampung. Adanya hambatan proses pelaksanaan sosialisasi yang tidak bisa dilaksanakan karena persiapan dari dinas terkait maupun lintas sektor yang masih belum siap dalam memberikan materi dalam sosialisasi. Hal ini terjadi pada saat melakukan sosialisasi rutin di Kampung KB Kembang Renteng Desa Sangkuriman yang dimana kesediaan pemateri dari dinas lingkungan hidup yang pada saat itu sedang mengisi acara di kecamatan lain, mengakibatkan tidak terlaksananya sosialisasi. Selain itu, tidak adanya jadwal secara sistematis yang menjadi salah faktor penghambat dalam	Mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Proses Pelaksanaan Kampung KB di Kabupaten Paser

repository.ub.ac.id

			penyelenggaraan sosialisasi kepada para pengurus Kampung KB tidak dapat maksimal sehingga dilaksanakan secara mendadak dan membuat para anggota Kampung KB yang ada tidak dapat bersiap-siap terlebih dahulu.	

Sahrudin S.

No.	Fokus	Teknik Pengumpulan Data	Temuan	Hasil Interpretasi
1.	Pelaksanaan Program Kampung KB "Kembang Renteng" Desa Sangkuriman	Wawancara	Pelaksanaan program di Kampung KB Kembang Renteng dimulai dari pembentukan sampai dengan tahun 2019 banyak mengalami perubahan yang signifikan. Partisipasi keikutsertaan masyarakat setempat dalam melaksanakan program sampai saat ini dapat membuahkan hasil yaitu dengan dinobatkannya Kampung KB Kembang Renteng sebagai salah satu dari dua Kampung KB percontohan dan sudah menjadi Kampung KB percontohan di tingkat Provinsi	Pengumpulan informasi tentang pelaksanaan program yang berjalan pada Kampung KB Kembang Renteng Desa Sangkuriman yang diteliti

repository.ub.ac.id

			Kalimantan Timur. Selain itu, partisipasi dari kepengurusan Kampung KB Kembang Renteng menghasilkan umkm dan keuntungan digunakan untuk dana operasional Kampung KB tersebut. Sebagai ketua Kampung KB mempunyai harapan yang besar bagi desanya yaitu mereka menginginkan untuk desa tersebut terkenal dengan memilki suatu ciri khas yang nanti nya akan dilakukan kerjasama dengan dinas pariwisata dan dinas perkebunan agar, desa tersebut tidak hanya terkenal dengan Kampung KB saja tetapi dapat memperlihatkan suatu sisi bahwa desa tersebut bisa menjadi desa dengan ciri khas. Ciri khas yang akan diusung adalah dengan mengekspos buah mentega yang saat ini susah untuk ditemukan dan pada desa tersebut masih ada terdapat beberapa pohon yang nantinya akan dilakukan pengembangan agar keberadaan buah tersebut tetap ada didesa tersebut.	

2.	Bentuk-bentuk misinformasi yang didapatkan	Wawancara	Bentuk misinformasi yang disampaikan dari ketua Kampung KB adalah adanya kesalahan pendataan penggunaan Pil KB pada desa tersebut. Adanya diskordinasi dari pihak pengurus dengan pendata yang berasal dari dinas mengakibatkan adanya kesalahan informasi yang diterima. Warga desa sangkuriman masih banyak yang belum memiliki pasangan dan keadaan tersebut warga tidak menggunakan pil KB dan pada saat pendataan warga tersebut termasuk dalam warga yang menggunakannya. Salah satu penyebab adanya kasalahan informasi ini adalah karena bergantinya perangkat desa yang baru sehingga kurangnya koordinasi mengenai kriteria-kriteria yang sudah termasuk dalam pealokasian bantuan berupa pil KB bagi warga desa sangkuriman	Mengetahui bentuk-bentuk misnformasi yang sebabkan kurang koordinasi.

repository.ub.ac.id

Irwansyah

No.	Fokus	Teknik Pengumpulan Data	Temuan	Hasil Interpretasi
1.	Pelaksanaan Program Kampung KB "Kembang Renteng" Desa Sangkuriman	Wawancara	Pada bidang seksi sosial masih belum melaksanakan kegiatan yang benar-benar terfokus untuk kegiatan sosial budaya. Selama 1 tahun 6 bulan Kampung KB Kembang Renteng dibentuk dalam seksi ini mengharapkan adanya program kesenian tradisional. Anggota seksi sosial budaya menanggapi tentang tidak adanya program yang berjalan khususnya dalam bidang sosial budaya dikarenakan tidak adanya dukungan misal berupa sarana dan prasarana alat yang dipinjamkan. Mereka menginginkan bahwa nantinya akan diadakan semacam festival kecil yang diadakan di desa tersebut. Dengan tidak berjalannya program selama 1 tahun 6 bulan pada seksi sosial budaya dapat menjadi sebuah ukuran keberhasilan berjalanya program Kampung KB pada Desa Sangkuriman sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat yang diusung presiden RI sebagai salah satu bentuk program pembangunan nasional di Indonesia.	Pengumpulan informasi tentang pelaksanaan program yang berjalan pada Kampung KB Kembang Renteng Desa Sangkuriman yang diteliti

repository.ub.ac.id

Miswati dan Santika

No.	Fokus	Teknik Pengumpulan Data	Temuan	Hasil Interpretasi
1.	Pelaksanaan Program Kampung KB "Kembang Renteng" Desa Sangkuriman	Wawancara	Mengeatahui proses berlangsungnya program Kampung KB Kembang Renteng Khsusunya pada para pengurus serta mengetahui aktivitas apa saja yang sudah dilakukan oleh pengurus Kampung KB kembang renteng. Serta mengetahui dana pelaksanaan program Kampung KB dan harapan kedepannya untuk Kampung KB. Mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pengurus dalam pelaksanaan program dan menggunakan dana.	Pengumpulan informasi tentang pelaksanaan program yang berjalan pada Kampung KB Kembang Renteng Desa Sangkuriman yang diteliti

repository.ub.ac.id

Rahman

No.	Fokus	Teknik Pengumpulan Data	Temuan	Hasil Interpretasi
1.	Pelaksanaan Program Kampung KB “Sipakatuo” Desa Pepara	Wawancara	Mengetahui pelaksanaan kampung KB sipakatuo meliputi sejak berdiri kapan, jumlah pengurus, program apa saja yang sudah ada di Kampung tersebut dan harapan kedepannya untuk Program Kampung KB pada Desa Pepara.	Pengumpulan informasi tentang pelaksanaan program yang berjalan pada Kampung KB Kembang Renteng Desa Sangkuriman yang diteliti

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

Muksin

No.	Fokus	Teknik Pengumpulan Data	Temuan	Hasil Interpretasi
1.	Pelaksanaan Program Kampung KB "Harapan Taka" Desa Janju	Wawancara	Mengetahui awal presepsi mengenai program Kampung KB pada desa tersebut, manfaat setelah mengetahui dan mengikuti sosialisasi kampung KB dan mengetahui – harapan harapan kedepanya untuk Kampung KB Janju yang dikatakan sebagai Kampung KB mati suri karena tidak ada perkembangan dalam pembentukan selama 1 tahun. Mendapat sumber informasi mengenai kepengurusan Kampung KB Desa Janju "Harapan Taka" yang dimana pengurus pada saat itu tidak bisa hadir dan merasa sosialisasi ini terbilang mendadak sehingga mengakibatkan jumlah pengurus Kampung KB yang datang pada saat sosialisasi sangat sedikit dan tidak sebanding dengan total seluruh jumlah kepengurusan yang ada.	Pengumpulan informasi tentang pelaksanaan program yang berjalan pada Kampung KB Harapan Taka Desa Janju yang diteliti

repository.ub.ac.id

Siti Gustaniah

No.	Fokus	Teknik Pengumpulan Data	Temuan	Hasil Interpretasi
1.	Pelaksanaan Program Kampung KB “Harapan Taka” Desa Janju	Wawancara	Mengetahui awal presepsi mengenai program Kampung KB pada desa tersebut, manfaat setelah mengetahui dan mengikuti sosialisasi kampung KB dan mengetahui – harapan harapan kedepanya untuk Kampung KB Janju sebagai salah satu pengurus dalam seksi pendidikan yang belum mempunyai program.	Pengumpulan informasi tentang pelaksanaan program yang berjalan pada Kampung KB Harapan Taka Desa Janju yang diteliti

repository.ub.ac.id

Yanti dan Darsiah

No.	Fokus	Teknik Pengumpulan Data	Temuan	Hasil Interpretasi
1.	Pelaksanaan Program Kampung KB “Pesisir Indah” Desa Pondong	Wawancara	Mengetahui awal presepsi mengenai program Kampung KB pada desa tersebut, manfaat setelah mengetahui dan mengikuti sosialisasi kampung KB dan mengetahui – harapan harapan kedepanya untuk Kampung KB Pesisr Indah yang dikatakan sebagai Kampung KB mati suri karena tidak ada perkembangan dalam pembentukan selama 1 tahu dan mengetahui dari sisi pengurus tentang ketua Kampung KB selama memimpin Kampung KB Desa Pondong. Mengetahui kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksanan dalam 1 tahun terakhir dan mengetahui bagaimana kepempinan ketua Kampung KB sebelumnya.	Pengumpulan informasi tentang pelaksanaan program yang berjalan pada Kampung KB Pesisir Indah Desa Pondong yang diteliti

repository.ub.ac.id

Hadijah

No.	Fokus	Teknik Pengumpulan Data	Temuan	Hasil Interpretasi
1.	Pelaksanaan kegiatan Program Kampung KB dari sisi kepala dinas	Wawancara	Mengetahui pelaksanaan dari dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi tenaga teknis seperti penyuluh kampung KB, teknis pelaksanaan sosialisasi, progres Kampung KB yang ada di Kab. Paser, kerjama-kerjasama dan bantuan-bantuan yang terjalin antar lintas sektor di linkup Pemerintahan Kab.Paser, mengetahui rentang birokarsi yang terdapat dalam pelaksanaan Program kampung KB seperti biaya operasional dalam Kampung KB, mengetahui sarana dan prasarana penunjang dari pelaksanaan Kampung KB, presepsi kepala dinas mengenai masyarakat yang pada awalnya mengetahui program Kampung KB, pemerataan mengenai sosialisasi yang belum terjalan dengan merata pada beberapaKampung KB di Kab.Paser, solusi	Pengumpulan informasi tentang pelaksanaan program Kampung KB yang berjalan meliputi pembinaan, sosialisasi/penyuluhan, serta evaluasi program

repository.ub.ac.id

			dari dinas untuk menghadapi ketidak pemerataan melakukan sosialisasi, serta harapan kedepanya untuk program Kampung KB khususnyaa pada Kabupaten Tanah Grogot yang masih banyak memerlukan tinjuan, pembinaan serta evaluasi lagi terhadap perkembangan program Kampung KB di setiap desa.	

Lisnawati

No.	**Fokus**	**Teknik Pengumpulan Data**	**Temuan**	**Hasil Interpretasi**
1.	Pelaksanaan Program Kampung KB dari sisi kasubag bagian perencanaan program	Wawancara	Mengetahui kesiapan narasumber sebagai pemateri dalam rangkaian acara sosialisasi maupun pembinaan dalam kegiatan rutin program Kampung KB.	Pengumpulan informasi tentang pelaksanaan program Kampung KB yang berjalan meliputi pembinaan, sosialisasi/penyuluhan, serta evaluasi program

repository.ub.ac.id

Benekdikta

No.	Fokus	Teknik Pengumpulan Data	Temuan	Hasil Interpretasi
1.	Pelaksanaan Program Kampung KB dari sisi penyuluh KB dari bidang Keluarga Berencana	Wawancara	Memberikan pembinaan terhadap kesiapan masyarakat untuk menggunakan KB dan memberi penyuluhan tentang administrasi didalam berjalannya Kampung KB pada Kampung KB Desa Janju "Harapan Taka" dan Kampung KB Desa Pondong "Pesisir Indah" dikarenakan kedua Kampung KB tersebut merupakan Kampung KB yang tidak berjalan dengan dan dikatakan sebagai Kampung KB "Mati Suri'. Oleh karena itu dalam sosialisasi tersebut lebih ditekankan dari mengajak seluruh pengurus untuk lebih aktif dan mau memabangun kembali Kampung KB.	Pengumpulan informasi tentang pelaksanaan program Kampung KB yang berjalan meliputi pembinaan, sosialisasi/penyuluhan, serta evaluasi program

Lampiran 5. Hasil Wawancara

Hasil Wawancara dengan Ketua Kampung KB Desa Sangkuriman

"Kembang Renteng"

Nama Narasumber : Sahrudin S 41 Tahun

Jabatan : Ketua Kampung KB Kembang Renteng

Tempat Wawancara : Balai Desa Sangkuriman

Adel : Sudah berapa lama menjadi ketua Kampung KB?

Sahrudin : Saya menggantikan lama dan sekarang baru sekitar kurang lebih baru 7 bulan saya menjadi ketua

Adel : Bagaimana tanggapan bapak mengenai adanya program Kampung KB di desa ini?

Sahrudin : Banyak hal positif yang bisa kami banyak dapatkan mendapat pengalaman teurtama masalah KB dan peminat KB pada Kampung ini lumayan banyak

Adel :Bagaimana tanggapan bapak mengenai penyelenggaraan dari dinas terkait Kampung KB dan program-program yang lain?

Sahrudin : Lumayan antusias mengadakan pelatihan-pelatihan, pembinaan dan segala macam teurtama yang berperan penting disini adalah bidan

Adel : Apakah ada terjadi kendala selama bapak menjabat sebagai Ketua Kampung KB selama 7bulan?

Sahrudin : Sejauh ini selama 7bulan saya menjabat sebagai ketua kampung KB belum ada masalah-masalahyang terlalu berari

Adel :Bagaimana tanggapan bapak mengenai kepengurusan Kampung KB kembang Renteng?

Sahrudin : Untuk pengurus ya memang ada kendala didalam dia tidak bisa menjadi pengurus dan tidak dapat terlalu aktif akhirnya dia keluar dan untuk kedepanya kami carikan pengantinya.

Adel : Bagaimana pelaksanaan kegiatan pada kampung KB ini?

Sahrudin : Lumayan banyak kegiatan yang kami lakukan selama ini sudah dilakukan dengan pengurus terutama pengajian, latihan paduan suara, belajar mengaji bersama setiap malam jumat

Adel : Apakah pikiran awal bapak mengenai program Kampung KB?

Sahrudin : Kalo pengetahuan saya luas sebenarnya saya pengen tau bukan hanya Kb saja tetapi, sumber daya manusianya juga dan dulu waktu ada penyuluhan khusus KB juga kami sudah diberitahu bahwa nantinya ada program Kampung KN

Adel : Apakah ada terjadi kesalahan informasi yang tidak disengaja yang bapak rasakan selama menjadi ketua Kampung KB?

Sahrudin : Nah, kamarin waktu pendataan tentang penggunaan KB banyak salah. Warga di kampung sini masih banyak yang belum menikah otomatis dia tidak berKB karena tidak mempunyai pasangan, Sebenaarnya ada kriterianya waktu pendataan kemarin, jadi warga sini dibilang banyak yang tidak berKB itu permasalahannya hampir 90% warga asli maupun pendatang memakai KB minimal jaraknya antara 3 sampai 4 tahun paling kecil jarak 1 ke 2. Ini sebnarnya ada konsultasi dahulu dari pihak kedesaan baru melakukan pendataan. Karena pergantian perangkat desa baru yang menyebabkan terjadinya kesalahan pahaman tersebut.

Adel: : Apa harapan bapak kedepannnya untuk Kampung KB di desa ini?

Sahrudin : kita dari masyarakat sangkuriman pengen sekali untuk diarahkan betul-betul dalam kampung KB dan juga kami juga mau menonjolkan ciri khas dari desa kami. Ciri khas desa sementara ini masih belum ada. Kalau sementara ini sepintas saya daerah belengkong itu bunga mentega. Dan kebetulan di desa kami ada dua pohon di desa kita mau di

budidayakan menjadi maskot Kampung KB kedepannya.

Adel : Apa harapannya untuk dinas terkait?

Sahrudin : kita kalau bisa lebih diperhatikan sebelumnya kami kurang dan sekarang sudah banyak antusiasnya yang datang baik dari dinas-dinas lain juga. Yang datang dari dinas lingkungan hidup, dinas tanaman pangan,dinas perikanan budidaya ikan air tawar, dinas sosial bantuan-bantuan barupa janda tua dan tepat sasaran. Banyak juga mendapat bantuan contohnya kemaren dapat bantuan dari tanaman pangan berupa bibit, tapi kemarin bibinya sudah kadaluarsa jadi kita tidak bisa pakai.

Adel : Bagaimana tanggapan bapak mengenai pengurus Kampung KB kembang renteng sini pak????? Apakah ada yang malas-malas atau bahkan rajin semua??????? Hehehehe.....

Sahrudin : Yaa gitu... pengurus kita banyak cukup aktif.. tapi ada juga yang malas-malasan pasti ada sih itu tidak mungkin tidak ada, tidak menutup kemungkinan meskipun kita dijadikan Kampung KB percontohan.....

Adel : Bagaimanma tanggapan bapak sebagai ketua Kampung KB mengenai adanya biaya operasional yang didapat?

Sahrudin : Ya, kami mendapat duit operasional pelaksanaan sialisasi sebesar Rp. 40.000 perorang..... ya bagus untuk memberi semangat kepada para anggota juga...

Adel : Baik.... pak terima kasih atas waktunya

Sahrudin : Iya sama-sama .....

Hasil Wawancara dengan Anggota Kampung KB Sangkuriman

"Kembang Renteng"

Nama Narasumber : Irwansyah 36 Tahun

Jabatan :Anggota Seksi Sosial BudayaKembang Renteng

Tempat Wawancara : Balai Desa Sangkuriman

Irwansyah 36 Tahun Seksi Anggota Sosial Budaya

Adel :Apa tanggapan bapak mengenai Kampung KB di Desa Sangkuriman?

Irwansyah : Kalau saya sih, Alhamdulilah bagus saja. Karena di seksi sosial budaya belum ada kegiatan. Pengennya sih ada kaya kesenian tradisional dan lain-lain.

Adel : Apakah bapak selama menjadi anggota seksi sosial budaya telah melaksanakan kegiatan-kegiatan?

Irwansyah : Sampai saat ini belum ada melaksakan kegiatan dibidang sosial budaya

Adel :Apa tanggapan pertama bapak mengenai Kampung KB?

Irwansyah : Kalau saya sih taunya Kampung KB itu cuma program sosialisasi dua anak

Adel :Apa Harapan kedepannya untuk Kampung KB?

Irwansyah : Harapanya nya yaa... maunya ada semacam festival gitu di desa ini dan di dukung sama dinas mana saja

Adel : Apa harapan kedepanya untuk dinas terkait?

Irwansyah :Pengennya sarana & prasarana seperti pengen kesenian, misal berupa alat dipejemin

Nama Narasumber : Miswati 34 Tahun

Jabatan :Anggota Seksi Ekonomi Kembang Renteng

Tempat Wawancara : Balai Desa Sangkuriman

Adel : Bagaimana tanggapan pertam kali ibu mengenai Kampung KB "Kembang Renteng" di Desa Sangkuriman ini?

Miswati : Sama sih, taunya Cuma program dua anak saja..

Adel :Apa saja kegiatan di Bidang Ekonomi pada Kampung KB "Kembang Renteng" di Desa Sangkuriman ini?

Miswati : Yaa kami bikin makanan kerupuk dan kue

Adel : Masaknya setiap apa bu????

Miswati : Setiap ada acara ini seperti sosialisasi, biasanya seksi ekonomi yang disuruh bikin gitu..... buat jadi pemasukan di seksi ekonomi hehe...

Adel : Apa Harapan ibu untuk Kampung KB kedepannya ?

Miswatti : Ya... pengen lebih bagus lagi hehehe.... sama-sama

Nama Narasumber : Santika 25 Tahun

Jabatan :Anggota Seksi Ekonomi Kembang Renteng

Tempat Wawancara : Balai Desa Sangkuriman

Santika 25 Tahun Seksi Ekonomi

Adel : Bagaimana tanggapan pertam kali ibu mengenai Kampung KB di Desa Sangkuriman ini?

Santika : Yaa..taunya program dua anak cukup dan harus kontrol berKB

Adel : Apa saja kegiatan di Bidang Ekonomi pada Kampung KB "Kembang Renteng" di Desa Sangkuriman ini?

Santika : Biasanya kalau ada sosialisasi sama kalau ada seperti pertemuan-pertemuan gitu kita bikin keripik, lalu kami jual gitu

Adel :Apa Harapan ibu untuk Kampung KB kedepannya ?

Santika : yaaaa..... harapanya semoga kedapnya terus lancar dan anggota-anggota lebih berpengalaman agar biar bisa tahu mendalam tentang kampung KB itu apa biar Kampung Kb dapat berjalan sebagaimana mestinyalah.....heheheee

Adel : Bagaimana dengan anggota Kampung KB disni bu?

Santika : ada sebgaian yang malas dan sebagian ada yang aktif dalam kepengurusan

Adel : Lalu, Harapan kedepanya untuk Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak?

Santika : Apa yaaaa? .....

Adel : yaa mungkin dalam bidang seksi ekonomi gitu bu pengennya apaa???

Santika : :yaaa pengennya dibantulah.....

Adel : dibantu dalam segi???????????

Santika : Keuangaan.....

Adel : Selama ini belum pernah mendapat bantuan bu???

Santika : Belum pernahh mba hehhee.....

Adel : Mungkin dapatnya di uang transport ya bu yang perorang....

Santika : Iyaaa.... itu saja mba

Adel : Kalau untuk dana masak-masak keperluan seperti sosialisasi ini dana nya dari mana?

Santika : Kami sendiri urunan swadaya masyarakat yang ada disini mbak.... biasanya kami urunan dan masak bersama-sama kalau ada acara yang ada program Kampung KB nya.

Hasil Wawancara dengan Ketua Kampung KB Desa Pepara "Sipakatuo"

Nama Narasumber : Rahman 40 Tahun

Jabatan : Kepala desa dan Ketua Kampung KB Sipakatuo

Tempat Wawancara : Balai Desa Pepara

Adel : Ini Kampung Kbnya berdiri sejak kapan ya?

Rahman : 25 februari 2016.....

Adel : Apa tanggapan pertama bapak dengan adanya program Kampung KB pada Desa Pepara ini ?

Rahman : Eh..... dulu waktu tahun 2016 pembentukan saya masih belum menjabat..... ya yang kita lihat lebih ke kesehatan hmmmmmm.

Adel : Mungkin dari desa sendiri pak bentuk kegiatan yang sudah dilaksanakan sampai saat ini apa?

Rahman : Sudah berjalan yaa... seperti kesejahteraan raski, gotong royong dan faktor pendukung untuk pelaksanaan segala kegiatan kami menggunakan sumber dana dari desa untuk menunjang kegiatan tersebut

.

Adel : Pernah ga pak bantuan raskin tersebut salah tujuan?

Rahman : eeehm..... memang pernah ada dan itu memang umum terjadi karena begitu kita mengusulkan, karna yang menseleksi kita kirim di pusat dna pusat kadang yang salah dan itu merupakan sebuah permasalahan yang terjadi.

Adel : Kalau untuk anggota Kampung KB sendiri pak?

Rahman : Mungkin ibu bidan bisa menjawab juga .....

Nama Narasumber : Fitri 27 Tahun

Jabatan : Bidan Kampung KB Sipakatuo

Tempat Wawancara : Balai Desa Pepara

Fitri : Ya... sebelum terbentuknya Kampung KB di desa ini dilihat dulu dari akseptor KB nya (pemakai), jadi dari dulu kecamatan grogot ada 15 kecamatan belum terpecah dengan senaken, jadi memang di lihat dari jumlah akseptor Kbnya rendah, status pendidikan disini masih rendah, memang keluarga prasejahteranya masih rendah disini. Sebelum

terbentuknya kampung KB. Kriteria tersebut yang menjadikan desa pepara didirikan Kampung KB karena prasejahtera keluagra masih rendah dan jumlah aseptor masih rendah banget. Jadi, alhamdulilah seiring berjalannya waktu dengan adanya Kampung KB dan seringnya sosialisasi dari BKKBN provinsi, dari pemberdayaan perempuan juga dari dinas kesehatan juga.... jadi alhamdulilah selama 3 tahun ini warga yang suntik dan pil mulai beralih diimplan dan ada yang berani steril sekarang..... itu sih dari segi alat kontrasepsi. Terus juga kalau dari kegiatannya ada kelompok Tri Bina kami sekarang seperti kegiatan posyandu kegiatan pkb dengan berintergrasi dengan kegiatan posyandu... itu bisa di dapatkan di posyandu dan TK. Kemudian ada bina keluarga lansiaitu juga kita berintegrasi dengan acara yasinan ibu-ibu biasanya diadain sebulan 2 kali... biasanya yang ikut dalam yasinan merupakan ibu-ibu kader BKL dan bisa langsung kasih penyuluhan.. bisa tentang remaja dan bisa tentang lansia dan dulu pernah ngundang dari pemberdayaan juga untuk ngisi materi.

Adel : Kan awalnya ibu tahu bahwa program ini hanya penggunaan KB saja padahal kan didalam program ini ada banyak fungsi, nah bagaimana awalnya ibu tahu bahwa program ini banyak sekali manfaatnya?

Fitri : Nah..... sosialisasi memang pertama kali

Adel : Awalnya ibu tidak mengetahui bahwa banyak sekali program didalam nya?

Fitri : Tidak tahu.....seiring dengan berjalannya waktu sering ada sosialisasi dari BKKBN provinsi datang dari situ kita tahu bahwa ada 8 fungsi keluarga.. jadi mulai saat itu mulai diterapkan masih kegamaan mengadakan istigosah bersama disini. Jadi memang setelah sosialisasi tersebut sudah ada kegiatannya tetap kita kan ngga tau bahwa masuk kedalam 8 fungsi keluarga, tapi memang semuanya kegiatan ada di dalam 8 fungsi keluarga di desa ini loh mba.....

Adel : Sudah berjalan??????

Fitri : Iya sudah berjalan tapi cumakan lebih terarah lagi dengan adanya Kampung KB di desa ini

Adel : Terus kegiatan rutin disini kira-kira apa saja ya bu?

Fitri : kalau yang terkait kesehatan dengan saya sebagai bidan..... kelompok tribina itu mbaa.....setiap bulan ada ada pikm, genre generasi berencana, untuk siswa SMP dan MTS itu kegiatan yang saya ikutin .... mungkin dari kegiatan dari desa banyak ya seperti gotong royong, kerja bakti dan lain-lain.....

Adel : Kalau untuk anggota Kampung KB sendiri pak?

Fitri : Yaa.. kalau untuk anggota Kampung KB pastiny ada yang malas dan itu memang tidak bisa dipungkiri pasti ada cuman dikasih tupuksinya ada kepala seksi, anggota seksi, ada memang sih yang mau datang cuma mau duit dan langsung

pulang.....Tapi kemaren kan memang disampaikan pas acara bu tuti kami disuruh hadir dan mengundang kelompok tribina juga yang hadir 30 orang itu ibu-ibu yang rajin dalam kelompok triban tersebut dan itu menang yang saya rasa yang aktif dalam kegiatan yang saya undang.....

Adel : Sebelum yang itu ada ibu-ibu yang malas?

Fitri : Karena ini kan banyak seksinya makanya, seksinya aja ada 8 terus belum lagi kelompok tribina dan banyak lagi anak-anaknya. Jadi, setiap acara kampung KB saya tanyaain ini yang ditugas siapa??? Tokoh agama, pengurus inti atau kelompk tribina... dan pasti saya tanya begitu...

Hasil Wawancara dengan Ketua Kampung KB Desa Janju "Harapan Taka "

Nama Narasumber : Muksin 41 Tahun

Jabatan : Ketua Kampung KB Harapan Taka

Tempat Wawancara : Kantor Desa Janju

Adel : Bagaimana tanggapan pertama bapak mengenai Kampung KB di desa ini?

Saffarudiin : Saya tidak memahami tentang Kampung KB pada 1 tahun lalu, tetapi setelah ada dinas ini datang dan sosialisasi baru saya tahu bahwa terdapat banyak kegiatan yang bisa dilakukan contohnya saya seksi agama .... ada kegiatan-kegiatan....

Adel :Kegiatan apa saja pak?????

Saffarudin : ada fardu kifayahh, pengajian setiap jumat

Muksin : Kampung KB ini toh wadah untuk apaa namanya .. untuk mensejahterakan masyarakat kecil ataupun program meyeimbangkan dua anak cukup suapaya pola kehidupan masyarakat ini khususnya yang punya keluarga itu biar bisa ringan...dan bisa ada kesempatan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat... karna kalau kita nggak ada aturan hidup ini ngga terarah.....

Adel : Mungkin awalnya bapak tau Kampung KB itu sendiri apa sih pak??

Muksin : Kampung KB yang tau awalnya Cuma program dua anak tadi.... zamannya program yaitu presiden suharto dan di canangkan dengan transmigrasi.. ya taunya gitu.....

Adel : ohhh gitu yaaa pak..

Muksin : Tetapi secara dalamnya saya baru mengenal karna saya ikut dan telaah didalamnya itu banyak program-program yang baik.. terutama satu mengatur jarak kelahiran dan yang kedua untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat .. jadi misal program 2 anak jadi punya kesempatan untuk hidup lebih baik lagi mengaturnya lebih enak tanpa disibukna dengan anak... jadi ada kesempatan kita untuk istirahat gitu... yang ketiga didalamnya itu ada kegiatan yang menunjang ekonomi kecil untuk lebih memberi efek positif contoh kalau kita masuk ke kampung KB ada apa namanyaa.....ekonomi.... seperti sampah tadi sampah dari rumahan ada yang mengelola jadi ada pemasokan dari kampun KB.. ya meskipun sedikit.. karna KB ini program didalanya mensejahterakan masyarakat terutama mengatur jarak kelahiran anak supaya kedepanya anak lebih baik perkembangannya dan ibunya lebih berkesempatan untuk menikmati hidup ini.....

Muksin : Padahal kan..... Desa ini sebenarnya potensinya besar.... tapi kita dari pengurus yang masih banyak sibuk sendiri... di liat sosialisasi hari ini aja... masa yang datang cuma 8 delapan orang dari total 50an orang pengurus.... jadi bingung juga kita hehe... masing-masing ada alasan masing-masing dan sudah punya agenda masing-masing... dan juga dari dinas di kasih tau mendakak makanya banyak pengurus ndak hadir...”

Nama Narasumber : Siti Gustaniah

Jabatan : Seksi Pendidikan

Tempat Wawancara : Balai Desa

Adel : Namaa ibu dan umur ibu berapa??????

Siti : Siti Gunstaniah Umur 39 Tahun

Adel : Anggota seksi apa??????

Siti : Seksi Pendidikan

Adel : Saya mau tanya bu tentang Kampung KB??????

Siti : Oh iyaaa silahkan.....

Adel : Sebelum ibu tau Kampung KB ini sebenarnya apa Apa yang ibu ketahui tentang kampung KB ini?????

Siti : Yaa..... sebelumnya taunya saya keluarga berencana..... enda tau isinya apa padahal kan banyak sekali setelah kita diperjelaskan..... oh ternayataa Kampung KB selama ini udah banyak dan sudah pernah kita jalanin seperti arisan yasinan.....

Adel : Ohh jadi ibu ngga tau ya kalau arisan yasinan Masuk dalam program kampung KB?

Siti : Iyaaaa enda tau ehehhee.....taunya ya pas ada sosialisasi pertama dulu aja.....

Adel : Selama ini dalam seksi pendidikan udah ada kegiatan apa aja ya bu?????

Siti : Sejauh ini sih belum ada.....

Adel : Tapi ... taukan ya bu fungsi pendidikan tugasnya apaa aja.....?????????/

Siti : sebenarnya sih lupa-lupa kalo enda dikasih tau ngpain aja..... soalnya kita belum ada kegiatan yang bener-bener seksi pendidikan gitu... anggotanya juga ngga tau kemanaan hehe bingung juga.....

Adel : Lalu, bu tanggapan mengenai Kampun KB janju ini sendiri bagaimana???????

Siti : yaaa... gini hehehe kurang sih kita banyak kurangnya.... tadi aja liatkan yang datang Cuma 8 orang..... pada sibuk semua katanya.....

Adel : Lalu bu, harapan kedepannya untuk Kampung KB janju sendiri apa bu???????

Siti : Hemmmm.... harapan apaaa yaaaa

Adel : Harapan kedepannya bu dari ibu sendiri sebagai salah satu pengurus Kampung KB janju khusunya seksi ekonomi ..... mungkin ada mau kegiatan apa ?????

Siti : Kalau saya sih.... maunya ya adalah ya kegiatan dari pendidikan... misalnya apa ya???? Yaaa semacam mendidik-didik gitu....

Adel : kalau saya sih pribadi mau nyaranin buat ada program kegiatan dongeng untuk anak-anak setiap minggu sore buat anak-anak sini bu..... tapi ya ga cuma dongeng tapi bisa yang lain..... seperti belajar bersama atau lain-lainya..... hehehe

Siti : Oh iyaa itu- itu seperti gitu mba hehehee.....

Adel : kalau gitu terima kasih ya bu atas waktunya....

Siti : Iyaa... sama-sama mba.....

Hasil Wawancara dengan Pengurus Pengurus Kampung KB Desa Pondong "Pesisir Indah"

Nama Narasumber : Siti Rapiah & Yanti & Darsiah

Jabatan : Kader Reproduksi & Bendahara 40 Tahun

Tempat Wawancara	: Balai Desa
Adel	: Nama bu?????
Siti	: Siti Rapiah.....
Adel	: di kepengurusan sebagai apa bu?????
Siti	: Kader reproduksi.....
Adel	: Saya mau tanya tentang Kampung KB di desa ini bu???????
Yanti	: Ohhh iyaa.....boleh-boleh
Adel	: Ibu namanya siapa dan umurnya ????????
Yanti	: Yanti.. 40 Tahun
Adel	: di kepengurusan sabagai apa???????
Yanti	: Bendaharaa.....
Adel	: Oh... baik bu.....saya ingin menanyakan tatanggapan awal ibu mengenai teselenggaranya program Kampung KB di desa ini bu?
Yanti	: yaa... kegiatan-kegiatan yang ada di Kampung KB yang ada di desa eemmm.. seharusnya dilaporkan ke Kampung KB.....
Adel	: Sebenarnya ibu-ibu in awalnya tau ngga sih tentang Kampung Kb sendiri yang didalamnya

banyak sekali manfaat.... misal banyaknya program yang terdapat.....?????

Yanti : Ngga tahu..... kita taunya ya awalnya program untuk dua anak ajaa.....

Siti : Iyaaa..... taunya program punya dua anak aja...

Adel : Oh iyaa... bu saya mau tanya mengenai ketua tadi kenapa ya beliau mengundurkan diri????

Yanti : Yaaa.. mungkin dia ada kegiatan lain kegiatan diluar.....

Darsiah : Selama ini..... yaaaa bapak Edy bagus dan aktif juga cuma ya itu punya masalah sama pak kepala desa yang jadinya buat dia mau ingin keluar Kampung KB padahal menurut kami pa edy sudah bagus.. tadi aja pas musyawarah kan dia kepilih lagi... artinya dia bagus kita suka.. daripada yang lain-lain mending pak edy aja.

Adel : Ohhh gitu yaaa bu..... lalu kalau perkembangan Kampung KB di desa ini gimana bu ??? ada kegiatan-kegiatan apa aja????????

Siti : Pengajiian.....

Adel : Selain pengajian????????

Yanti : Pertemuan PKK..... dan masih banyak sih bu ehehe

Adel : lalu, harapan kedepanya buat Kampung KB di Desa Pondong ini???????????

Yanti : Supaya lebih maunya lebih sukses.....

Siti : Lebih sukses.....

Yanti : Masyarakatnya juga maksudnya juga kerjasama juga lah untuk desanya bair lebih baik lagi.....

Adel : memangnya sebelumnya gimana bu????????

Yanti : yaaa.... kami kurang komunikasi juga.... punya grup wa tapi ngga pernah aktif..... ya nanti lah kitab aktifkan lagi.....

Adel :

Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser

Nama Narasumber : Dra. Hadijah

Jabatan : Kepala Dinas

Tempat Wawancara : Kantor Dinas

Adel ` : Ass.wr.wb selamat siang ibu.....

Hadijah : Iyaa..

Adel : Bu.... mohon ijin langsung kepertanyaan bagaimana?

Hadijah : Ohh ya ya...

Adel : Baik bu... pertanyaan pertama apa tanggapan ibu mengenai program Kampung KB di Kota Tanah Grogot ini?????????

Hadijah : Pertama-tama saya sebagai kepala dinas merasa bangga dengan berjalanya Kampung KB di kabupaten ini... total sudah ada 21 Kampug KB yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan desa yang ada di kab. Paser ini. Tentunya ini merupakan awal yang baru untuk kita semua apalagi program ini baru diusung dan dimulai pada tahun 2016..... jadi yaa kita harus optimis untuk menciptakan hal baru di kab ini khsusunya di masyarakat..... dan juga saya rasa pengadaan kampung KB ini sangat bagus untuk masyarakat desa yang keguanaanya banyak sekali..... ya yang pasti intinya untuk mensehjaterakan masyarakat.

Adel : Baik bu..... kemudian sampai manakah sejauh ini progress dari Kampung KB ini?????

Hadijah : Progress nya sendiri kami masih berjalan ya... mungkin ada beberapa kampung KB yang berhasil dan ada juga kampung KB yang tidak berhasil.... semua butuh progress.... kalau ditanya progress

yang bagus diantara semua kampung KB..... Kampung KB Sangkuriman sama kampung KB pepara yang bagus saat ini dipaser..... kalau Kampug KB sangkuriman kamaren terpilih jadi Kampung KB percontohan..... sama juga dengan pepara menyusul menjadi percontohan..... ya jadinya bisa menjaid contoh-contoh bagi kampung kb lainnya di paser ini.....

Adel : Kampung KB yang tidak berhasil kalau boleh tau kenapa ya bu? Maksudnya faktornya kira-kira yang mempengaruhi apa saja?????

Hadijah : Yaaa.....dalam penyelenggaran Kampung KB di Paser ini.. .....masih banyak kekurangan yang kita alami... disini kita punya 10 kecamatan dan banyak desa juga yang lumayan jauh seperti kec. Tanjung Harapan harus pake kapal kita kesana..... Yaaa..... jadinya melihat juga tenaga penyuluh kami yang hanya berjumlah 2 orang dan dibantu beberapa staf dan masing-masing bidang di dinas itu pun juga tidak sebanding dengan banyaknya Kampung KB di Paser ini....terus juga sama sarana & prasarana disini masih kurang....

Adel : oh gitu yaa bu.. terus kalau 10 kecamatan gitu penyulunya gimana bu...?? maksudnya kan cuma 2 orang apa engga keteteran?

Hadijah : Ya..... makanya itu kami cuma punya dua orang dan itu cewek-cewek semua lagi.....yaaa gimana ya juga dianggaran dinas untuk penyuluh kan wajib

harus wajib PNS dan syaratnya juga ada... dan sampai saat ini yang memenuhi kritetia kami baru dua orang itu aja.. si linda sm vevi....

Adel : Ohh gitu yaa.... bu ??!! terus kalau pembinaan gimana bu? Kan Cuma ada dua orang penyuluh?

Hadijah : Biasanya kami.. pembinaan kampung KB itu sebulan 3 kali dan juga ganti-gantian misal hari ini Kampung KB A linda yang cukup jauh.. nanti pembinaan yang kedua mungkin yang dekat-dekat aja..... juga gitu kalo vevi jauh nanti berikutnya cari lokasinya dekat..... ya gitu aja ganti-gantian... dan juga kita ada kerjasama lintas sektoral... nahhh biasnaya itu mereka juga ngisi materi....

Adel : Lintas sektornya bu??????????

Hadijah : Iyaa.... lintas sektoral itu kerjasama yang terjalin antara dinas kami dengan berbagai dinas di Kab. Paser ini..... sampai saat ini banyak sudah bantuan-bantuan untuk Kampung KB yang didapat.....

dari bidang kami juga mengadakan pengenalan kepada pengurus Kampung KB apabila ada yang mau pake KB spiral gitu... dan kemaren sudah sosialisasi dibeberapa dan Alhamdulilah banyak yang mau pasang.... dan nanti bulan juni sekitar tanggal berapaa yaa... saya lupa ada pemasangajn KB secara gratis di desa senaken sana... jadi siapa saja boleh pasang KB asal sesuai dengan peraturan dan syarat-syarat pemakai.....

Adel : Itu gratis bu?????

Hadijah : iyaaa gratisss..... ga Cuma pengurus Kampung KB aja karena ini program menyeluruh untuk siapa saja.... bukan kayak program khusus pengurus Kampung KB saja.....

Adel : Terus bu, tentang operasional Kampung KB sendiri gimana???????/

Hadijah : Operasional apanya????biaya?????

Adel : iyaa bu tentang penggunaan biaya nya darimanaa dan bagaimana??????

Hadijah : Yaaa..... saat ini Kampung KB seluruh Kab. Paser menggunakan dana desa masing-masing....tetap kembali lagi ke desa masing-masing.... kalau soal dana dari kantor kami dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kab. Paser sendiri sebetulnya tidak mempunyai dana yang besar dalam hal operasional

Adel : kalau boleh tau berapa ya bu? Dan dari mana ?

Hadijah : satu orang dapat 40rb dan dana nya ada dari kantor dari operasional Kampung KB meskipun sedikit, dan itu mereka dibidang keuangan memperjuangkan betul untuk pengurus dapat uang trasnsport... biar agak senang juga mereka ikut kegiatan dan dapat duit... itung-itung gantiin uang bensin mereka ehheehehe.....

Adel : oh gitu yaa bu? Terusss kalau untuk sarana prasarana disini udah ada apa aja bu?

Hadijah : Ya itu bisa diliat kami ada Bus yang baru untuk keliling diseluruh kecamatan khusu KB tapinya... dan juga kita punya mobil khusus untuk operasional Kampung KB... mungkin kamu nanti bisa tanya ke linda aja ya kalau mau lebih detail mengenai itu....

Adel : oooh baik..bu

Adel : Pertanyaan selanjutnya bu gini... pernah adakah kesalahpahaman mengenai tentang Kampung KB?

Hadijah : Maksudnya gimana??????

Adel : seperti pemahaman orang kampung mengenai Kampung KB gitu awalnya gimana?????

Hadijah : Ya.... pastinya ada awalnya mereka ngira pastinya Kampung KB ini Cuma program yang untuk program 1 anak saja... tapi enda lama kelamaan mereka ngerti bahwa kalau mereka masuk ke Kampung KB manfaatnya banyak.... di Kampung KB juga kan ada 8 fungsi keluarga yang harus kita terapkan dengan menjalin kerjasama juga dengan dinas lintas sektor yang ada di paser ini .. kan saya bilang tadi..... ya jadinya kampung KB ini merupakan langkah yang tepat bagi masyarakat guna menjadi yang lebih baik lagi dan mau di atur sesuai dengan aturan pemerintah gitu.....biar juga hidup mereka lebih sejahtera

Adel : baik bu.... pertanyaan selanjutnya bu.. kan gini ada beberapa desa yang masih belum mendapat sosialisasi secara merata misalnya kampung KB janju sama podong dengan kampung KB pepara sm

sangkuriman.. nah itu gimana ya bu cara dari dinas mengatasinya atau mungkin ada sebabnya bisa terjadi seperti itu bu??

Hadijah : Ya.. jadi gini masalah kampung KB janju sm podong itu kan mereka kalau enda salah punya masalah sendiri dengan pengurusnya atau bisa dibilang tidak srek..... nah jadi itu juga salah satu faktor yang mungkin mereka kurang jalan.... dan masalah sosialisasi kenapa beda-beda ... ya kami mau lihat dulu dalam beberapa bulan gitu dulu setiap kampung kb ada yang maju sama ada yang nda maju... nah kalau yang maju atau aktif pasti kami akan juga aktif seiring dengan kemauan masyarakat itu sendiri.... tapi ya juga kita tetap monitoring desa lainnya juga.. yang tapi kembali lagi kita kan kurang tenaga penyuluh itu aja..... tapi insyallah kita akan mulai memperbaruhi lagi jika ada kampung kb yang masih kurang mendapat arahan.....

Adel : Oh baik bu.... terus langkah dari dinas bu bagaimana?????

Hadijah : langkah yang gimanaa??????

Adel : untuk misal ada kampung KB yang masih belum aktif gitu????

Hadijah : Yaa.. pasti kita akan datangin terus pembinaaan dan sosialisasi.... koordinasi lagi betul-betul dilaksanakan.....

Adel : kalau misalkan kayak kemaren bu... di desa janju masa yang datang Cuma 8 orang bu??????? Itu bagaimanaa??????????/

Hadijah : iya memang desa janju itu ada masalah dengan kepala desanya yang dulu nda terima nda setuju kalau ada kampun KB tapi ... tetap ada kan kampung Kbnya

Adel : Yaa bu tapi masa dari banyaknya pengurus yang datang Cuma 8 orang... bagaimana mau maju bu ehehhehe????????

Hadijah : Ya..... begitu sudah kalau enda ada kesadaran dari masyarakatnya sendiri.... susah sudah cape-cape diadakan sosialisasi yang datang Cuma delapan orang..... tapi sudah kan di kooridnasikan lagi kemaren bilang bu bidan jannah sm benekdikta juga sudah harus dipaksa biar mereka semua mau ikut proses administrasian..... padahal kan desa mereka itu banyak sekali potensinya sayang sekali hehehe..... kalau enda di manfaatkan apalagi sudah ada kampung warna warni.....

Adel : Iya bu ehehehhee.....

Hadijah : Biasanya kalau enda dipaksa gitu mereka gamau turun yaa paling kalau ada urusan-urusan yang sifatnya tidak pribadi mungkin mereka bisa datang aja.... ya nantilah kita bicarakan lebih mendalam lagi dengan para pengurusnya..... padahal loh yaa kalau dilihat jarak dari desa janju sm kantor di grogot nggak jauhhh 15 menit nyampe..... ya

mungkin dari masyarakatnya sudah ada mindset kalau program Kampung KB tidak pentingkali yaa.....sehingga mereka kurang antusias dalam menjalankannya.....

Adel :Bu lalu saya mau tanya tentang rentang birokrasi Kampung KB sendiri gimana bu dalam pelaksananya???

Hadijah : Rentang birokasi maksudnya???????/ biaya operasional atau apaaa??????

Adel : Iya buu seperti biaya operasional dan lain-lain.....

Hadijah : Kalau yaaaa dari birokraisnya tentu ada perturan-peraturan yang jelas sesuai dengan itu misal Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 itu kan tentang perkembangan penduduk, semestinya gimana dan ada pembangunan juga, lalu ada peraturan desa ... UU 60 Tahun 2014 tentang ya dana-dana desa yang bisa digunakan untuk keperluan pembangunan seperti salah satunya ya... Kampung KB ini.... dan juga dana Kampung KB ini berasal dari dana desa juga..jadi ya program ini kembali kedesa juga dan dikelola desa juga.. dengan catatan kami sebagai dinas yang bertanggung jawab atas program ini.....

Adel : Iyaa bu... oke bu ini pertanyaan terakhir. Apa harapan ibu kedepannya untuk Kampung KB sendiri????????

Hadijah : Yaa.... tentunya saya ingin Kampung KB di Kab.Paser ini selalu dapat memberi arahan yang

baik untuk semua masyarakat semua golongan semuanya pokoknya dapat merasakan dampak positif yang diberikan dan juga dengan adanya kampung KB ini masyarakt di Kab. Paser ini dapat lebih sejahtera lahir batin, lebih makmur, lebih bersahaja dan mendapat perataan keadilan yang sama dan tidak ada perbedaan. Dan juga kami dari dinas sebagai dinas yang bertanggung jawab atas seluruh bentuk pelaksanaan, pembinaan tentang kampung KB akan terus memberikan pelayanan sebaik mungkin, serata mungkin dan juga dapat memberikan yang terbaik untuk masyarakat

Adel : Baik.... bu terima kasih atas waktunya....

Hadijah : iyaaa sama-samaa.....

Hasil Wawancara dengan Penyuluh Lapangan Porgram Kam[ung KB Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser

Nama Narasumber : Linda dan Vevi

Jabatan : Penyuluh Lapangan Program Kampung KB

Tempat Wawancara : Kantor Dinas

Adel	: Assalamualaikum mbak.....
Linda	: Waalikumusalammm..... masuk-masuk.....
Adel	: hehehe..... mbak saya mau wawancara sekarang bisa??????/
Linda	: Ohh iyaaa bisa-bisaaa.....tentang Kampung KB kan yaaa..... ??????
Adel	: Iyaaa mbaa.....
Linda	: iyaaa silahkan mau nanya apaa??????//
Adel	: Mau tanya tentang kondisi lapangan Kampung Kb mbak???????/
Linda	: ohhhh iya iya..... kamu Kampung KB mana aja yang diteliti????????
Adel	: Kampung KB pepara , sangkuriman, sungai tuak sama janju mba.....
Linda	: Kampung KB sungai tuak??????/
Adel	: Iya mbak..... Kampug KB aswat.....
Linda	: Ohh.... jadi ini del ..... Kampung KB aswat itu sama janju sebenarnya kami dari pihak dinas di toal mentah-mentah sampai-sampai mereka ngirim surat kalau mereka ngga terima adanya program kampung KB di desa mereka... dan yang ngirim kepala desanya pula.....
Adel	: Ohhh gituuu ya mba..... terus gimana mba??????/
Linda	: Yaaa kampug KB disana ga ada..... tapi kalau yang janju ada tapi ya gitu kayaknya nda jalan.....Kamu gamau ganti aja???????? Soalnya awalnya... mereka ga mau tapi setelah kita diskusi

terus dan kasih tau macam-macam tentang Kampung KB fungsi, program yang nanti ada sampe manfaat yang bisa didapat.... kita kasih tau semua pokoknya dan alhamdulilah mereka mau... dan kita resmi membentuk Kampung KB janju 08 September 2017....kalau mau kamu ambil janju juga gapapa sih..... nanti kita kesana...

Adel : Ganti sama apa mba????

Linda : Coba ganti aja desa olung tuh bagus, desabatu butok..... atau ngga desa pondong.....nanti kalau mau penelitian disitu nanti kita jalan kesana... kalau kamu ambil itu... tapi kalau desa sungai tuak kayaknya gabisaa..coba ganti ajaa. Yaaaaa.....

Adel : di Desa Olung atau ngga desa podong aja mba.....

Linda : Oh iyaaa..... olung bagus juga sm podong itu sepertinya mati suri bagus kamu jadikan penelitian....

Adel : Oh... oke-oke mbak..... terus mba mau nanya dalam pelaksanaan Kampung KB ini gimana mba?????????

Linda : untuk pelaksanaan Kampung KB sendiri sesuai dengan Undang-undang No. 52 tahun 2009 yaa tentang perkembangan kependudukan pembangunan kerluarga... nah beradsarkan hal tersebut mungkin seiringnya dengan perkembangan kependudukan saat ini yang bisa dibilang meledak sehingga akibatnya adalah mucul banyak kesenjangan-

kesenjangan sosial... apalagi khususnya pada kota-kota besar.... hal itulah yang menjadi dasar dibentuknya program Kampung KB oleh pusat dan juga pastinya ya untuk pemerataan di indonesia ini.... dan dari segi pelaksanaanya sama seperti yang di instruksikan pusat yaitu bkkn sebagai acuan kita untuk.. seperti bagaimana sih pelaksanaanya, apa saja yang harus kita lakukan, dan lain-lainya.... itu

Adel : Kalau untuk penyuluhan atau pembinaan sendiri dilakukan setiap kapan mba????????

Linda : Biasanya kami melakukan penyuluhan setiap 3x sebulan..... jadi ganti-gantian gitu keliling saya sama mba vevi.....

Adel : Hoooh..... Apa ngga ada jadwal tetap gitu mba buat penyuluhan????????

Linda : ga ada say.... hehe jadi ya kita agendakan aja pokoknya setiap sebulan itu jalan ke kampung KB 3x .....jadi kita ngga ada jadwal rutin-rutin gitu.....

Adel : Bentu-bentuk penyuluhanya gimana mbak???

Linda : Ya... penyuluhan ada moderator, narasumber dari dinas-dinas lintas sektor terus ada tanya jawab dan misal ada pembinaan bisa langsung dilaksanakan pembinaan saat itu juga..... biasanya kalau melakukan pembinaan yaa melibatkan semua pengurus Kampung KB.....

Adel : Kalau misalkan untuk kampung KB janju sama pondong itu gimana mbak???? Apa sudah ada pembinaan?????

Linda : nah... itu dia kemarin baru sekali semenjak pembentukan..... nanti kita kesana buat sosialisasi pengurusnya juga supaya lebih aktif lagi.. mungkin kayaknya dekat-dekat ini kita kesana ya.....

Adel : ohh siap mba.....

Adel : Mba... kalau pelaksanaan sosialisasi Kampung KB di desa pepara, sangkuriman, janju sama pondong kira-kira sudah berapa banyak ya mba melakukan penyuluhan??????

Linda : Kalau desa pepara sudah melakukan sosialisasi sebanyak 18 kali dan rapat koordinasi pengurus sebanyak 6 kali, kalau desa sangkuriman sudah 20 kali penyuluhan sosialisasi dan rapat koordinasi sebanyak 12 kali, kalau desa janju sama desa pondong baru 1 kali terhitung senjak melakukan pembentukan.....

Adel : Hooooh gitu.....

Adel : Mba..... kenapa ya kampung KB Janju sama pondong rentang pelaksanaan sosialisasinya beda sama Kampung KB pepara sama

Linda : Ya sebenarnya kurangnya penyuluh dari dinas yang jadi salah satu faktor kita ngga bisa melakukan sosialisasi secara rutin, secara kami hanya ada dua orang penyuluh... dibanding dengan jumlah Kampung KB yang ada 21 di Kab. Paser..... terus juga..... Kampung KB janju sama Kampung KB Pondong itu ada masalah-masalah gitu antara pengurus sama kepala desa.. ya jadi gitu deh bisa di

bilang gak sejalan antara pengurus dengan kepala desa... itu juga yang mempengaruhi kita jarang kesana karena ya kurang progres, kurang aktif pengurusnya....

Vevi :Iya.... mba kita kurang penyuluh masa cuma dua penyuluh dari banyaknya desa di Paser ini.... mungkin nanti kedepannya bisa ditambah jadinya kita enak membagi bagian-bagian mana aja.....

Adel : Ohhhh gitu ya mba..... lalu bagaimana pembagianya kalau cuma 2 orang penyuluh???

Vevi : Saya rasa kami masih bisa sih.... ya kurangnya kita itu masih ngga ada jadwal rutin jadi ya hari ini ini mau kemana terserah... dan besok kemana gitu.... kesanya agak mendadak hehehe.....

Linda : Iyaaa..... biasanya kita H-1 atau nda H-2 jalan baru kami kasih tau sama pengurus-pengurus Kampung KB sana.....

Adel : Kok bisa begitu mba hehehe?????????

Linda : Yaaa..... hhahha gimana ya untuk koordinasi aja juga sihhhh memang kita ngga bisa nentuin mana mana desa yang mau di kunjungin pasti agak mendadak.... tapi ya kita tetep ada koordinasi juga dari lintas sektor yang mau memberikan penyuluhan biasanya dalam sebulan itu lintas sektor melakukan penyuluhan itu terus disetiap kampung.

Lampiran.6 Tanda Kesedian Narasumber

DAFTAR KESEDIAN MENJADI NARASUMBER

NO.	NAMA DAN JABATAN	TTD
1.	Dra. Hadijah Kepala Dinas PPKB P3A	
2.	A. Rusdiansyah (Kabid KBKS)	
3.	Abdurrahman (Staf Dalduk)	
4.	Komiruddin .S. (Kasi)	
5.	Kungsih (kabid dalduk)	
6.	Hj. Tuti Suryani (kasi ADVOKASI)	
7.	Emy Setyo Astuti (Kasi PPPUKB)	
8.	VEVI KRISTIANA (PENYULUH KB)	

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Lampiran.7 Foto-foto Pendukung Penelitian

Gambar. 19 Sosialiasasi Kampung KB Desa Pepara Sipakatuo

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019)

Gambar. 20 Kegiatan Kampung KB "Sipakatuo" Desa Pepara

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019)

Gambar 21. Sosialiasasi Kampung KB Kembang Renteng Desa Sangkuriman

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019)

Gambar 22. Sosialiasasi Penggunaan KB

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019)

Gambar 23. Sosialisasi Kampung KB Desa Janju "Harapan Taka"

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019)

Gambar. 24 Sosialisasi Kampung KB Desa Pondong "Pesisir Indah "

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019)